



9 772775 092009

E-ISSN 2775-0922

JURNAL STUDI INOVASI

Vol 1 No 3 Juli 2021



Inovbook Publications



**Jurnal
Studi Inovasi**

<https://jurnal.studiinovasi.id>



PEMIMPIN REDAKSI

Wanda Tifani Arantika
Fakultas Ekonomi dan
Bisnis, Universitas Airlangga
wandatifany@gmail.com

BAGIAN EDITOR

Wanda Tifani Arantika
wandatifany@gmail.com

Siti Muntamah
sitim080@gmail.com

GRAFIS

Ali Mujahidin

ASOSIASI EDITOR

Karina Idria Setyawati
Fakultas Ekonomi dan
Bisnis, Universitas Airlangga

**Devita Ramadhani
Kurniasari**
Fakultas Teknologi Industri,
Institut Teknologi Sepuluh
Nopember

Wahidah Mumtahanah
Fakultas Ekonomi dan
Bisnis, Universitas Airlangga

**Fauziah Putri Indi
Rahmawati**
Fakultas Ekonomi dan
Bisnis, Universitas
Pembangunan Nasional
Veteran Surabaya

Amadea Fitri Syaharani
Fakultas Sains dan
Teknologi, Universitas
Airlangga

MITRA BESTARI

Leope Pinnega
Badan Kepegawaian dan
Sumber Daya Manusia
Kabupaten Tulungagung

Farid Pribadi
Universitas Negeri Surabaya

Iman Iskandar
Badan Sumber Daya
Manusia Kementerian Dalam
Negeri

Heri Wahyudianto
Badan Penelitian dan
Pengembangan Provinsi
Papua

Agustinus Hartopo
Badan Penelitian dan
Pengembangan Provinsi
Papua

Tedi Gunawan
Ritsumeikan University

Adi Asmariadi Budi
Badan Penelitian dan
Pengembangan Daerah
Provinsi Lampung

Ambar Rosidhah Qoonitah
Badan Pengawas Pemilu

Adi Suhendra
Kementerian Dalam Negeri

Firdaus Sany Lewenussa
The University of Sheffield,
Inggris



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas perkenan-Nya kami dapat menerbitkan Jurnal Studi Inovasi (JSI) Volume 1 Nomor 3, Juli 2021.

Seiring dengan meningkatnya kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan serta sumberdaya manusia maka hasil-hasil penelitian maupun sanggahan ilmiah inovasi perlu dipublikasikan dan dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh pembaca.

Dalam edisi ini disajikan 10 (sepuluh) makalah yang meliputi: (1) Strategi Orang Kuat Lokal dalam Pemilu Legislatif Tahun 2019 (Studi pada Pemenangan Calon Legislatif Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Bangka), (2) Inovasi Pembinaan dan Pengawasan dalam Pencapaian Urusan Wajib Pelayanan Dasar, (3) Optimalisasi Potensi Lokal untuk Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Desa Tanjung Gunung, (4) Strategi Bertahan Hidup Petani (Studi pada Keluarga Petani Karet di Desa Jeriji pada Masa Pandemi Covid-19), (5) Implementasi Manajemen Kelas pada Sekolah Dasar dalam Upaya Meningkatkan Motivasi Belajar Peserta Didik di Masa Pandemi Covid-19, (6) Strategi Penanganan Konflik dengan Inovasi Sosial (Studi pada Konflik Perebutan Lahan di Desa Mempaya, Kecamatan Damar, Kabupaten Belitung Timur), (7) Analisis Fenomena Tren Bersepeda di Masa Pandemi pada NOOB Folding Bike Community Bangka, (8) Inovasi Kebudayaan: Tari Chit Ngiat Pan: Refleksi Hubungan Sosial atas Semboyan “Tong Ngin Fan Ngin Jit Jong”, (9) Pengaruh Pembelajaran Online pada Masa Pandemi Covid 19 terhadap Prestasi Belajar Siswa Kelas IX SMP, (10) Politik Identitas : Strategi Negosiasi Marga dalam Pernikahan Amalgamasi pada Etnis Batak dan Melayu

Terima kasih kami sampaikan kepada para peneliti dan para fungsional lain yang telah ikut berpartisipasi mengirimkan makalah untuk kelangsungan jurnal ini. Tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada para Mitra Bestari yang telah membantu sehingga jurnal ini dapat diterbitkan..

Kami mengharapkan masukan saran dan kritik demi penyempurnaan terbitan selanjutnya, serta semoga kerjasama yang telah berjalan dapat ditingkatkan.

Bandung, Juli 2021

Redaksi



DAFTAR ISI

Strategi Orang Kuat Lokal dalam Pemilu Legislatif Tahun 2019 (Studi pada Pemenangan Calon Legislatif Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Bangka)	
Resti Aprilia, Rini Archda Saputri, Luna Febriani.....	1-8
Inovasi Pembinaan dan Pengawasan dalam Pencapaian Urusan Wajib Pelayanan Dasar	
Lily Latul	9-22
Optimalisasi Potensi Lokal untuk Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Desa Tanjung Gunung	
Nopi, Aimie Sulaiman, Sujadmi.....	23-29
Strategi Bertahan Hidup Petani (Studi pada Keluarga Petani Karet di Desa Jeriji pada Masa Pandemi Covid-19)	
Anisa Nur Fajri, Bustami Rachman, dan Iskandar Zulkarnain.....	30-35
Implementasi Manajemen Kelas pada Sekolah Dasar dalam Upaya Meningkatkan Motivasi Belajar Peserta Didik di Masa Pandemi Covid-19	
Husni Mubarak.....	36-44
Strategi Penanganan Konflik dengan Inovasi Sosial (Studi pada Konflik Perebutan Lahan di Desa Mempaya, Kecamatan Damar, Kabupaten Belitung Timur)	
Shindi Ade Lestari, Iskandar Zulkarnain, Luna Febriani	45-54
Analisis Fenomena Tren Bersepeda di Masa Pandemi pada NOOB Folding Bike Community Bangka	
Cindi Febriana, Luna Febriani, Iskandar Zulkarnain	55-61
Inovasi Kebudayaan: Tari Chit Ngiat Pan: Refleksi Hubungan Sosial atas Semboyan “Tong Ngin Fan Ngin Jit Jong”	
Yessi Nirmala, Aimie Sulaiman, Jamilah Cholillah.....	62-71
Pengaruh Pembelajaran Online pada Masa Pandemi Covid 19 terhadap Prestasi Belajar Siswa Kelas IX SMP	
Nikmatul Maulana, Siti Aisyah, Fatih Holis Ahnaf.....	72-79
Politik Identitas : Strategi Negosiasi Marga dalam Pernikahan Amalgamasi pada Etnis Batak dan Melayu	
Desri Siagian, Ranto, Rini Archda Saputri	80-85



HALAMAN INTISARI

e-ISSN : 2775-0922

Date of Issue: Juli 2021

Halaman ini dapat direproduksi atau disalin tanpa izin dari editor dan penulis

Resti Aprilia, Rini Archda Saputri, Luna Febriani (Universitas Bangka Belitung, Gang IV No.1, Balun Ijuk, Merawang, Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka Belitung 33172)

Strategi Orang Kuat Lokal dalam Pemilu Legislatif Tahun 2019 (Studi pada Pemenangan Calon Legislatif Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Bangka)

JURNAL STUDI INNOVASI, Juli 2021, vol 1, no 3, hal. 1-8, 3 g, 1 tab, 9 ref

Penelitian ini mengkaji tentang orang kuat lokal dalam pemilu legislatif tahun 2019 (studi pada pemenangan calon legislatif daerah pemilihan bangka). Tujuan dari penelitian ini untuk mengidentifikasi peran orang kuat lokal dan mengetahui bagaimana bentuk hubungan timbal balik atas eksistensi orang kuat lokal di Daerah pemilihan 4. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus, serta teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam. Teori yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan konsep Local Strongman oleh Joel S. Migdal yang menjelaskan bahwa dasar terbentuknya Local Strongman ada tiga argumen utama yakni: *weblike societies*, *control sosial* dan *Weak state*. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa orang kuat lokal dilibatkan dalam pemilu tahun 2019 di daerah pemilihan 4 terutama untuk membantu dalam memenangkan pemilu. Orang kuat lokal tersebut mereka adalah dari kalangan tokoh agama dan pengusaha. Adapun peran yang dilakukan oleh orang kuat lokal dalam pemenangan calon legislatif yakni menentukan segmentasi pemilih berdasarkan wilayah, menetapkan target seperti orang tua, kalangan perempuan, orang-orang majelis dan melakukan mobilisasi massa seperti mampu mengumpulkan massa dalam jumlah banyak saat kampanye berlangsung. Dalam hal ini ada juga hubungan timbal balik yang diterima oleh orang kuat

lokal ketika mendukung calon legislatif yakni dapat bantuan ekonomi seperti halnya dapat meletakkan anggota keluarga pada jabatan tertentu dan kerjasama yang diperoleh antara orang kuat lokal dan calon legislatif.

(author)

Kata kunci: Orang kuat Lokal, Pemilu Legislatif, Pemenangan

Lily Latul (Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Jl. Medan Merdeka Utara No 7 Jakarta Pusat)

Inovasi Pembinaan dan Pengawasan dalam Pencapaian Urusan Wajib Pelayanan Dasar

JURNAL STUDI INNOVASI, Juli 2021, vol 1, no 3, hal. 8-22, 1 g, 0 tab, 10 ref

Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar Warga Negara. Dalam konteks pelayanan, khususnya pelayanan dasar, Standar Pelayanan Minimal (SPM) memuat ukuran-ukuran atau parameter-parameter yang harus dipedomani oleh pemerintah daerah, pelayanan yang diberikan kepada masyarakat harus terukur baik dari sisi jumlah, jenis maupun mutu. SPM dalam penyelenggara urusan pemerintahan daerah diposisikan untuk menjawab hal-hal penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam penyediaan pelayanan dasar yang bermuara pada penciptaan kesejahteraan rakyat. Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) di tingkat pusat dan daerah memiliki kewenangan untuk melakukan pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, dengan demikian maka peran APIP Pusat maupun APIP Daerah dituntut berperan dalam hal keberhasilan penerapan SPM. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pembinaan dan pengawasan seperti apa yang harus dilakukan APIP sehingga tujuan yang ingin dicapai yaitu setiap warga negara mendapatkan pelayanan dasar dapat tercapai.

(author)

Kata Kunci: Pelayanan Dasar, Standar Pelayanan Minimal, Pemerintah Daerah



Nopi, Aimie Sulaiman, Sujadmi (Universitas Bangka Belitung, Gang IV No.1, Balun Ijuk, Merawang, Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka Belitung 33172)

Optimalisasi Potensi Lokal untuk Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Desa Tanjung Gunung

JURNAL STUDI INNOVASI, Juli 2021, vol 1, no 3, hal. 23-29, 0 g, 0 tab, 16 ref

Potensi lokal merupakan segala sesuatu sumber daya baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia yang ada di suatu desa yang bisa dikembangkan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan. Potensi lokal sangat berperan penting dalam menopang kehidupan ekonomi masyarakat khususnya di Desa Tanjung Gunung. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tentang upaya-upaya optimalisasi potensi lokal untuk meningkatkan ekonomi masyarakat serta untuk mendeskripsikan faktor yang mendorong dan menghambat upaya optimalisasi potensi lokal untuk meningkatkan perekonomian masyarakat di Desa Tanjung Gunung, Kabupaten Bangka Tengah. Penelitian ini menggunakan Teori tentang tahapan pemberdayaan dari M. Ayub Padangaran. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif Deskriptif. Hasil dari penelitian ini ditemukan beberapa upaya yang dilakukan dalam optimalisasi potensi lokal di Desa Tanjung Gunung yaitu dengan memberikan sosialisasi kepada masyarakat (tahap penyadaran), memberikan pelatihan kepada masyarakat (tahap pengkapasitasan) dan masyarakat sendiri yang sudah memiliki kemampuan membuat panganan lokal yang dalam hal ini disebut sebagai tahap pendayaan oleh Ayub. Faktor yang mendorong adalah adanya motivasi dari pihak yang memberikan pelatihan khususnya tim pelaksana kegiatan atau TPK pemberdayaan masyarakat Desa Tanjung Gunung, adanya kesadaran dari individu masyarakat dalam mengolah potensi lokal yang dimiliki dan ekonomi. Sedangkan faktor penghambatnya adalah ketersediaan bahan baku, cuaca serta teknologi yang masih tradisional.

(author)

Kata Kunci: Potensi lokal, Optimalisasi, Ekonomi.

Anisa Nur Fajri, Bustami Rachman, dan Iskandar Zulkarnain (Universitas Bangka Belitung, Gang IV No.1, Balun Ijuk, Merawang, Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka Belitung 33172)

Strategi Bertahan Hidup Petani (Studi pada Keluarga Petani Karet di Desa Jeriji pada Masa Pandemi Covid-19)

JURNAL STUDI INNOVASI, Juli 2021, vol 1, no 3, hal. 30-35, 2 gl, 0 tab, 10 ref

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan informasi, mengenai strategi bertahan hidup keluarga petani

karet di Desa Jeriji Bangka Selatan pada masa pandemi Covid-19. Mayoritas masyarakat di Desa Jeriji ini hampir 60% bermata pencaharian sebagai petani karet. Penelitian ini merupakan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif dengan jenis dan sumber data untuk menjawab masalah ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan diskusi dengan keluarga petani karet. Sedangkan data sekunder dikumpulkan melalui sumber lain berupa dokumen-dokumen. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa kondisi kehidupan keluarga petani karet di Desa Jeriji pada masa pandemi Covid-19 yang dipengaruhi beberapa faktor, yakni : 1) pendapatan ekonomi keluarga pada masa pandemi Covid-19, 2) harga jual beli karet berfluktuasi semakin rendah, 3) perubahan musim cuaca, 4) harga kebutuhan pokok semakin meningkat. Dari kondisi kehidupan keluarga petani karet di Desa Jeriji berada pada garis kemiskinan dan untuk terus bertahan hidup sejumlah keluarga petani karet di Desa Jeriji melakukan strategi atau mekanisme survival, yakni : 1) strategi alternative subsistensi, 2) strategi mengikat sabuk lebih kencang, 3) strategi jaringan/ relasi jaringan social. Strategi ini mereka lakukan agar dapat terus bertahan hidup yang akan datang.

(author)

Kata Kunci : Pandemi Covid-19, Keluarga Petani Karet, Strategi Bertahan (author)

Husni Mubarak (Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara, Jalan Taman Siswa, Pekeng, Jl. Kauman, Kec. Tahunan, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah 59451)

Implementasi Manajemen Kelas pada Sekolah Dasar dalam Upaya Meningkatkan Motivasi Belajar Peserta Didik di Masa Pandemi Covid-19

JURNAL STUDI INNOVASI, Juli 2021, vol 1, no 3, hal. 36-44, 2 gl, 0 tab, 10 ref

Penelitian ini bertujuan untuk memahami lebih dalam terkait dengan berbagai inovasi yang dilakukan oleh ketiga kota di Indonesia, diantaranya yaitu Kota Sawahlunto dengan inovasi Satu Dalam Satu Peta Kota Sawahlunto, kota Balikpapan dengan inovasi Bernama Penggunaan Peta Dasar Dalam Upaya Penanganan Perumahan dan Permukiman Kumuh, dan juga pada Kota Kebumen dengan inovasi Aplikasi Peta Wisata Online Kebumen yang memanfaatkan media peta sebagai alat untuk mewujudkan inovasi atau perubahan kualitas layanan publik. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Populasi dalam penelitian ini yaitu daerah yang telah melakukan inovasi dengan menggunakan peta sebagai ide untuk mewujudkan beragam perubahan yang berkualitas. Sedangkan, sampel dalam penelitian ini yaitu terdapat tiga kota, diantaranya adalah Kota Sawahlunto, Kota Balikpapan, dan Kota Kebumen. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dengan beragam inovasi yang dilakukan oleh ketiga kota di



Indonesia, yakni Kota Sawahluto, Kota Balikpapan, dan juga Kota Kebumen mencerminkan bahwa masyarakat sudah pandai dalam memanfaatkan perkembangan jaman untuk membuat aktivitas menjadi lebih efektif dan efisien. Hasil dari adanya inovasi satu dalam satu peta Kota Sawahlunto adalah terbangunnya data berbasis sistem informasi geospasial. Sedangkan, hasil dari adanya inovasi Penggunaan Peta Dasar Dalam Upaya Penanganan Perumahan Dan Permukiman Kumuh Kota Balikpapan salahsatunya yaitu adanya data yang terintegrasi secara spasial dapat mengefektifkan analisa dalam perencanaan pembangunan yang dalam hal ini adalah dalam hal penanganan perumahan dan permukiman kumuh di Kota Balikpapan. Sedangkan, hasil inovasi dari adanya Aplikasi Peta Wisata Online Kebumen yaitu Teknik Penyajian peta didasari dari peta online Google Maps yang telah dimodifikasi dengan penambahan Database MySQL.

(author)

Kata Kunci: Manajemen Kelas, Motivasi Belajar, Covid-19, Pembelajaran.

Shindi Ade Lestari, Iskandar Zulkarnain, Luna Febriani (Universitas Bangka Belitung, Gang IV No.1, Balun Ijuk, Merawang, Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka Belitung 33172)

Strategi Penanganan Konflik dengan Inovasi Sosial (Studi pada Konflik Perebutan Lahan di Desa Mempaya, Kecamatan Damar, Kabupaten Belitung Timur)

JURNAL STUDI INNOVASI, Juli 2021, vol 1, no 3, p.45-54, 2 g, 0 tab, 16 ref

Konflik yang terjadi mempermasalahkan isu lingkungan yang melibatkan beberapa pihak dengan fokus sektornya masing-masing. Konflik ini berawal dari tahun 2003 yang dimana masuknya PT. SCHG ditengah-tengah masyarakat sudah banyak menimbulkan polemik dimasyarakat sekitar, pada tahun 2009 pihak PT. SCHG melaporkan salah satu masyarakat yang menambang dilahan tersebut kepada pihak polisi, maka dari itu konflik pun semakin memuncak dimana para masyarakat Desa Mempaya tidak terima dengan tindakan yang dilakukan oleh pihak PT. SCHG tersebut para masyarakat Desa Mempaya melakukan demonstrasi terhadap PT. SCHG dikarenakan masyarakat tidak terima akan tindakan PT. SCHG yang melaporkan masyarakat menambang dilahan milik PT. Timah. Yang dimana mulanya konflik ini hanya terjadi antara Pihak PT. Timah dan pihak PT. SCHG, akan tetapi didalam masyarakat Desa Mempaya memiliki kelompok masyarakat yaitu kelompok masyarakat penambang dan kelompok masyarakat buruh sawit, yang dimana di kelompok masyarakat ini memiliki kepentingan satu sama lain seperti masyarakat penambang lebih pro kepada PT. Timah karena ketika lahannya jatuh kepada PT. Timah maka masyarakat penambang dengan leluasa menambang dilahan tersebut. dan sebaliknya pun begitu, kelompok masyarakat buruh sawit lebih pro

kepada PT. SCHG karena ketika lahannya jatuh kepada PT. SCHG maka masyarakat buruh sawit tidak akan khawatir akan hilangnya pekerjaan. Maka dari itu, dari adanya konflik perebutan lahan ini banyak aktor-aktor yang dilibatkan antara lain pihak PT. Timah, pihak PT. SCHG, kelompok masyarakat penambang dan kelompok masyarakat buruh sawit. Kecenderungan perebutan lahan yang terjadi antara PT. Timah dengan PT. SCHG diawali dengan adanya penanaman bibit sawit oleh PT. SCHG seluas 1.950 Hektar serta mengklaim lahan tersebut sudah menjadi hak mereka. Kasus perebutan tersebut telah berlangsung dari tahun 2003-2011 yang pada akhirnya dimenangkan oleh PT Timah. Jika ditinjau secara hukum, lahan tersebut merupakan kepemilikan PT Timah yang sudah diatur dalam regulasi. Artinya, bisa dipahami dalam hal ini terdapat tumpang tindih akses lahan yang dilakukan PT. SCHG terhadap lahan yang seharusnya menjadi kepemilikan PT Timah. Maka muncul perselisihan yang mengarah kepada konflik perebutan lahan antara kedua belah pihak yakni PT Timah dengan PT. SCHG. Konflik perebutan lahan yang berlangsung lama tersebut banyak memunculkan polemik di masyarakat hingga pada akhirnya pihak-pihak yang terlibat membentuk suatu kesepakatan bersama untuk menyelesaikan konflik melalui kompensasi berupa sejumlah uang yang diberikan PT. Timah kepada PT. SCHG. Penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus. Hasil dari penelitian ini lahan yang menjadi konflik antara perusahaan kami dengan PT. Timah itu, kedua belah pihak kami sudah selesai membuat kesepakatan satu sama lain, yang dimana isinya tentang lahan yang sudah ditinggalkan dari perusahaan kami agar tidak ada lagi bentuk berkelanjutan ini dari sisi perusahaan kami, sedangkan dari sisi PT. Timah lahan yang di konflikkan telah berhenti produksinya. Konflik perebutan lahan di Desa Mempaya, pihak-pihak yang terlibat dalam perebutan lahan tersebut sudah tidak mempermasalahkan keberadaan lahan tersebut, karena konflik perebutan lahan di Desa Mempaya sudah membuat kesepakatan yang di sepakati bersama. Masyarakat penambang dan masyarakat buruh sawit di saat ini sudah tidak berebut lahan tersebut karena sudah ada lahan mereka masing-masing untuk mencari nafkah, yang termasuk lahan penambang tidak boleh di tanami sawit dan yang termasuk lahan sawit tidak boleh di tambang dan lahan yang menjadi sengketa atau lahan yang direbutkan tidak lagi di gunakan baik dari masyarakat penambang ataupun masyarakat buruh sawit, malahan lahan tersebut di tinggalkan oleh masyarakat penambang dan masyarakat buruh sawit.

(author)

Kata Kunci: Perebutan, Lahan, Perebutan Lahan, Konflik, Inovasi

Cindi Febriana, Luna Febriani, Iskandar Zulkarnain (Universitas Bangka Belitung, Gang IV No.1, Balun Ijuk, Merawang, Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka Belitung 33172)

Analisis Fenomena Tren Bersepeda di Masa Pandemi pada NOOB Folding Bike Community Bangka

JURNAL STUDI INNOVASI, Juli 2021, vol 1, no 3, hal. 55-61, 0 g, 0 tab, 19 ref

Penelitian ini mengkaji tentang analisis fenomena tren bersepeda di masa pandemi pada NOOB Folding Bike Community Bangka. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui motivasi para anggota tertarik bergabung dalam komunitas tersebut dan mengidentifikasi tren bersepeda pada NOOB Folding Bike Community Bangka di masa pandemi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan melakukan observasi, wawancara langsung, dan dokumentasi. Teori yang digunakan untuk menganalisis permasalahan dalam penelitian ini adalah teori masyarakat konsumsi dari Jean Baudrillard yang mana pada konsep mengenai nilai guna, nilai tanda dan simulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fenomena tren bersepeda di masa pandemi pada NOOB Folding Bike Community Bangka berkembang melalui media sosial dan juga bentuk perubahan gaya hidup yang didukung oleh situasi lingkungan yang sedang menghadapi pandemi covid-19 yang pada akhirnya menciptakan kebiasaan baru dalam kehidupan sehari-hari. Kemunculan tren ini akhirnya memberikan cara baru dalam perubahan diri individu untuk lebih menjaga kesehatan dimasa pandemi, awalnya tren bersepeda di masa pandemi guna sebagai kebutuhan kesehatan, namun tren ini berkembang kearah kebutuhan lain, karena mengkonsumsi sebuah tren yang sedang berkembang saat ini dapat membentuk sebuah eksistensi dan identitas sosial bagi anggota yang tergabung pada NOOB Folding Bike Community Bangka.

(author)

Kata kunci : Fenomena, Tren Bersepeda, NOOB Folding Bike Community Bangka, Pandemi.

Yessi Nirmala, Aimi Sulaiman, Jamilah Cholillah (Universitas Bangka Belitung, Gang IV No.1, Balun Ijuk, Merawang, Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka Belitung 33172)

Inovasi Kebudayaan: Tari Chit Ngiat Pan: Refleksi Hubungan Sosial atas Semboyan “Tong Ngin Fan Ngin Jit Jong”

JURNAL STUDI INNOVASI, Juli 2021, vol 1, no 3, p.62-71, 2 g, 0 tab, 16 ref

Penelitian ini mengkaji tentang inovasi yang salah satunya adalah inovasi kebudayaan. Kebudayaan yang dikaji merupakan kebudayaan yang terbentuk dari hasil budidaya atau kreativitas manusia yang disebut dengan seni. Seni yang dimaksud adalah seni tari. Fokus pada

penelitian ini adalah membahas terkait bagaimana refleksi hubungan sosial atas semboyan “Tong Ngin Fan Ngin Jit Jong” pada Tari Chit Ngiat Pan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan analisis interpretatif. Data dikumpulkan dengan teknik observasi, wawancara informan yang ditentukan dengan teknik sampling purposive, dan dokumentasi. Teori yang digunakan dalam menganalisis penelitian adalah teori Interaksionisme Simbolik oleh Herbert Blumer dengan tiga hal prinsip utama yaitu meaning, language dan thought. Peneliti menggunakan simbol tari sebagai unit analisis yakni gerak, tata busana, dan tata rias. Pemaknaan (meaning) pada Tari Chit Ngiat Pan menunjukkan adanya penyesuaian dengan makna solidaritas yakni “Tong Ngin Fan Ngin Jit Jong” yang digali lewat simbol tari. Semboyan tersebut merupakan kunci dari penciptaan Tari Chit Ngiat Pan selain dari mengangkat kebudayaan Etnis Tionghoa. Bahasa (language) di peroleh sebagai hasil interaksi dari sesama penari bahwa Tari Chit Ngiat Pan diciptakan berawal dari tujuan kompetisi. Pikiran (thought) adalah kompetisi yang diikuti adalah suatu tujuan untuk memperoleh kemenangan sehingga dapat melangkah ke tahap internasional. Adanya pemanfaatan semboyan “Tong Ngin Fan Ngin Jit Jong” melahirkan akulturasi yang menunjukkan adanya solidaritas antar Etnis Melayu Dan Etnis Tionghoa di Bangka Belitung yang ditunjukkan kembali melalui seni tari.

(author)

Kata Kunci: Inovasi Kebudayaan, Refleksi Solidaritas, Akulturasi.

Nikmatul Maulana, Siti Aisyah, Fatih Holis Ahnaf (Universitas Islam Zainul Hasan, Jl. Raya Panglima Sudirman No.360, Semampir, Kec. Kraksaan, Probolinggo, Jawa Timur 67282)

Pengaruh Pembelajaran Online pada Masa Pandemi Covid 19 terhadap Prestasi Belajar Siswa Kelas IX SMP

JURNAL STUDI INNOVASI, Juli 2021, vol 1, no 3, p.72-79, 2 g, 0 tab, 16 ref

Pendidikan dimasa Pandemi Covid-19 yang kini menjadi sebuah faktor utama masalah dalam dunia pendidikan, sekolah kini dibatasi dalam bertatap muka atau disebut Luring (Luar jaringan) kini pemerintah mewajibkan sekolah harus merubah sistem pembelajaran menjadi Daring (Dalam Jaringan). Hal tersebut sedikit membuat siswa dan guru mengalami sebuah kesulitan dalam belajar, karna sekolah harus merubah sistem dalam belajar yaitu melewati internet, yang awalnya guru menggunakan sistem media dan mengajar bertatap muka, karna adanya Pandemi Covid-19 akhirnya guru dan siswa terbatas jarak dalam belajar, dan akhirnya keefektifan dalam belajar sedikit bermasalah karna adanya beberapa faktor yang mengganggu dalam belajar, diantaranya terkadang siswa dalam belajar Daring siswa memiliki sedikit kendala,



seperti diantara siswa tidak memiliki gadget untuk belajar Daring dan kadang siswa terkendala pada sinyal di desa masing-masing.

(author)

Kata Kunci: Masa Pandemi, Pengaruh Pembelajaran Online, Prestasi Siswa.

Desri Siagian, Ranto, Rini Archda Saputri (Universitas Bangka Belitung, Gang IV No.1, Balun Ijuk, Merawang, Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka Belitung 33172)

Politik Identitas : Strategi Negosiasi Marga dalam Pernikahan Amalgamasi pada Etnis Batak dan Melayu

JURNAL STUDI INNOVASI, Juli 2021, vol 1, no 3, p.80-85, 2 g, 0 tab, 16 ref

Politik identitas merupakan alat politik suatu kelompok seperti etnis, suku, budaya, agama atau lainnya. Dengan tujuan tertentu misalnya, sebagai alat untuk menunjukkan jati diri atau identitas dari suatu kelompok tersebut. Oleh karena itu setiap dalam pernikahan amalgamasi pada etnis Batak terhadap etnis Melayu, negosiasi marga menjadi penentuan dalam identitasnya dikarenakan marga adalah menjadi identitas utama seorang suku Batak dan jati diri yang dibawah sejak lahir. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan politik identitas negosiasi marga dalam pernikahan amalgamasi pada etnis Batak dan etnis Melayu di Kota Pangkalpinang serta faktor-faktor yang mempengaruhi negosiasi marga dalam pernikahan pada etnis Batak dan Melayu di Kota Pangkalpinang. Penelitian ini menggunakan teori dari Castells yang dikaji dari 3 model yaitu legitimasi identitas, resistensi identitas, dan proyek identitas. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian ini menggunakan snowball sampling. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Sumber data yang digunakan dalam penelitian berasal dari data primer dan sekunder. Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan dari lapangan bahwa pendekatan komunikasi, pengangkatan marga, dan mangaen boru atau mangaen anak adalah menjadi pola utama dalam politik identitas negosiasi marga dalam pernikahan amalgamasi pada etnis Batak dan Melayu di Pangkalpinang. Adapun faktor yang mempengaruhi negosiasi marga dalam pernikahan pada etnis Batak dan Melayu yaitu, faktor cinta dan faktor relasi kuasa. Oleh sebab itu berdasarkan hasil temuan dilapangan dapat disampaikan bahwa dalam pernikahan amalgamasi ini yang dominan memiliki relasi kekuasaan adalah Etnis Batak.

(author)

Kata Kunci: Politik identitas, Negosiasi marga dan Pernikahan Amalgamasi



Korespondensi

Email¹ : restiaprillia98@gmail.com

Email² : riniardhasaputri@gmail.com



Inovbook Publications

Wisma Monex 9th Floor

Jl. Asia Afrika No 133-137 Bandung,
40112



Karya ini dilisensikan di bawah
Lisensi Internasional Creative
Commons Atribusi Nonkomersial
sharelike 4.0.

**STRATEGI ORANG KUAT LOKAL DALAM
PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2019
(Studi pada Pemenangan Calon Legislatif Daerah
Pemilihan 4 Kabupaten Bangka)**

**Resti Aprilia^{1*}, Rini Archda Saputri^{2*}, Luna
Febriani^{3*}**

^{1,2,3} Universitas Bangka Belitung | Gang IV No.1, Balun Ijuk,
Merawang, Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka Belitung 33172

Disetujui: 25 Juli 2021

Abstract

The study aimed to analyze Local Strongmen in 2019 Legislative Election (A Study on the Winning Process of Legislative Candidates in the 4th Constituency of Bangka Regency). The purpose of this study is to identify the rule of local strongman and find out how the reciprocal relationship between existence forms in the 4th constituency in order to help the candidates to win the general election. The method of this study was a descriptive qualitative method with a case study approach, and the data collection was conducted through an in-depth interview technique. The theory used in the study uses the concept of Local Strongman proposed by Joel S. Migdal who states that there are three main arguments as the foundations of the emersion of Local Strongman namely web-like societies, social control, and weak state.

The results of this study portray that local strongmen are involved in the 2019 election in the 4th constituency in order to help the candidates to win the general election. These local strongmen are among religious leaders and businessmen. The roles played by the local strongmen are determining the voter segmentation by region, setting the targets such as old people, women, and assemblymen as well as carrying out mass mobilization such as capable of gathering a large number of people during the campaign. In this case, there is also an interrelation received by the local strongmen while supporting the legislative candidates such as economic support to put their family members in certain positions and cooperation obtained between the local strongmen and the legislative candidates.

Keywords: Role, Local Strongmen, Legislative Election, Winning Process

Abstrak

Penelitian ini mengkaji tentang orang kuat lokal dalam pemilu legislatif tahun 2019 (studi pada kemenangan calon legislatif daerah pemilihan bangka). Tujuan dari penelitian ini untuk mengidentifikasi peran orang kuat lokal dan mengetahui bagaimana bentuk hubungan timbal balik atas eksistensi orang kuat lokal di Daerah pemilihan 4. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus, serta teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam. Teori yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan konsep Local Strongman oleh Joel S. Migdal yang menjelaskan bahwa dasar terbentuknya Local Strongman ada tiga argumen utama yakni: weblike societies, control sosial dan Weak state.

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa orang kuat lokal dilibatkan dalam pemilu tahun 2019 di daerah pemilihan 4 terutama untuk membantu dalam memenangkan pemilu. Orang kuat lokal tersebut mereka adalah dari kalangan tokoh agama dan pengusaha. Adapun

peran yang dilakukan oleh orang kuat lokal dalam pemenangan calon legislatif yakni menentukan segmentasi pemilih berdasarkan wilayah, menetapkan target seperti orang tua, kalangan perempuan, orang-orang majelis dan melakukan mobilisasi massa seperti mampu mengumpulkan massa dalam jumlah banyak saat kampanye berlangsung. Dalam hal ini ada juga hubungan timbal balik yang diterima oleh orang kuat lokal ketika mendukung calon legislatif yakni dapat bantuan ekonomi seperti halnya dapat meletakkan anggota keluarga pada jabatan tertentu dan kerjasama yang diperoleh antara orang kuat lokal dan calon legislatif.

Kata Kunci: Orang kuat Lokal, Pemilu Legislatif, Pemenangan

I. PENDAHULUAN

Pasca reformasi, demokrasi di Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat. Indikator utama dalam demokrasi adalah suksesi pemerintahan baik eksekutif maupun legislatif melalui Pemilu yang bebas dan jujur. Demokrasi dianggap sebagai sistem yang terbaik dari semua sistem pemerintahan yang dianggap buruk. Namun, dalam praktiknya demokrasi tidak serta merta membawa perubahan bagi kesejahteraan rakyat. Dalam hal ini sistem demokrasi dianggap baik karena dalam pelaksanaan memberikan ruang bagi rakyat untuk berpartisipasi dalam menentukan pemerintahan melalui pemilu secara periodik atau secara berkala (Mar'iyah, 2012).

Melalui pemilu, rakyat tidak hanya memilih orang yang akan menjadi wakilnya dalam menyelenggarakan negara, tetapi juga program yang dikehendaki sebagai kebijakan negara pada pemerintahan selanjutnya (Gaffar, 2013). Pemilu sendiri telah diatur dalam undang-undang No. 7 tahun 2017 pasal 1 bahwa dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan pemilihan umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil dalam Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Begitu penting tradisi pemilu di Indonesia sehingga orang pun menyamakannya dengan sebutan pesta demokrasi, sebuah pesta yang dirayakan setiap lima tahunan. Padahal bukannya pesta demokrasi yang dimaksud, melainkan sebagai salah satu bentuk pesta yang riuh untuk memperebutkan suara pemilih, karena kebanyakan yang terjadi dalam pemilu para kandidat atau calon wakil rakyat hanya memperebutkan dan merayu pemilih untuk memilihnya. Oleh karena itu, pemilu seringkali dimaknai sebagai upaya untuk merebut hati rakyat sehingga berbagai upaya apapun digunakan untuk mendapat dukungan suara sebanyak-banyaknya.

Hal ini tidak terlepas dari kehadiran orang kuat lokal dalam pemilu baik pemilukada maupun pemilu legislatif pasca lahirnya undang-undang No. 32 tahun 2004 yang mana hampir marak terjadi di beberapa daerah yang ada di Indonesia. Fenomena ini menunjukkan bahwa dalam pemilu baik itu pemilukada maupun pemilu legislatif secara langsung telah membuka kran baru bagi seluruh lapisan masyarakat di tingkat lokal untuk ikut berkompetisi. Ironisnya ketika pemilu langsung yang bebas diikuti oleh seluruh lapisan masyarakat hanya dilihat sebagai bentuk dari pemenuhan dan tuntutan regulasi, dimana prosedur-prosedur demokrasi menjadi lebih penting dibandingkan dengan substansi itu sendiri (Siregar, 2015), maka dapat sangat terbuka kemungkinan pemilu yang diwarnai oleh kompetisi antar calon hanya dijadikan alat tawar menawar atas kepentingan semata. Hal tersebut dilakukan untuk meraih dukungan secara instan melalui pemanfaatan kekuasaan yang dimiliki oleh orang kuat lokal.

Orang kuat lokal atau Local strongman secara konsep didefinisikan sebagai kekuatan informal, baik yang berupa tuan tanah, tengkulak, pengusaha atau bos, kepala suku, petani kaya, pemimpin klan atau tokoh agama dan sebagainya yang berusaha memonopoli kontrol atas masyarakat dalam cakupan wilayah tertentu lewat kerjasama jejaring yang mereka bangun (Hutabarat, 2012). Local strongman atau yang biasa dikenal dengan sebutan orang kuat lokal merupakan tokoh yang identik dengan kelebihan-kelebihan yang mereka miliki serta memiliki keahlian dibidangnya (Kaldun, 2017).

Lebih jauh, Joel Migdal menjelaskan bahwa kemunculan orang kuat lokal (local strongman)

yang berhasil melakukan kontrol sosial memiliki pengaruh sehingga mereka berhasil menempatkan diri atau menaruh anggota keluarga mereka pada sejumlah jabatan penting demi menjamin alokasi sumber daya yang berjalan sesuai dengan aturan mereka sendiri ketimbang menurut aturan-aturan yang dikeluarkan dalam retorika resmi, pernyataan kebijakan, dan peraturan perundang-undangan yang dibuat di kota/kabupaten atau yang berada di tingkat bawah oleh pelaksanaan peraturan yang kuat (John Harris dalam Kaldun, 2017).

Orang kuat lokal baru dicari pada saat pemilu yang dianggap memiliki peran penting dan mereka dinilai bisa mempengaruhi masyarakat serta bisa memenangkan kontestasi dalam pemilu. Orang kuat lokal menggunakan berbagai macam cara dan strategi sesuai dengan kekuatan dan pengaruhnya masing - masing. Tugasnya bertujuan untuk memenangkan calon legislatif yang tentunya ikut berpartisipasi dalam proses pemilu.

Pemilihan umum legislatif yang dilaksanakan di Kabupaten Bangka dibagi menjadi empat daerah pemilihan salah satunya adalah Daerah Pemilihan 4. Daerah pemilihan 4 yang ada di Kabupaten Bangka meliputi Kecamatan Riau Silip dan Kecamatan Belinyu. Pemenangan calon legislatif ini terjadi khususnya di Daerah Pemilihan 4 yang melibatkan orang kuat lokal, salah satu diantaranya orang kuat lokal yang memiliki pengaruh dilibatkan dalam kontestasi pemilu adalah pengusaha atau bos lokal, tokoh agama bahkan tokoh masyarakat sekalipun. Bos lokal atau pun pengusaha yang juga terlibat mereka adalah orang-orang yang bergelut dalam dunia bisnis selain itu juga cukup dikenal di masyarakat, sedangkan tokoh agama yang terlibat merupakan kebanyakan pengurus dari sebuah masjid. Dengan demikian tidaklah sulit bagi orang kuat lokal di Daerah Pemilihan 4 untuk mencari suara agar dapat memilih calon yang mereka bantu.

Pemilu legislatif yang dilaksanakan di Kabupaten Bangka terutama di Daerah Pemilihan 4 pada dasarnya hampir sama seperti pemilu pada umumnya. Setiap calon yang ikut dalam kompetisi pemilu melakukan kampanye dan sebagainya. Untuk menarik simpati dan suara dalam pemilu, cara yang dilakukan sangat beragam ada yang mencoba

melakukan politik uang terutama membagikan sembako dalam bentuk kupon dan bahkan menggunakan jasa orang kuat lokal untuk memenangkan pemilu. Dalam hal ini, pemilu legislatif di Daerah Pemilihan 4 menunjukkan bahwa ada beberapa orang kuat lokal dilibatkan dalam proses pemenangan pemilu. Posisi mereka yang memiliki kekuasaan dan pengaruh bisa meyakinkan masyarakat. Disinilah peluang para calon legislatif untuk menggunakan orang kuat lokal yang dianggap bisa mempengaruhi kemenangan dalam pemilu tersebut, sehingga calon legislatif yang didukung oleh orang kuat lokal bisa menang pada pemilu tahun 2019.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Metode ini dianggap cukup relevan untuk mengkaji fenomena yang terkait dengan peran orang kuat lokal pada pemilu legislatif tahun 2019 di daerah pemilihan 4 kabupaten Bangka. Sumber data dalam penelitian ini meliputi sumber data primer dan data sekunder. Teknik penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling.

Dari data yang dihasilkan di lapangan nantinya peneliti akan menganalisis dengan menggunakan teknik reduksi data, display data dan penarikan kesimpulan, sehingga data dari hasil penelitian yang diperoleh dapat menjawab permasalahan yang ada.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Peran Orang Kuat Lokal dalam Pemilu Legislatif Tahun 2019

Terdapat 2 unsur orang kuat lokal yang diikutsertakan dalam proses pemilu tahun 2019 di Daerah pemilihan 4 Kabupaten Bangka yakni tokoh agama dan pengusaha. Keterlibatan orang kuat lokal dalam pemilu memang tidak bisa dihindari bahkan terkadang mereka ikut berpartisipasi dalam proses pemilihan umum secara langsung maupun tidak langsung, sehingga calon legislatif yang menggunakan orang kuat lokal bisa menang dalam pemilu seperti halnya yang terjadi dalam pemilu legislatif tahun 2019 di Daerah pemilihan 4.

Tentunya dalam perkembangan politik sekarang yang semakin demokratis, telah

membuka ruang bagi segenap lapisan masyarakat untuk dapat berperan dalam perpolitikan begitu juga bagi para orang kuat lokal yakni pengusaha dan tokoh agama yang memiliki peran yang sangat besar. Dalam masyarakat akan ada orang-orang yang memiliki pengaruh dan memiliki hubungan dengan politik yang tidak bisa dihindarkan walaupun sebenarnya mereka tidak secara langsung masuk keranah politik. Adapun peran pengusaha dan tokoh agama sebagai orang kuat lokal dalam kemenangan calon legislatif tahun 2019 dapat dilihat dari beberapa cara, yaitu:

1. Melakukan segmentasi

Segmentasi sendiri merupakan proses pengelompokan sesuatu yang besar menjadi bagian yang lebih kecil berdasarkan karakteristik tertentu seperti pengelompokan geografis, demografis dan psikografis (Firmanzah, 2016). Segmentasi perlu dilakukan dalam rangka untuk melakukan identifikasi dan klasifikasi karakteristik beberapa kelompok atau karakteristik masyarakat agar penerapan dan taktik dapat berjalan dengan efektif dan efisien sehingga kampanye yang dilakukan tidak salah sasaran. Dalam penjelasan tersebut segmentasi yang dilakukan lebih kepada segmentasi geografis yang lebih menekankan kepada pemilihan wilayah yang dilakukan oleh orang kuat lokal untuk dapat menentukan wilayah mana yang menjadi penyumbang suara terbanyak dalam pemilu yang dilaksanakan pada tahun 2019.

2. Menentukan target

Target digunakan sebagai acuan untuk melihat jumlah dan besaran pemilih, wilayah mana yang penduduknya banyak karena bisa jadi mereka menjadi penyumbang suara terbanyak dan juga siapa saja yang akan menjadi sasaran dari target yang ditentukan. Dalam menentukan target terhadap pemilih memang membutuhkan orang yang ahli dibidangnya seperti bantuan dari orang kuat lokal. Oleh karena itu, pemanfaatan orang kuat lokal sangat dibutuhkan dalam pemilu karena mereka memiliki pengaruh dalam masyarakat untuk penentuan pilihan politik serta mereka paham akan kondisi sosial masyarakat sekitar serta bisa memberikan ruang kepada calon legislatif untuk dapat melakukan kampanye dan memberikan ruang untuk dapat bertemu dan berkumpul dengan masyarakat. Untuk itu

yang menjadi target dalam pemilu ini adalah orang tua, anak muda, wanita dan juga kalangan pemilih pemula, orang-orang majelis yang telah dipetakan oleh orang kuat lokal.

3. Melakukan mobilisasi massa

Mobilisasi massa atau pengerahan massa dalam momentum pesta demokrasi bukanlah hal yang asing. Mobilisasi massa seringkali dijadikan gerakan dasar untuk mendulang dukungan suara. Akan tetapi tidak semua orang bisa memobilisasi massa dengan mudah dan tidak semua orang bisa diikuti pandangan politiknya.

Mobilisasi massa dapat dinilai sangat efektif setidaknya mengurangi tekanan pengeluaran kampanye yang begitu besar dan banyak. Kebutuhan akan dukungan massa yang luas menjadi tujuan utama dalam setiap proses pemilihan. Ongkos pemilu yang sangat besar menuntut setiap calon mengambil jalan pintas seperti menjalin kerjasama yang saling menguntungkan dengan semua pihak agar mampu memobilisasi dukungan. Untuk dapat melakukan mobilisasi dengan mudah secara tidak langsung tokoh agama melakukannya di rumah-rumah ibadah, tempat kegiatan keagamaan dan bahkan pada saat kampanye itu dilakukan, sedangkan pengusaha melakukan mobilisasi lebih kepada pertemuan secara masal di rumah-rumah warga ataupun ditempat kediaman calon legislatif tersebut.

B. Bentuk Hubungan Timbal Balik Atas Eksistensi Orang Kuat Lokal

Keberadaan orang kuat lokal paling dicari ketika momen pemilu, baik itu pemilihan kepala daerah ataupun pemilihan calon legislatif menggunakan sebagian besar jasa ataupun memanfaatkan orang kuat lokal yang dianggap bisa mempengaruhi dalam kemenangan pemilu tersebut. Orang kuat lokal baru dicari pada saat pemilu yang dianggap memiliki peran penting dan mereka dinilai bisa mempengaruhi masyarakat serta bisa memenangkan kontestasi dalam pemilu. Orang kuat lokal menggunakan berbagai macam cara dan strategi sesuai dengan kekuatan dan pengaruhnya masing-masing.

Disamping itu, keterlibatan orang kuat lokal dalam pemilu legislatif tahun 2019 di Daerah Pemilihan 4 selain sebagai orang yang mampu memenuhi kebutuhan akan

permintaan dari calon legislatif tetapi ada juga keinginan yang dicapai. Dukungan yang diberikan tidak semata-mata karena permintaan saja, akan tetapi ada hal yang diterima lebih oleh orang kuat lokal karena telah membantu calon legislatif sampai bisa menang. Alasan mereka mendukung karena memiliki hubungan timbal balik yang akan mereka dapatkan sesuai dengan perjanjian di awal pertemuan. Adapun bentuk hubungan timbal balik yang diperoleh diantaranya:

1. Menjalin kerjasama dari segi sosial

Kerjasama dapat terjalin apabila kedua belah pihak dapat melakukan pekerjaan atau usaha secara bersama untuk mencapai tujuan. Kerjasama dalam bentuk bantuan timbal balik yang dilakukan antara orang kuat lokal dengan calon legislatif seperti adanya pembicaraan terkait perjanjian diawal saat ingin memperoleh bantuan dari orang kuat lokal dengan begitu bantuan yang diberikan tidak sia-sia. Dengan adanya perjanjian tersebut, kerjasama pun dapat terjalin dengan baik, untuk itu kerjasama yang terjalin tersebut adalah saat masyarakat ada yang meminta bantuan kepada calon legislatif melalui perantara orang kuat loka calon tersebut harus bisa memberikannya terutama dalam hal bantuan kesehatan.

2. Menjalin kerjasama dari segi ekonomi

Tidak hanya sampai pada jalinan kerjasama saja, akan tetapi masih ada bantuan yang harus diberi dan diterima yakni seperti halnya orang kuat lokal yang telah memberikan bantuan dalam hal jasa kepada calon legislatif untuk dapat memenangkan pemilu, adapun balasan yang didapat oleh orang kuat lokal dalam hal bantuan ekonomi. Dalam hal ini bantuan ekonomi yang diperoleh tokoh agama yakni mendapat bantuan berupa pembangunan pesantren dan sumur gratis serta keperluan yang dibutuhkan majelis, sedangkan bantuan yang diterima oleh pengusaha yakni dapat meletakkan anggota keluarga pada jabatan tertentu dan tempat pekerjaan yang lebih layak. Untuk itu, baik itu orang kuat lokal maupun calon legislatif sama-sama mendapatkan keuntungan.

C. Pola berjejaring dan kontrol sosial dalam Konsep *Local Strongman* oleh Migdal

Menurut Hutabarat (2012) bahwa untuk konteks Indonesia relasi kekuasaan pada aras lokal memiliki banyak kekhususan yang tidak cukup dipahami dengan pendekatan formal, karenanya juga melibatkan banyak jaringan informal termasuk didalamnya relasi antara penguasa dan pengusaha, itu sebabnya sejumlah kasus di daerah mencuat pasca pemilu yang selalu dihubungkan dengan kepentingan orang kuat lokal atau local strongman.

Ada 2 konsep yang menjelaskan orang kuat lokal menurut Migdal. Pertama, pola berjejaring. Migdal memperdebatkan orang kuat lokal tumbuh subur di dalam masyarakat mirip jaringan yang digambarkan sebagai sekumpulan campuran organisasi-organisasi sosial nyaris mandiri dengan kontrol sosial yang efektif terpecah-pecah. Dilihat dari sifat kelompok masyarakat yang berjejaring maka berbagai cara dilakukan oleh orang kuat lokal untuk dapat berhasil dalam memenangkan calon legislatif salah satunya yakni memanfaatkan jaringan yang mereka punya untuk menarik pendukung. Dalam hal ini, untuk dapat menduduki suatu jabatan memerlukan kendaraan politik dan dukungan untuk memenangkan pemilu. Dukungan dari orang kuat juga dapat diperoleh melalui jaringan yang mereka miliki terutama pada jaringan informal yang secara tidak sengaja terbentuk di masyarakat. Kedua, melakukan kontrol sosial. Orang kuat lokal melakukan kontrol sosial dengan memanfaatkan komponen yang diyakini masyarakat sebagai strategi. Dengan ini orang kuat tidak hanya menikmati legitimasi dan dukungan di kalangan penduduk lokal tetapi juga pada dasarnya untuk memenuhi kebutuhan pokok dan tuntutan para pemilih atas jasa yang diberikan.

Untuk itu dari penjelasan di atas bahwa orang kuat lokal tumbuh di masyarakat seperti pengusaha mampu membentuk jaringan melalui hubungan kekerabatan dan bisnis. Sementara itu, tokoh agama mampu membangun jaringan kekeluargaan yang secara tidak langsung menghubungkan mereka melalui pengurus masjid dan majelis, serta mempermudah mereka memberi pengaruh dalam cara berpikir, pandangan politik,

tindakan dan pilihan politik, sedangkan kontrol sosial yang dilakukan oleh mereka sebagai orang kuat lokal adalah melakukan intervensi. Intervensi yang dilakukan dapat dilihat dari cara yang mereka lakukan seperti mampu mengumpulkan massa dalam jumlah banyak serta mengadakan pertemuan dengan masyarakat untuk meyakinkan mereka karena pada dasarnya yang mencalonkan diri dalam pemilu legislatif banyak sehingga keterlibatan orang kuat lokal tidak bisa dihindarkan.

D. Strategi Orang Kuat Lokal pada Pemenangan Calon Legislatif Tahun 2019

Pada pemilu tahun 2019 berbeda dengan pemilu sebelumnya, karena pemilu tahun 2019 terutama pemilu legislatif dilaksanakan secara serentak bersamaan dengan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dan tentunya Pemilihan Legislatif tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota serta memilih DPD secara bersamaan, sedangkan pemilu sebelumnya dilaksanakan secara terpisah antara pemilu legislatif dengan pemilihan Presiden dan wakil Presiden, sehingga memang pada pemilu 2019 memerlukan strategi lebih untuk dapat memenangkan pemilu. Dengan demikian dari banyaknya yang mencalonkan diri untuk berpartisipasi dalam pemilu terutama pemilu legislatif tentu memerlukan berbagai macam cara yang dapat dilakukan calon legislatif untuk dapat memenangkan pemilu tersebut.

Dalam hal ini, menjadi calon anggota dewan legislatif tidaklah mudah, banyak tahapan dan rangkaian kegiatan yang harus dilakukan. Mulai dari pendaftaran, penetapan nomor calon, kampanye, pemungutan suara hingga proses perhitungan suara harus dilakukan. Dari banyak tahapan yang harus dilakukan tersebut, calon legislatif harus pintar-pintar mencari peluang untuk dapat mempromosikan dirinya agar bisa menarik simpati dan perhatian dari masyarakat. Hal ini tidak dapat hanya dilakukan oleh satu pihak saja terutama tim pendukung dan partai politik, akan tetapi ada keterlibatan dari pihak lain yang bisa diandalkan terutama orang yang berpengaruh dimasyarakat seperti orang kuat lokal.

Untuk itu, salah satu cara untuk dapat memenangkan pemilu tersebut tentunya memerlukan bantuan lebih dari orang yang

bisa dipercaya dimasyarakat untuk dapat menarik suara dengan banyak seperti meminta bantuan orang kuat lokal. Pada dasarnya setiap calon yang ada di Daerah Pemilihan 4 mempunyai pandangan yang berbeda tentang apa yang perlu dilakukan untuk dapat memenangkan pemilu 2019. Setiap kandidat mempunyai strategi dan cara yang berbeda-beda sehingga apapun bisa mereka lakukan untuk bisa menang dalam pemilu. Namun mencari orang yang berpengaruh di masyarakat seperti orang kuat lokal tidak bisa dihindari.

Dari delapan calon yang menang di Daerah Pemilihan 4, empat diantaranya merupakan wajah lama dan empat lainnya merupakan wajah baru. Dari ke delapan calon yang memenangkan pemilu tahun 2019, empat juga diantaranya yang menggunakan orang kuat lokal, sehingga cara yang dilakukan oleh orang kuat lokal untuk dapat memenangkan calon beragam. Seperti yang dikatakan oleh salah satu tokoh masyarakat yang ada di Daerah Pemilihan 4 bahwa untuk dapat menarik perhatian dari masyarakat harus di mulai dari pendekatan dengan masyarakat, melakukan kunjungan ke rumah warga serta melakukan pertemuan dengan masyarakat dan meminta untuk memilih pada hari pencoblosan. Walaupun pada saat pencoblosan belum tentu masyarakat akan memilih.

Adapun strategi yang dilakukan oleh orang kuat lokal diantaranya yakni pertama, lebih sering mengunjungi masyarakat artinya orang kuat lokal terutama pengusaha bersama dengan calon legislatif yang didukung berusaha untuk lebih dekat dengan masyarakat seperti melakukan kunjungan sesering mungkin ketika kampanye sehingga membuat masyarakat lebih kenal dengan calon tersebut. Kedua, melakukan konsep dialogis artinya orang kuat lokal disini lebih kepada tokoh agama yang melakukan pendekatan dengan masyarakat melalui diskusi dan melakukan beberapa kajian-kajian dengan para jamaah karena biasanya para jamaah akan mengikuti arahan yang diberikan oleh tokoh agama karena pilihan yang disampaikan sudah dianggap benar oleh para jamaah. Untuk itu dalam hal ini tidak lah sulit bagi orang kuat lokal baik itu tokoh agama maupun pengusaha untuk meyakinkan masyarakat sehingga bisa memenangkan calon yang mereka dukung.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan analisis yang telah diuraikan menunjukkan bahwa peran orang kuat dalam pemilu legislatif tahun 2019 bahwa dalam perjalanan mencari dukungan dan menggugah simpati masyarakat, kaitannya dengan pemilu legislatif tentu melibatkan berbagai orang-orang tertentu seperti orang kuat lokal ataupun orang yang berpengaruh di suatu lingkungan yang dikondisikan baik secara terstruktur ataupun tidak.

Dalam Pemilu Legislatif di Daerah Pemilihan 4 yang menarik adalah terkait dengan dinamika aktor atau orang kuat lokal yang terlibat dalam dukungan terhadap calon legislator. Ada beberapa elemen yang mempengaruhi hangat dan riuhnya pertarungan politik pada pemilu legislatif tahun 2019 di Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Bangka. Sebagai upaya untuk mencari dukungan masyarakat dalam pemilu, melibatkan dua orang kuat lokal, yakni pengusaha dan tokoh agama. Untuk itu, keterlibatan mereka tersebut atas dasar permintaan oleh calon legislatif itu sendiri. Orang kuat lokal seperti mereka sengaja di pakai karena memiliki pengaruh yang besar. Adapun peran yang dilakukan oleh tokoh agama dan pengusaha sebagai orang kuat lokal dalam memenangkan calon yang mereka dukung yakni:

Pertama, melakukan segmentasi terhadap pemilih. Hal yang dilakukan orang kuat lokal seperti tokoh agama dan pengusaha adalah melihat dari mana penyumbang suara terbanyak sehingga segmentasi dalam kampanye yang dilakukan tepat sasaran. **Kedua**, mampu menentukan target yang dibutuhkan oleh calon legislatif tersebut. **Ketiga**, memobilisasi massa yang dilakukan hampir sama yakni melakukan perkumpulan serta menarik massa dari keluarga, teman, kerabat serta tetangga. Tempat untuk melakukan mobilisasi oleh pengusaha yakni melakukan acara di rumah dan kunjungan kerumah-rumah, sedangkan tokoh agama lebih banyak melakukan kegiatan di tempat-tempat ibadah dan dimajelis-majelis yang sering dikunjungi.

Disamping itu, ada juga bentuk hubungan yang diterima oleh orang kuat lokal ketika mendukung calon legislatif tersebut diantaranya adalah menjalin kerjasama dari

segi sosial dan kerjasama dari segi bantuan ekonomi yang dapat berupa membantu tokoh agama dalam hal pembangunan pesantren, pembuatan sumur dan juga untuk pengusaha mereka meminta untuk mengisi anggota keluarga pada jabatan tertentu untuk mendapat pekerjaan yang tetap.

Penelitian ini menggunakan teori dan konsep local strongman oleh Jeol S, Migdal. Dalam pemilu tahun 2019 menunjukkan bahwa keterlibatan orang kuat lokal tidak terlepas dari kontrol sosial oleh orang-orang yang mempunyai kelebihan dan pengaruh di masyarakat. Adapun tiga yang menjadi poin penting dalam konsep Local Strongman diataranta: pertama, Local Strongman tumbuh subur dimasyarakat mirip jaringan. Kedua, Local Strongman berhasil melakukan kontrol sosial, adapun bentuk kontrol sosial yang dilakukan dapat berupa intervensi. Ketiga, Local Strongman mampu menggunakan state agency dan sumber daya, kapasitas menembus, mengintervensi dan menangkap lembaga negara sehingga menjadi lemah. Namun hasil penelitian menunjukkan bahwa dari ketiga poin tersebut hanya dua yang dapat diidentifikasi yakni mereka hidup berjejaring dan berhasil melakukan kontrol sosial dalam bentuk intervensi.

Sementara itu adapun strategi yang dilakukan oleh orang kuat lokal untuk dapat memenangkan calon legislatif yakni pertama, lebih sering mengunjungi masyarakat artinya orang kuat lokal terutama pengusaha bersama dengan calon legislatif yang didukung berusaha untuk lebih dekat dengan masyarakat. Kedua, melakukan konsep dialogis artinya orang kuat lokal disini lebih kepada tokoh agama yang melakukan pendekatan dengan masyarakat melalui diskusi dan melakukan beberapa kajian-kajian dengan para jamaah karena biasanya para jamaah akan mengikuti arahan yang diberikan oleh tokoh agama.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih ini disampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam terselesainya penelitian ini, terutama kepada kedua orangtua saya yang terus mendukung saya baik dalam hal moril maupun materil, juga para pembimbing yang telah banyak memberikan masukan dan arahan

terhadap penelitian ini serta tidak lupa juga terima kasih kepada para narasumber yang telah banyak meluangkan waktu dan memberikan informasi terkait penelitian yang dilakukan.

V. DAFTAR PUSTAKA

- Firmanzah, (2016). *Marketing Politik Antara Pemahaman dan Realitas*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Gaffar, J. M. (2013). *Demokrasi Dan Pemilu Di Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Hutabarat, M. P. (2012). *Fenomena Orang Kuat Lokal Di Indonesia Era Desentralisasi (Studi Kasus Tentang Dinamika Kekuasaan Zulkifli Nurdin Di Jambi)*. Universitas Indonesia.
- Kaldun, I. (2017). *Local Strongman Dan Kontestasi Politik (Studi Terhadap Kemenangan Fenomenal Aras Tammauni Dan Muhammad Amin Jasa Pada Pilkada Kabupaten Mamuju Tengah 2015)*. Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar.
- Mar'iyah, C. (2012). *Menggugat Politik Dinasti Dalam Pemerintahan Indonesia: Demokrasi Untuk Apa Dan Untuk Siapa?*. Jurnal Ilmu Pemerintahan Universitas Indonesia.
- Migdal, Jeol. (2001). *State In Society: Studyinghow State and Societies Transform and Constitute One Another*. Cambridge University Press.
- Rahman Dan Ibrahim. (2009). *Menyusun Proposal Penelitian*. Pangkalpinang: UBB Press.
- Siregar, H. (2015). *Local Bosses Sebagai Mesin Pendulang Suara (Studi DPC Partai Derakan Indonesia Raya Sleman Dalam Pemilihan Legislatif 2014)*. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- undang-undang No. 7 tahun 2017 pasal 1 tentang Pemilihan Umum
- undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah



Korespondensi

Email : Lily3latul@yahoo.com



Inovbook Publications

Wisma Monex 9th Floor

Jl. Asia Afrika No 133-137 Bandung,
40112



Karya ini dilisensikan di bawah
Lisensi Internasional Creative
Commons Atribusi Nonkomersial
sharelike 4.0.

INOVASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DALAM PENCAPAIAN URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

Lily Latul

Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri | Jl Medan
Merdeka Timur No. 8 Gambir Jakarta Pusat 10110

Disetujui: 25 Juli 2021

Abstract

Basic services are public services to meet the basic needs of citizens. In the context of services, especially basic services, Minimum Service Standards (SPM) contain measures or parameters that must be guided by local governments, services provided to the community must be measured in terms of quantity, type and quality. SPM in the administration of regional government affairs is positioned to answer important matters in the administration of regional government, especially in the provision of basic services that lead to the creation of people's welfare. The Government Internal Supervisory Apparatus (APIP) at the central and regional levels has the authority to carry out the supervision of regional government administration, thus the role of the Central APIP and the Regional APIP is required to play a role in the successful implementation of SPM. This study aims to find out what kind of guidance and supervision should be carried out by APIP so that the goal to be achieved, namely that every citizen gets basic services can be achieved.

Keywords : Basic Services, Minimum Service Standards, Local Government

Abstrak

Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar Warga Negara. Dalam konteks pelayanan, khususnya pelayanan dasar, Standar Pelayanan Minimal (SPM) memuat ukuran-ukuran atau parameter-parameter yang harus dipedomani oleh pemerintah daerah, pelayanan yang diberikan kepada masyarakat harus terukur baik dari sisi jumlah, jenis maupun mutu. SPM dalam penyelenggara urusan pemerintahan daerah diposisikan untuk menjawab hal-hal penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam penyediaan pelayanan dasar yang bermuara pada penciptaan kesejahteraan rakyat. Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) di tingkat pusat dan daerah memiliki kewenangan untuk melakukan pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, dengan demikian maka peran APIP Pusat maupun APIP Daerah dituntut berperan dalam hal keberhasilan penerapan SPM. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pembinaan dan pengawasan seperti apa yang harus dilakukan APIP sehingga tujuan yang ingin dicapai yaitu setiap warga negara mendapatkan pelayanan dasar dapat tercapai.

Keywords : Pelayanan Dasar, Standar Pelayanan Minimal, Pemerintah Daerah

I. PENDAHULUAN

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, diamanatkan adanya urusan pemerintahan yang didefinisikan sebagai kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian Negara dan dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat. Anatomi urusan pemerintahan terdiri atas urusan yang bersifat absolut atau urusan pemerintahan yang bersifat mutlak, tidak didesentralisasikan ke daerah, urusan pemerintahan konkuren atau urusan pemerintahan yang dikerjakan secara bersama antara pusat dan daerah, serta urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan konkuren terdiri atas urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar (terdapat 6 urusan) dan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar (terdapat 18 urusan) serta urusan pemerintahan pilihan (terdapat 8 urusan). Urusan pemerintahan konkuren ini telah didesentralisasikan ke daerah sebagai wujud dari pelaksanaan otonomi daerah yang memberikan kewenangan bagi daerah melaksanakan urusan pemerintahan sebagaimana di atur dalam Lampiran Undang-Undang Nomo 23 Tahun 2014.

Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat atau kesejahteraan rakyat dengan melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Dengan demikian daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman dalam sistem NKRI salah satunya diwujudkan melalui penetapan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal. Dalam konteks pelayanan, khususnya pelayanan dasar, Standar Pelayanan Minimal (SPM) memuat ukuran-ukuran atau parameter-parameter yang harus dipedomani oleh pemerintah daerah, pelayanan yang diberikan kepada masyarakat harus terukur baik dari sisi jumlah, jenis maupun mutu. SPM merupakan kebijakan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga Negara secara minimal. Berdasarkan definisi

tersebut, maka hanya urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar saja yang menerapkan konsep SPM, yaitu urusan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dan sosial.

Standar Pelayanan Minimal, dalam konteks penyelenggara pelayanan dasar merupakan bagian dari pelaksanaan urusan wajib daerah. SPM diposisikan untuk menjawab hal-hal penting dalam penyelenggaraan pemerintaan daerah, khususnya dalam penyediaan pelayanan dasar yang bermuara pada penciptaan kesejahteraan rakyat. Kesejahteraan rakyat merupakan tujuan bernegara yang dijamin oleh konstitusi. Dengan demikian maka dalam penerapannya, SPM harus menjamin akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dasar dari Pemerintah Daerah sesuai dengan ukuran-ukuran yang ditetapkan pemerintah. Dalam PP nomor 2 Tahun 2018, SPM didefinisikan sebagai ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setian Warga Negara secara minimal. Dari definisi tersebut, terdapat 3 (tiga) unsur utama SPM, yaitu jenis pelayanan, mutu pelayanan, dan pelayanan dasar. Menurut PP Nomor 2 Tahun 2018, Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar Warga Negara, di mana penyelenggaraan pelayanan dasar merupakan bagian dari pelaksanaan urusan wajib Pemerintah Daerah, SPM dalam penyelenggara urusan pemerintahan daerah diposisikan untuk menjawab hal-hal penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam penyediaan pelayanan dasar yang bermuara pada penciptaan kesejahteraan rakyat. Kesejahteraan rakyat merupakan tujuan bernegara sebagaimana tertuang dalam pembukaan UUD 1945 yaitu "Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, , dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial".

Dengan demikian, dalam penerapannya SPM harus menjamin akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dasar dari

pemerintah daerah sesuai dengan ukuran-ukuran yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah. Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan pemerintah dalam pelaksanaannya/penerapannya merupakan kewajiban daerah, hal ini disebabkan karena 1) urusan pemerintahan telah dibagi pelaksanaannya sebagaimana diatur dalam lampiran UU tentang Pemerintahan Daerah yaitu Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, artinya ada kewenangan yang didelegasikan kepada daerah dan daerah berkewajiban melaksanakannya. Pendelegasian ini menunjukkan adanya penerapan konsep desentralisasi yang salah satu implikasi adalah daerah berkewajiban melaksanakan urusan sesuai dengan kewenangan serta membiayai urusan tersebut melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah serta berkewajiban untuk membuat kebijakan daerah dengan mengacu pada Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang dibuat oleh Pemerintah (K/L teknis) Penyerahan kewenangan merupakan dasar dari pelaksanaan otonomi daerah. Dengan demikian, SPM menjadi tanggungjawab daerah karena SPM disusun berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh setiap susunan atau tingkatan pemerintahan melalui pembagian urusan pemerintahan. 2) esensi dibentuknya suatu pemerintahan daerah adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat dan mensejahterakan masyarakat. Hakikat ini menjadi pendorong bagi penyelenggara pemerintahan daerah dalam mengupayakan peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan yang dimiliki suatu daerah dalam koridor Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian, SPM menjadi tanggung jawab daerah dalam penerapannya karena ada parameter-parameter yang menjadi syarat bagi pemda untuk pencapaiannya, parameter atau ukuran ini pada akhirnya akan berimplikasi pada esensi dari dibentuknya atau keberadaan suatu pemerintahan daerah.

Sama halnya dengan konsep SPM terdahulu (diatur dalam PP Nomor 65 Tahun 2007 dengan mandatory UU Nomor 32 Tahun 2004), konsep SPM saat ini juga mengatur

secara detail terkait mutu, jenis pelayanan serta target pencapaian untuk setiap urusan pemerintahan yang di SPM-kan. Standar-standar ini dibakukan dalam bentuk Peraturan Menteri (teknis) sebagai acuan bagi pemerintah daerah dalam penerapannya. Peraturan teknis dimaksud yaitu 1). Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota. 2) Permendagri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota, 3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota. 4) Permendagri Nomor 121 tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Di Provinsi Dan Kabupaten/Kota. 5) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan. 6) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan. 6) Peraturan Menteri PUPR Nomor 29 /PRT/M/Tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Keseluruhan regulasi ini memuat tentang standar jumlah dan kualitas barang/jasa serta petunjuk teknis atau tatacara pemenuhan standar.

Dari hasil evaluasi keberhasilan penerapan SPM sebelumnya (PP. Nomor 65/2007) menunjukkan bahwa ada beberapa factor yang menjadi kendala dalam penerapannya, yaitu 1) tidak berjalannya mekanisme pelaporan SPM, 2) tidak berjalannya binwas, 3) kurang optimalnya monitoring dan evaluasi, 4) pendanaan yang terbatas dari Pemda, 5) banyaknya indikator yang harus diterapkan dihadapkan dengan APBD yang terbatas.

Kondisi – kondisi seperti ini kemungkinan akan terulang pada implementasi SPM saat ini. Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa keberhasilan penerapannya bukan hanya tergantung dengan tersedianya regulasi dan kebijakan namun peran pembinaan dan

pengawasan juga menjadi penting. Pembinaan dan pengawasan baik secara teknis maupun pembinaan umum sehingga Aparat Pembinaan Instansi Pemerintah (APIP) di setiap kementerian teknis

Dalam PP Nomor 2 Tahun 2018 tentang SPM pada Bab IV tentang Pembinaan dan Pengawasan disebutkan bahwa Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri melaksanakan pembinaan dan pengawasan penerapan SPM daerah Provinsi secara umum, dan pembinaan secara teknis dilakukan oleh menteri sesuai dengan jenis SPM yang diemban. Hal ini dipertegas dalam PP. Nomor 12 Tahun 2017 yang memberikan kewenangan kepada Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) di tingkat pusat dan daerah melakukan pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, dengan demikian maka peran APIP Pusat maupun APIP Daerah dituntut berperan dalam hal keberhasilan penerapan SPM.

Berangkat dari hal-hal tersebut, timbul pertanyaan "Pembinaan dan Pengawasan seperti apa yang harus dilakukan APIP" pertanyaan ini diharapkan akan menjadi trigger bagi APIP dalam melakukan pembinaan dan pengawasan dalam koridor penerapan SPM sehingga tujuan yang ingin dicapai yaitu setiap warga negara mendapatkan pelayanan dasar. Pembinaan dan pengawasan mulai dari perencanaan, penerapan/pelaksanaan dan monitoring dan evaluasi serta pelaporan.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif adalah suatu metode penelitian yang mengumpulkan dan menganalisis data berupa kata-kata dan perbuatan-perbuatan manusia tanpa ada usaha untuk mengkuantifikasikan data kualitatif yang diperoleh. Data yang digunakan dalam penelitian ini seperti jurnal yang berkaitan dengan penelitian guna memperoleh konsep-konsep yang relevan dengan kajian inovasi dalam bidang pembinaan dan pengawasan pelayanan dasar. Pengumpulan data juga dilakukan melalui penelusuran berbagai sumber yang kemudian diolah dan dideskripsikan dalam bentuk narasi sesuai dengan kebutuhan data.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Dukungan Regulasi

Setidaknya terdapat 3 (tiga) fungsi SPM yaitu SPM merupakan salah satu cara untuk mendorong pemerintah daerah memberikan pelayanan publik yang tepat bagi masyarakat, menjadi alat control terhadap kinerja pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan, dan juga dengan SPM pemerintah daerah dapat menghitung berapa anggaran yang dibutuhkan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Untuk SPM yang disusun pemerintah (pusat) pemberlakukannya atau penerapannya di daerah membutuhkan aturan teknis secara mikro.

Aturan teknis dalam bentuk peraturan menteri mengatur secara detail mutu, jenis serta target yang ditentukan oleh setiap SPM. Dimana rumusan jenis pelayanan dasar setiap SPM sesuai dengan kewenangan yang dimiliki sebagaimana diatur dalam lampiran UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

1. SPM Sosial

Petunjuk teknis SPM Sosial diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota. Standar teknis ini merupakan pelaksanaan ketentuan Pasal 10 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018. Standar teknis ini, diatur tentang mutu, jenis pelayanan serta target capaian yang dijabarkan sebagai berikut:

1.1. SPM Sosial di Provinsi

Jenis pelayanan dasar pada SPM Sosial di daerah provinsi ditekankan pada rehabilitasi social social dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis yang kesemuanya berada di dalam panti social, serta perlindungan dan jaminan social pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah provinsi. Jenis pelayanan dasar yang ditetapkan dalam SPM Sosial ini sesuai dengan kewenangan bidang urusan Sosial yang dimiliki provinsi sebagaimana diatur dalam UU tentang Pemerintahan daerah, dengan demikian maka penerapan SPM Sosial di Provinsi harus dibiayai dari APBD. Mutu pelayanan dasar yang

ditetapkan dalam standar teknis dirumuskan dengan memperhatikan 3 (tiga) aspek yakni standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa, standar jumlah dan kualitas sumber daya manusia kesejahteraan social dan petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.

Tabel 1. Kewenangan Provinsi untuk urusan pemerintahan Sosial

Sub Urusan	Daerah Provinsi	Pelayanan yang Diberikan
Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial bukan/tidak termasuk bekas korban penyalahgunaan NAPZAH, orang dengan <i>Human Immunodeficiency Virus / Acquired Immuno Deficiency Syndrome</i> yang memerlukan rehabilitasi pada panti	<ul style="list-style-type: none"> • Di luar korban NAPZAH menjadi kewenangan Provinsi, karena korban NAPZAH merupakan kewenangan Pemerintah Pusat. • Pembiayaan kewenangan bersumber dari APBD Provinsi
Perlindungan dan Jamsos	Penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana provinsi	<ul style="list-style-type: none"> • Pembiayaan kewenangan bersumber dari APBD Provinsi

Sumber: Lampiran UU.No. 23 Tahun 2014

1.2. SPM Sosial di Kabupaten/Kota

Berbeda dengan Provinsi, jenis pelayanan dasar SPM Kabupaten/kota penerima layanan adalah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, tuna social khususnya gelandangan dan pengemis yang berada di luar panti social, serta perlindungan dan jaminan social pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota. Jenis pelayanan dasar untuk SPM Sosial Kabupaten/Kota disusun mengacu pada kewenangan bidang urusan social yang dimiliki kabupaten dan kota sebagaimana diatur dalam UU Nomo 23 Tahun 2014. Dengan demikian maka pembiayaan penerapan SPM dibiayai dari APBD Kabupaten/Kota. Mutu pelayanan dasar yang ditetapkan dalam standar teknis dirumuskan dengan memperhatikan 3 (tiga) aspek yakni standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa, standar jumlah dan kualitas sumber daya manusia kesejahteraan social dan petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.

Tabel 2. Kewenangan Kabupaten dan Kota untuk urusan pemerintahan Sosial

Sub Urusan	Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan yang Diberikan
Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial bukan/tidak termasuk bekas korban penyalahgunaan NAPZAH, orang dengan <i>Human</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Anak terlantar tidak dirawat di dalam panti. • Pembiayaan kewenangan bersumber dari

<i>Immunodeficiency Virus/Acquired Immuno Deficiency Syndrome</i> yang tidak memerlukan rehabilitasi pada panti, dan rehabilitasi anak yang berhadapan dengan hukum.	APBD Kabupaten/Kota
--	---------------------

Sumber: Lampiran UU.No. 23 Tahun 2014

2. SPM Pendidikan

Petunjuk teknis SPM Pendidikan diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 32 tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan. Standar teknis ini merupakan pelaksanaan ketentuan Pasal 5 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018. Standar teknis ini, diatur tentang mutu, jenis pelayanan serta target capaian yang dijabarkan sebagai berikut:

2.1. SPM Pendidikan di Provinsi

Jenis pelayanan dasar pada SPM Pendidikan di daerah provinsi terdiri atas pendidikan menengah dan pendidikan khusus. Penetapan jenis pelayanan dasar ini sesuai dengan kewenangan yang dimiliki Provinsi untuk urusan pemerintahan pendidikan, karena merupakan kewenangan provinsi, maka pembiayaan SPM ini dibiayai dari APBD Provinsi. Mutu pelayanan dasar yang ditetapkan dalam standar teknis SPM Pendidikan di Provinsi dirumuskan dengan memperhatikan 3 (tiga) aspek yakni standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa, standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan, dan petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.

Tabel 3. Kewenangan Provinsi untuk urusan Pendidikan

Sub Urusan	Daerah Provinsi	Pelayanan Yang Diberikan
Manajemen Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan Pendidikan Menengah • Pengelolaan Pendidikan Khusus 	<ul style="list-style-type: none"> • SLTA dan sederajat • Untuk anak berkebutuhan khusus • Pembiayaan kewenangan bersumber dari APBD Provinsi

Sumber: Lampiran UU.No. 23 Tahun 2014

2.2. SPM Pendidikan Kabupaten / Kota

Jenis pelayanan dasar pada SPM Pendidikan di daerah Kabupaten dan Kota terdiri atas pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan kesetaraan. Penetapan jenis pelayanan dasar ini sesuai dengan kewenangan yang dimiliki Kabupaten dan Kota untuk urusan pendidikan, karena merupakan kewenangan kabupaten dan Kota,

maka pembiayaan SPM ini dibiayai dari APBD Kabupaten dan APBD Kota. Mutu pelayanan dasar yang ditetapkan dalam standar teknis SPM Pendidikan di Provinsi dirumuskan dengan memperhatikan 3 (tiga) aspek yakni standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa, standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan, dan petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.

Tabel 4. Kewenangan Kabupaten dan Kota untuk urusan Pendidikan

Sub Urusan	Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Yang Diberikan
Manajemen Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan khusus. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pendidikan dasar • Pendidikan kesetaraan • Dibiayai dari APBD kab/kota

Sumber: Lampiran UU.No. 23 Tahun 2014

3. SPM Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Ini merupakan SPM lingkup Kementerian Dalam Negeri terdiri atas 3 (tiga) SPM yaitu 1) SPM Ketentraman, 2) Ketertiban Umum, dan 3) Perlindungan Masyarakat. Petunjuk teknis SPM Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten dan Kota. Standar teknis ini, mengatur tentang mutu, jenis pelayanan serta target capaian yang dijabarkan sebagai berikut:

3.1. SPM Urusan Ketentraman, dan Ketertiban Umum di Provinsi

Jenis pelayanan dasar pada SPM Urusan Ketentraman, dan Ketertiban umum di provinsi diatur dalam Permendagri nomor 121 Tahun 2018, terdiri atas pelayanan ketentraman dan ketertiban umum provinsi. Jenis pelayanan ini ditetapkan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki provinsi sebagaimana diatur dalam UU. Nomor 23 tahun 2014, dengan demikian maka pembiayaan SPM

ini bersumber dari APBD Provinsi. Mutu pelayanan dasar urusan ketentraman dan ketertiban umum meliputi standar operasional prosedur satpol PP, sarpras Satpol PP, peningkatan kapasitas anggota satpol PP dan linmas, dan standar pelayanan yang terkena dampak gangguan trantibum akibat penegakanhukum terhadap pelanggaran perda dan perkada. Sama halnya dengan penetapan SPM lainnya, SPM ini juga disusun sesuai dengan kewenangan urusan ketentraman, ketertiban umum yang dimiliki provinsi sebagaimana diatur dalam UU nomor 23 Tahun 2014. Karena disusun sesuai dengan kewenangan maka pembiayaan SPM ini dalam penerapannya dibiayai dari APBD Provinsi.

Tabel 5. Kewenangan Provinsi untuk urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum .

Sub Urusan	Daerah Provinsi	Pelayanan yang Diberikan
Ketentraman dan Ketertiban Umum	<ul style="list-style-type: none"> • Penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban Umum lintas Kabupaten/Kota 	<ul style="list-style-type: none"> • Jenis pelayanan yang diterima yaitu pelayanan ketentraman dan ketertiban • Dibiayai APBD Provinsi

Sumber: Lampiran UU.No. 23 Tahun 2014

3.2. SPM Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum di Kabupaten/Kota

Jenis pelayanan dasar pada SPM Urusan Ketentraman, Ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat daerah kabupaten/kota terdiri atas pelayanan ketentraman dan ketertiban umum, pelayanan informasi rawan bencana, pelayanan pencegahan dan kesiapan siaga terhadap bencana, pelayanan penyelamatan bencana dan evakuasi korban. SPM ini disusun sesuai dengan kewenangan urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sebagaimana diatur dalam UU Nomor 23 tahun 2014. Mutu pelayanan dasar urusan ketentraman dan ketertiban umum meliputi standar operasional prosedur satpol PP, sarpras Satpol PP, peningkatan kapasitas anggota satpol PP dan linmas, dan standar pelayanan yang terkena dampak gangguan trantibum akibat penegakanhukum terhadap pelanggaran perda dan perkada. SPM ini disusun sesuai dengan kewenangan urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sebagaimana diatur dalam UU Nomor 23 tahun 2014.

Tabel 6. Kewenangan Kabupaten/Kota untuk urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum

Sub Urusan	Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan yang Diberikan
Ketentraman dan Ketertiban Umum	<ul style="list-style-type: none"> • Penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota 	<ul style="list-style-type: none"> • Jenis pelayanan yang diterima yaitu pelayanan ketentraman dan ketertiban umum, pelayanan informasi rawan bencana, pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, pelayanan penyelamatan bencana dan evakuasi korban dan pelayanan penyelamatan kebakaran dan evakuasi korban. • Dibiayai APBD Kabupaten/Kota.

Sumber: Lampiran UU.No. 23 Tahun 2014

3.3. SPM Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota

Jenis pelayanan dasar pada SPM Urusan Bencana Kabupaten/Kota meliputi pelayanan informasi rawan bencana, pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana dan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana, diatur dalam Permendagri Nomor 101 tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota, disusun sebagaimana ketentuan Pasal 9 ayat (6) PP Nomor 2 tahun 2018 tentang SPM. Mutu pelayanan dasar urusan bencana daerah kabupaten/kota meliputi prosedur operasional penanggulangan bencana, sarana dan prasarana penanggulangan bencana, peningkatan kapasitas personil/sumber daya manusia dan pelayanan Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana dan yang menjadi korban bencana. Mutu pelayanan dasar SPM Sub Urusan Bencana daerah kabupaten/kota disajikan sebagaimana lampiran 6. Berbeda dengan SPM lainnya di mana pemberlakukannya ada di Provinsi, SPM Sub Urusan Bencana Daerah hanya diberlakukan di Kabupaten/Kota hal ini disebabkan karena tidak ada definisi bencana skala provinsi. SPM Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota disusun sesuai dengan kewenangan sebagaimana diatur dalam UU nomor 23 tahun 2014.

Tabel 7. Kewenangan Kabupaten/Kota untuk urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat sub Urusan Bencana.

Sub Urusan	Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Yang Diberikan
Bencana	<ul style="list-style-type: none"> • Penanggulangan bencana kabupaten/kota 	<ul style="list-style-type: none"> • Pelayanan informasi rawan bencana; • Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana dan • Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana • Dibiayai APBD Kabupaten/Kota.

Sumber: Lampiran UU.No. 23 Tahun 2014

3.4. SPM Sub Urusan Kebakaran daerah Kabupaten/Kota.

SPM Sub urusan Kebakaran diatur dalam Permendagri nomor 114 tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/kota disusun untuk melaksanakan ketentuan pasal 9 ayat (6) PP Nomor 2 tahun 2018 tentang SPM. Jenis pelayanan sub urusan kebakaran meliputi pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana. Adapun mutu pelayanan dasar sub urusan kebakaran daerah kabupaten/kota meliputi tingkat waktu tanggap, prosedur operasional penanganan kebakaran dan penyelamatan korban dan evakuasi, sarana dan prasarana pemadam kebakaran, penyelamatan dan evakuasi, kapasitas aparatur pemadam kebakaran, pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi. SPM Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota disusun sesuai dengan kewenangan sebagaimana diatur dalam UU nomor 23 tahun 2014.

Tabel 8. Kewenangan Kabupaten/Kota untuk urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat sub Urusan Kebakaran.

Sub Urusan	Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Yang Diberikan
Kebakaran	<ul style="list-style-type: none"> • Penyelenggaraan pemetaan rawan kebakaran 	<ul style="list-style-type: none"> • Tingkat waktu tanggap, prosedur dan operasional penanganan kebakaran dan penyelamatan dan evakuasi • Sarpras pemadam kebakaran, dan kapasitas aparatur pemadam kebakaran, pelayanan pemadaman dan evakuasi • Dibiayai APBD Kabupaten/Kota.

Sumber: Lampiran UU.No. 23 Tahun 2014

4. SPM Pekerjaan Umum

Petunjuk teknis SPM Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, disusun untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (6) dan pasal 8 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018. Standar teknis ini mengatur tentang SPM Pekerjaan Umum dan SPM Perumahan Rakyat di mana masing-masing SPM diatur/ditentukan mutu, jenis pelayanan serta target capaian.

4.1. SPM Pekerjaan Umum Provinsi

Jenis pelayanan dasar SPM Pekerjaan Umum terdiri atas pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota, penyediaan pelayanan pengelolaan air limbah domestic regional kabupaten/kota. Penetapan jenis pelayanan dasar ini sesuai dengan kewenangan yang dimiliki Provinsi sebagaimana diatur dalam UU. Nomor 23 Tahun 2014 untuk urusan pemerintahan pekerjaan umum. Karena merupakan kewenangan provinsi, maka pembiayaan SPM ini dari APBD Provinsi. Mutu pelayanan yang ditetapkan berupa ukuran kuantitas dan kualitas, pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari dan kuantitas dan kualitas pelayanan sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) dengan target capaian 100 persen.

Tabel 9. Kewenangan Provinsi untuk urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum

Sub Urusan	Daerah Provinsi	Pelayanan yang Diberikan
Air Minum	Pengelolaan dan Pengembangan SPAM lintas daerah kabupaten/kota	<ul style="list-style-type: none"> • Pemenuhan kebutuhan air minum lintas kabupaten/kota • Penyediaan pengelolaan air limbah domestic regional lintas kabupaten/kota • Pembiayaan dari APBD Provinsi

Sumber: lampiran UU Nomor 23

4.2. SPM Pekerjaan Umum Kabupaten/Kota

Jenis pelayanan dasar pada SPM Pekerjaan Umum terdiri atas pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari dan penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik. Penetapan jenis pelayanan dasar ini sesuai dengan kewenangan yang dimiliki Kabupaten/Kota untuk urusan pemerintahan pekerjaan umum. Karena merupakan

kewenangan kabupaten/kota maka pembiayaan SPM ini dari APBD Kabupaten/Kota. Mutu pelayanan dasar pada SPM Pekerjaan Umum Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota berupa ukuran kuantitas dan kualitas air minum curah, ukuran kualitas dan kuantitas air minum sehari-hari dan kualitas dan kuantitas pengelolaan air limbah domestic, dengan target capaian 100 persen.

Tabel 9. Kewenangan Kabupaten/Kota untuk urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum

Sub Urusan	Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan yang Diberikan
Air Minum	Pengelolaan dan Pengembangan SPAM lintas Daerah Kabupaten/Kota	<ul style="list-style-type: none"> • Pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota • Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari • Sumber pembiayaan berasal dari APBD Kabupaten/Kota

Sumber: lampiran UU Nomor 23

5. SPM Perumahan Rakyat

SPM ini diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Mencakup SPM Perumahan Rakyat pemerintah Daerah Provinsi dan SPM Perumahan Rakyat Daerah Kabupaten/kota.

5.1. SPM Perumahan Rakyat Pemerintah Daerah Provinsi

Jenis pelayanan dasar SPM Perumahan Rakyat Daerah Provinsi terdiri atas penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana provinsi dan fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah. Penetapan jenis pelayanan dasar ini sesuai dengan kewenangan yang dimiliki Provinsi untuk urusan pemerintahan pekerjaan umum. Karena merupakan kewenangan provinsi, maka pembiayaan SPM ini dari APBD Provinsi. Mutu pelayanan dasar pada SPM Perumahan Rakyat Daerah Provinsi terdiri atas penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana, fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah, dengan target capaian 100 persen.

Tabel 10. Kewenangan Provinsi untuk urusan Pemerintahan Bidang Perumahan

Sub Urusan	Daerah Provinsi	Pelayanan Yang Diberikan
Perumahan	<ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana provinsi • Fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah provinsi 	<ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi • Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah provinsi. • Sumber pembiayaan APBD Provinsi.

Sumber: lampiran UU Nomor 23

5.2. SPM Perumahan Rakyat Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Jenis pelayanan dasar SPM Perumahan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota dan fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten/kota. Penetapan jenis pelayanan dasar ini sesuai dengan kewenangan yang dimiliki kabupaten/kota untuk sub urusan pemerintahan perumahan. Karena merupakan kewenangan kabupaten/kota, maka pembiayaan SPM ini dari APBD kabupaten/kota.

Mutu pelayanan dasar pada SPM Perumahan Rakyat Daerah kabupaten/kota standard dan kualitas pelayanan dasar, dimana kualitas ditentukan berdasarkan layanan dan kriteria pelayanan dengan kualitas masing-masing layanan terhadap fasilitasi rumah layak huni, dengan target capaian 100 persen.

Tabel 11. Kewenangan Kabupaten/Kota untuk sub urusan Pemerintahan Bidang Perumahan.

Sub Urusan	Daerah Kabupaten/Kota	Jenis Pelayanan
Perumahan	<ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana kabupaten/kota • Fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah kabupaten/kota 	<ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota • Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten/kota. • Sumber pembiayaan berasal dari APBD Kabupaten/kota.

Sumber: lampiran UU Nomor 23

6. SPM Kesehatan

Petunjuk teknis SPM Kesehatan diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang kesehatan. Disusun untuk memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (6) PP Nomor 2 Tahun 2018. Pengaturan SPM ini mencakup SPM kesehatan pemerintah daerah provinsi dan SPM Kesehatan pemerintah daerah kabupaten/kota.

6.1. SPM Kesehatan Pemerintah Daerah Provinsi

Jenis pelayanan dasar SPM kesehatan pemerintah daerah provinsi terdiri atas pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi dan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi. Penetapan jenis pelayanan dasar ini sesuai dengan kewenangan yang dimiliki Provinsi untuk urusan pemerintahan kesehatan, di mana karena merupakan kewenangan provinsi, maka pembiayaan SPM ini dari APBD Provinsi. Mutu pelayanan dasar pada SPM kesehatan provinsi terdiri atas standar jumlah dan kualitas barang dan atau/jasa, standar jumlah dan kualitas personel/sumber daya manusia kesehatan kesehatan dengan target capaian 100 persen.

Tabel 12. Kewenangan Provinsi untuk urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan

Sub Urusan	Daerah Provinsi	Jenis Pelayanan
Upaya Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan UKP (upaya kesehatan perorangan) rujukan tingkat daerah provinsi /lintas daerah kabupaten/kota. • Pengelolaan UKM (upaya kesehatan masyarakat daerah provinsi dan rujukan tingkat daerah kabupaten/kota • Pengelolaan UKM (upaya kesehatan masyarakat) daerah provinsi dan rujukan daerah tingkat daerah provinsi lintas daerah kabupaten/kota 	<ul style="list-style-type: none"> • Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi bencana provinsi • Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi • Sumber pembiayaan APBD Provinsi

Sumber: lampiran UU Nomor 23

6.2. SPM Kesehatan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Jenis pelayanan dasar SPM kesehatan pemerintah daerah kabupaten/kota terdiri atas pelayanan kesehatan ibu hamil, ibu

bersalin, bayi baru lahir, kesehatan balita, kesehatan pada usia pendidikan produktif, kesehatan usia lanjut, penderita hipertensi, penderita diabetes militus, kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat, orang terduga tuberkulosis dan pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV). Penetapan jenis pelayanan dasar ini sesuai dengan kewenangan yang dimiliki Kabupaten/Kota untuk urusan pemerintahan kesehatan, di mana karena merupakan kewenangan kabupaten/kota, maka pembiayaan SPM ini dari APBD Kabupaten/kota. Mutu pelayanan dasar pada SPM kesehatan kabupaten/kota terdiri atas standar jumlah dan kualitas barang dan atau/jasa, standar jumlah dan kualitas personel/sumber daya manusia kesehatan kesehatan dengan target capaian 100 persen.

Tabel 13. Kewenangan Kabupaten/Kota untuk urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan

Sub Urusan	Daerah Kabupaten/Kota	Jenis Pelayanan
Upaya Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan UKP pengelolaan daerah kabupaten / kota dan rujukan tingkat daerah kabupaten / kota • Pengelolaan UKM daerah kabupaten / kota dan rujukan tingkat daerah kabupaten / kota. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pelayanan kesehatan ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir, kesehatan balita, usia pendidikan dasar, pelayanan, usia produktif, usia lanjut, penderita hipertensi, diabetes militus, orang dengan gangguan jiwa berat, terduga TBC, dan orang dengan risiko HIV. • Sumber pembiayaan APBD.

Sumber: lampiran UU Nomor 23

7. Pembinaan dan Pengawasan

Pembinaan dan pengawasan merupakan salah satu langkah akhir untuk memperkuat otonomi daerah, untuk itu mekanisme pembinaan, pengawasan, pemberdayaan, serta sanksi yang jelas dan tegas memerlukan adanya kejelasan tugas pembinaan, pengawasan dari Kementerian yang melakukan pembinaan dan pengawasan umum serta kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian yang melaksanakan pembinaan teknis. Sinergi antara pembinaan dan pengawasan umum dengan pembinaan dan pengawasan teknis akan memberdayakan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Dalam UU Pemda, pasal 373 mengatur secara umum fungsi bin-was di mana

pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah menjadi tanggung jawab pemerintah pusat untuk provinsi, serta pendelegasian kepada gubernur sebagai wakil pemerintah untuk melakukan bin-was pemerintahan daerah kabupaten dan kota, yang secara nasional dikoordinasikan oleh Menteri. Pengaturan lebih lanjut tentang pembinaan diatur dalam pasal 374 tentang pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi di mana pada pasal ini secara tegas disebutkan bahwa pembinaan dilaksanakan oleh Menteri, menteri teknis, dan kepala lembaga pemerintah nonkementerian. Lebih lanjut, pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota diatur dalam pasal 375 di mana pasal ini mendelegasikan pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah dibantu oleh perangkat gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.

Dalam konteks penerapan SPM, Layaknya sebuah kebijakan public, keberhasilan penerapan SPM di daerah tidak terlepas dari fungsi pembinaan dan pengawasan, baik yang dilakukan oleh pemerintah (pusat) maupun pemerintah daerah. Pembinaan dan pengawasan atas penerapan SPM juga diatur dalam PP Nomor 2 Tahun 2018, pasal 19 di mana Menteri melakukan bin-was penerapan SPM daerah provinsi secara umum, menteri pengampu SPM melakukan bin-was penerapan SPM daerah provinsi secara teknis, serta gubernur selaku wakil pemerintah melakukan bin-was penerapan SPM daerah kabupaten/kota secara umum dan teknis. Pengaturan bin-was dalam peraturan ini masih bersifat makro sehingga diperlukan penjabaran yang lebih operasional baik ditingkat pusat maupun daerah. Perlibatan APIP dalam melaksanakan bin-was SPM akan lebih memperjelas apa yang harus dilakukan serta siapa melakukan apa. Perlibatan ini dilakukan mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.

B. Tahap Perencanaan

Perencanaan merupakan salah satu tahapan penting untuk pencapaian tujuan, demikian pula halnya dengan SPM dimana tujuan diterapkannya kebijakan ini adalah

terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan pelayanan dasar. Keberhasilan penerapan SPM pada tahap perencanaan ditandai dengan terintegrasikannya SPM ke dalam dokumen perencanaan daerah seperti RPJMD dan RKPD, dengan terintegrasinya SPM ke dalam dokrenda maka secara otomatis akan tertuang dalam dokumen anggaran. Integrasi ini menunjukkan komitmen daerah untuk menerapkan SPM.

Pada tahapan perencanaan, APIP harus memastikan bahwa SPM sudah terintegrasi dalam dokumen perencanaan dan penganggaran. APIP dapat memberikan saran profesionalnya untuk mencegah terjadinya penyimpangan atau dari sudut pencegahan resiko, APIP harus dapat memetakan atau memitigasi resiko yang kemungkinan akan timbul. APIP harus memastikan bahwa untuk mencapai target mutu pelayanan sesuai dengan jenis layanan yang harus diterima masyarakat harus sesuai sebagaimana diatur dalam petunjuk teknis yang dikeluarkan kementerian pengampu, baik dari sisi kualitas maupun kuantitas. Dari sisi kualitas misalnya, risiko dapat timbul berupa pengurangan atau kelebihan layanan. Masyarakat penerima layanan dengan kualitas yang berbeda sebagaimana seharusnya diterima akan berdampak pada kenyamanan socialnya. Hal ini tidak sejalan dengan konsep SPM itu sendiri yaitu "mutu dan jenis pelayanan dasar yang berhak diterima". Demikian pula halnya kelebihan pemberian kualitas layanan akan berimplikasi pada penganggaran apalagi keterbatasan APBD dihadapkan dengan pemenuhan pemberian layanan lainnya di luar SPM. Tidak menutup kemungkinan kondisi seperti ini akan memunculkan program/kegiatan yang tidak dibutuhkan atau adanya program/kegiatan titipan. Bentuk pembinaan lain yang dapat dilakukan adalah secara berkala misalnya APIP melakukan koordinasi dengan pengampu SPM sehingga secara dini dapat diketahui kendala dan permasalahan yang dihadapi. Pengawasan yang dilakukan pada tahapan perencanaan dapat dilakukan APIP di daerah dengan turut serta pada saat daerah menyusun rancangan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJMD, RKPD, Renstra dan Renja), di tataran pusat, Ditjen Bina Bangda dengan tuis yang diemban diharapkan dapat mengintervensi daerah untuk mengintegrasikan SPM ke dalam

dokumen perencanaan daerah pada forum fasilitasi sebagaimana diamanatkan dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah. Pada forum ini APIP sebaiknya dilibatkan sehingga ada pengayaan substansi SPM dan akan memudahkan APIP dalam menyusun program kerja maupun langkah kerja pengawasan dan reviu atas kinerja pemerintah daerah terkait penerapan SPM. Hal lain yang juga penting terkait pembinaan dan pengawasan pada tataran perencanaan adalah sinergitas antara APIP Pusat dengan Ditjen Bangda, APIP Pusat dengan APIP daerah, APIP di daerah dengan OPD Perencanaan.

C. Tahap Pelaksanaan

Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban menerapkan SPM untuk pemenuhan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang harus diperoleh setiap warga negara. Penerapan SPM oleh Pemerintah Daerah sebagaimana diamanatkan dalam PP Nomor 2 Tahun 2018 dilakukan dengan tahapan: 1) pengumpulan data, 2) penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar, 3) penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar dan 4) pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar. APIP dapat melaksanakan fungsi/peran binwas pada setiap tahapan pelaksanaan penerapan SPM sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data

Dalam PP nomor 2 tahun 2018, mengatur bahwa Pengumpulan data oleh Pemerintah Daerah dilakukan secara berkala untuk memperoleh data tentang jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang harus diterima serta jumlah barang dan/atau jasa yang tersedia termasuk jumlah sarana dan prasarana yang tersedia. Dengan demikian maka bentuk pembinaan dapat dilakukan dengan cara memberikan pengarahan maupun asistensi/pendampingan saat pengumpulan data dilakukan, atau APIP memberikan

panduan bagi pemda dalam melakukan pendataan, ini dapat dilakukan dengan melibatkan kementerian pengampu SPM. Pengawasan dapat dilakukan APIP misalnya memastikan bahwa pengumpulan data sudah terintegrasi dengan system infomasi pembangunan daerah (sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan)

2. Penghitungan Kebutuhan

Penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar dilakukan dengan menghitung selisih antara jumlah barang dan/atau jasa yang dibutuhkan untuk pemenuhan pelayanan dasar dengan jumlah barang dan/atau jasa yang tersedia, termasuk menghitung selisih antara jumlah sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk pemenuhan pelayanan dasar dengan jumlah sarana dan prasarana yang tersedia. Untuk penghitungan biaya, penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar digunakan dengan menggunakan standar biaya sesuai dengan juknis setiap SPM. Pada tahapan ini, APIP melakukan pembinaan dalam bentuk pendampingan kepada SKPD pengampu SPM dan panduan penghitungan kebutuhan, yang disusun bersama dengan kementerian pengampu SPM. Demikian pula halnya dengan pengawasan, keterlibatan APIP dalam bentuk pendampingan pada saat SKPD pengampu SPM menyusun DPA sehingga dapat dipastikan bahwa penghitungan kebutuhan biaya sudah disusun sesuai dengan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan untuk setiap jenis pelayanan serta jumlah layanan yang harus diberikan. Pendampingan dan pengawasan juga dapat dilakukan dengan menyusun panduan atau modul, dengan melibatkan kementerian pengampu SPM.

3. Penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar

Penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar dilakukan oleh pemerintah daerah agar pelayanan dasar tersedia secara cukup dan bersinambungan. Rencana pemenuhan pelayanan dasar ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah sebagai prioritas belanja daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Peran APIP pada tahapan ini adalah mengawal pada saat penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran, sehingga dapat diketahui apakah rencana pemenuhan

sudah dilakukan dengan mengacu pada petunjuk teknis setiap SPM, pembinaan dalam bentuk penyusunan modul dapat dilakukan sehingga dapat dijadikan panduan bagi APIP daerah dan SKPD pengampu SPM. Penyusunan modul ini dapat dilakukan APIP Pusat dengan melibatkan kementerian pengampu SPM.

4. Pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar

Pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar dilakukan Pemerintah berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dibutuhkan serta melakukan kerja sama Daerah. Dalam pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar, pemerintah daerah dapat membebaskan biaya untuk memenuhi kebutuhan dasar secara minimal dengan memprioritaskan bagi masyarakat miskin atau tidak mampu.

Pendampingan dapat dilakukan APIP pada saat OPD pengampu SPM menyusun atau melakukan identifikasi penyediaan barang/jasa guna memastikan bahwa identifikasi tersebut sesuai dengan jumlah barang/jasa yang dibutuhkan sesuai dengan jumlah penerima layanan, barang/jasa yang disediakan sesuai dengan yang dibutuhkan mengacu pada petunjuk teknis dan dukungan kegiatan untuk setiap SPM. Dengan demikian maka barang/jasa yang diberikan akan dapat bermanfaat serta tidak berakibat terjadinya pemborosan anggaran. Pemberian pelayanan dengan prioritas kepada masyarakat miskin juga harus dapat dipastikan kebenarannya untuk itu ketersediaan data menjadi penting. Pemenuhan pelayanan dasar yang dilakukan dengan kerjasama antar daerah harus juga didampingi APIP sehingga butir-butir kerjasama yang tertuang dalam nota kerjasama tidak saling tumpang tindih, ada penjelasan/penegasan siapa mengerjakan apa, di samping itu untuk memastikan bahwa kerjasama ini dilakukan sesuai dengan peraturan perundangan.

Dalam konteks pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar, APIP dapat menyusun panduan/pedoman yang dapat digunakan oleh pemda, penyusunan pedoman dapat melibatkan kementerian pemangku SPM. Pedoman hendaknya menjelaskan tahapan-tahapan yang harus dilakukan pemda, bagaimana proses koordinasi antar institusi atau OPD baik OPD pengampu maupun antar OPD. Koordinasi antar OPD dimungkinkan mengingat

keberhasilan penerapan SPM bias tergantung pada OPD lainnya. Bentuk pembinaan lain yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan sosialisasi, koordinasi serta pelatihan. Substansi ini dapat dituangkan juga dalam panduan.

D. Tahap Pelaporan

Pelaporan penerapan SPM diamanatkan dalam pasal 17 PP Nomor 2 Tahun 2018, pasal ini mengamanatkan bahwa pemda menyampaikan penerapan SPM yang menggambarkan hasil penerapan, kendala penerapan, serta ketersediaan anggaran. Pelaporan penerapan SPM termasuk dalam materi muatan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD). Lebih lanjut ditegaskan juga bahwa selain materi muatan laporan yang sudah ditentukan, khusus laporan penerapan SPM Provinsi dalam LPPD harus mencantumkan rekapitulasi penerapan SPM daerah kabupaten dan kota. Penyampaian laporan ini menjadi penting bagi pemerintah pusat untuk perumusan kebijakan dan dapat digunakan oleh pemerintah pusat untuk pemberian insentif atau disinsentif. Di samping itu, pemda dapat menggunakan hasil pelaporan untuk melakukan penilaian kinerja perangkat daerah, pengembangan kapasitas daerah dalam peningkatan pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar serta penyempurnaan kebijakan penerapan SPM dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah. Laporan penerapan SPM di daerah disusun secara terpadu antar stake holder di lingkungan pemerintah daerah yang terkait dengan pelaksanaan SPM seperti sekretaris daerah, Bappeda serta SKPD/OPD pengampu SPM. Mekanisme penyampaian laporan penerapan SPM provinsi disampaikan kepada presiden melalui menteri dalam negeri, sedangkan pelaporan SPM Kabupaten dan Kota disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur selaku wakil pemerintah. Selain substansi laporan sebagaimana telah diatur, laporan juga memuat informasi-informasi strategis terkait penerapan SPM antara lain informasi tentang kinerja pencapaian target SPM, informasi tentang dukungan anggaran dari pusat serta kebijakan-kebijakan pendukung yang dibuat oleh pemerintah daerah.

Peran APIP pada tahapan ini dapat dilakukan dalam bentuk pendampingan serta

penyiapan modul pelaporan yang dapat digunakan sebagai panduan bagi pemda dalam menyusun laporan penerapan SPM. Dalam penyusunan modul dapat melibatkan kementerian pengampu SPM, serta uji petik ke beberapa daerah. Bentuk pengawasan terkait dengan pelaporan SPM diantaranya memastikan substansi pelaporan sesuai dengan yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, memastikan pelaporan sudah masuk dalam LPPD tahun berjalan, dan penyampaian tepat waktu.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan kebijakan public, memberikan rambu-rambu bagi pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan dasar kepada masyarakat. Ramu-rambu tersebut terkait jenis dan mutu pelayanan dasar yang berhak diterima masyarakat secara minimal. Petunjuk teknis berupa peraturan menteri (teknis pengampu SPM) mengatur tentang mutu pelayanan yang berhak diterima masyarakat untuk setiap jenis pelayanan dasar. Petunjuk teknis ini menjadi pedoman bagi pemda (provinsi, kabupaten/kota) dalam penerapan SPM, di samping itu juknis dapat dijadikan acuan daerah dalam menghitung anggaran yang dibutuhkan dalam penerapan SPM. Keberhasilan penerapan SPM ditentukan oleh komitmen kepala daerah dan pembinaan dan pengawasan. Komitmen kepala daerah direpresentasikan dengan diintegrasikannya SPM ke dalam Dokumen Perencanaan dan Penganggaran dan dukungan regulasi berupa keputusan kepala daerah. Standar Pelayanan Minimal dapat digunakan sebagai salah satu alat ukur keberhasilan kepala daerah. Keberhasilan penerapan Standar Pelayanan Minimal setidaknya ditentukan oleh 3 (tiga) hal yaitu pertama komitmen kepala daerah hal ini tercermin dengan diintegrasikannya SPM ke dalam dokumen perencanaan daerah, dukungan regulasi/kebijakan kepala daerah, koordinasi antar OPD pengampu SPM dengan OPD lainnya yang mempunyai tugas saling beririsan, serta sosialisasi. Ke dua, adanya komitmen dari kementerian pengampu SPM dalam mensupport anggaran melalui mekanisme Dana Alokasi Khusus (DAK), melakukan pendampingan serta sosialisasi. Ke tiga peran APIP dalam melakukan pembinaan

dan pengawasan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga tahap pelaporan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti ucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang telah berkontribusi dalam penulisan jurnal ini, sehingga penelitian dapat selesai dilaksanakan dengan semaksimal mungkin. Semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.

V. DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Dasar 1945
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal
Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota.
Permendagri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota,
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota.
Permendagri Nomor 121 tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Di Provinsi Dan Kabupaten/Kota.
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan.
Peraturan Menteri PUPR Nomor 29 /PRT/M/Tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah.

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.



Korespondensi

Email¹ : nopifaiha26@gmail.com

Email² : imeaulia14@gmail.com

Email³ : sujad.m13@gmail.com



Inovbook Publications

Wisma Monex 9th Floor

Jl. Asia Afrika No 133-137 Bandung,
40112



Karya ini dilisensikan di bawah
Lisensi Internasional Creative
Commons Atribusi Nonkomersial
sharelike 4.0.

OPTIMALISASI POTENSI LOKAL UNTUK MENINGKATKAN EKONOMI MASYARAKAT DESA TANJUNG GUNUNG

Nopi^{1*}, Aimie Sulaiman^{2*}, Sujadmi^{3*}

^{1,2,3} Universitas Bangka Belitung | Gang IV No.1, Balun Ijuk,
Merawang, Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka Belitung 33172

Disetujui: 30 Juli 2021

Abstract

Local potential is defined as any resource including natural and human resources that exist in a village that can be developed for the purpose of improving welfare. Local potential plays a very important role in supporting the economic life of the community, especially in TanjungGunung Village. Therefore, this study aims to analyze the attempts to optimize local potential in order to improve the economy of the community in TanjungGunung Village, Central Bangka Regency and to describe the driving and inhibiting factors behind those attempts. This study applies the theory of the stages of empowerment proposed by M. AyubPadangaran. In addition, the research method used in this study was a descriptive qualitative method. From the results of this study, there are found several attempts to optimize local potential in TanjungGunung Village, which are providing socialization to the community (awareness stage), providing training to the community (capacity stage) and the community who already has the ability to make local foods that in this case is referred to as the empowerment stage by Ayub. The driving factors are the motivation from the party who provides the training, especially the Activity Implementation Team (TPK) of the community empowerment in TanjungGunung Village as well as the awareness of each of the community members in cultivating their local and economic potential. On the contrary, the inhibiting factors are the availability of raw materials, weather, and traditional technology.

Keywords: Local potential, Optimization, Economy

Abstrak

Potensi lokal merupakan segala sesuatu sumber daya baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia yang ada di suatu desa yang bisa dikembangkan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan. Potensi lokal sangat berperan penting dalam menopang kehidupan ekonomi masyarakat khususnya di Desa Tanjung Gunung. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tentang upaya-upaya optimalisasi potensi lokal untuk meningkatkan ekonomi masyarakat serta untuk mendeskripsikan faktor yang mendorong dan menghambat upaya optimalisasi potensi lokal untuk meningkatkan perekonomian masyarakat di Desa Tanjung Gunung, Kabupaten Bangka Tengah. Penelitian ini menggunakan Teori tentang tahapan pemberdayaan dari M. Ayub Padangaran. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif Deskriptif. Hasil dari penelitian ini ditemukan beberapa upaya yang dilakukan dalam optimalisasi potensi lokal di Desa Tanjung Gunung yaitu dengan memberikan sosialisasi kepada masyarakat (tahap penyadaran), memberikan pelatihan kepada masyarakat (tahap pengkapsitasan) dan masyarakat sendiri yang sudah memiliki kemampuan membuat panganan lokal yang dalam hal ini disebut sebagai tahap pendayaan oleh Ayub. Faktor yang mendorong adalah adanya motivasi dari pihak yang memberikan pelatihan khususnya tim pelaksana kegiatan atau TPK

pemberdayaan masyarakat Desa Tanjung Gunung, adanya kesadaran dari individu masyarakat dalam mengolah potensi lokal yang dimiliki dan ekonomi. Sedangkan faktor penghambatnya adalah ketersediaan bahan baku, cuaca serta teknologi yang masih tradisional.

Kata Kunci: Potensi lokal, Optimalisasi, Ekonomi

I. PENDAHULUAN

Ekonomi merupakan suatu permasalahan umum yang ada di masyarakat kota ataupun Desa. Berbagai masalah ekonomi yang dihadapi seperti masalah kemiskinan yang menjadi awal dari rendahnya kualitas sumber daya manusia dan juga persaingan pada pasar tenaga kerja (Nuryadhyn, Agus: 2013). Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator dari proses pembangunan ekonomi yang dilakukan baik di tingkat nasional maupun regional.

Kegiatan pemberdayaan masyarakat adalah suatu kegiatan yang memiliki tujuan yang jelas dan harus dicapai dan oleh sebab itu, setiap pelaksanaan pemberdayaan masyarakat perlu dilandasi dengan strategi kerja tertentu untuk mencapai tujuan yang diinginkan (Mardikanto dan Soebiato, 2017: 167). Pemberdayaan masyarakat dalam hal ini sebagai upaya untuk meningkatkan kemandirian masyarakat melalui potensi kemampuan yang dimiliki oleh masyarakat. Menurut hasil penelitian Subejo dan Iwamoto dalam (Totok dan Soebiato, 2017 : 78) bahwa masyarakat lokal sebenarnya memiliki kearifan dan kemampuan dalam memanfaatkan dan mengelola sumberdaya ekologi agar memberikan manfaat dan kesejahteraan bagi masyarakat setempat.

Potensi yang dimiliki oleh masyarakat diwujudkan untuk memungkinkan masyarakat agar bisa berdiri sendiri dalam memanfaatkannya sesuai dengan kapasitas yang dimiliki, baik itu secara individual ataupun kelompok sehingga mampu untuk memecahkan berbagai permasalahan yang berhubungan dengan upaya dalam meningkatkan perekonomian masyarakat. Program pemberdayaan masyarakat diharapkan bisa meningkatkan kesadaran, keterampilan serta kemandirian selama

kegiatan pemberdayaan masyarakat berjalan secara berkesinambungan.

Bangka Belitung merupakan salah satu provinsi yang memiliki potensi sumber daya alam yang patut untuk dikembangkan dalam menunjang perekonomian masyarakat. Potensi tersebut diantaranya hasil laut, kebun dan lain sebagainya yang patut untuk dikembangkan oleh masyarakat agar masyarakat berdaya. Desa sebagai penyuplai sumber kebutuhan masyarakat sangat berperan penting dalam menjaga ketersediaan sumber makanan bagi seluruh masyarakat (Dindin, 2009 : 25). Salah satu daerah yang memiliki potensi sumber daya alam tersebut adalah Desa Tanjung Gunung Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah. Potensi sumber daya alam yang dimaksud adalah hasil laut dan hasil kebun. Hasil laut disini berupa ikan yang dijadikanolahan pangan yang menjadi kuliner khas orang Bangka yaitu rusip, kerupuk dan juga ampyang, dan lain-lainnya.

Pangan lokal seperti rusip diproduksi dengan memanfaatkan ikan bilis (teri) yang ketika musimnya jumlahnya banyak. Sehingga jika diolah dapat disimpan dalam waktu yang lebih lama dan mempunyai nilai tambah secara ekonomi. Kemudian untuk kerupuk ikan sendiri banyak dari masyarakat Desa Tanjung Gunung yang memanfaatkan ikan dencis, pirangdan ciu. Sedangkan pada produksi ampiyang sendiri di olah dari ikan kepetek. Pemanfaatan hasil ikan tersendiri karena ikan merupakan hasil laut yang banyak diminati oleh masyarakat secara umum.

Selain hasil laut, hasil kebun yang dimiliki oleh masyarakat Desa Tanjung Gunung diantaranya adalah singkong. Singkong merupakan jenis umbi yang sangat populer bagi masyarakat Indonesia pada umumnya. Jenis tanaman ini hampir dapat dijumpai diseluruh wilayah Indonesia. Orang Indonesia, terutama didaerah pedesaan sering menggunakan umbi ini sebagai kebutuhan karbohidrat selain nasi. Salah satu daerah di Bangka Belitung yang sudah menggunakannya adalah wilayah Desa Tanjung Gunung.

Kadaan tersebut sering disebut Karl Marx dengan konsep nilai lebih. Nilai lebih yang dimaksud dalam hal ini adalah nilai pakai misalnya, barang tersebut digunakan untuk apa atau apakah barang tersebut diminati atau

tidak, itulah yang akan menentukan nilai dari suatu barang tersebut (Franz, 1999 : 200).

Potensi yang dimiliki serta sumber daya manusia yang mampu untuk memanfaatkannya maka dari situlah suatu daerah memiliki nilai lebih untuk daerah tersebut. Nilai lebih dalam hal ini untuk menjelaskan tentang potensi daerah yang dimiliki oleh masyarakat Desa Tanjung Gunung seperti hasil kebun dan hasil laut. Hasil kebun berupa singkong yang diolah menjadi barang yang diproduksi dalam bentuk pangan (sengkulak dan keripik ubi). Hasil produksi tersebut tidak hanya dikonsumsi oleh masyarakat setempat melainkan juga dikonsumsi oleh masyarakat luar desa tersebut sebagai panganan masyarakat. Hasil laut seperti ikan yang di olah masyarakat menjadi ikan asin, rusip, abon kerupuk, ampiyang dan kuliner lainnya seperti empek-empek. Dengan demikian potensi tersebut akan memberikan nilai lebih kepada masyarakat terlebih dalam hal peningkatan produktifitas dan perekonomian masyarakat Desa Tanjung Gunung.

Penelitian tentang pemberdayaan masyarakat tentang pengembangan potensi lokal pernah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu diantaranya adalah Nur Jannah pada tahun 2016 di Desa Pangkal Niur yang meneliti tentang pemberdayaan dengan judul Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengembangan Produk Beras Aruk di Desa Pangkal Niur. Dalam penelitian tersebut mendeskripsikan bahwa ada beberapa peran pemerintah desa dalam mengembangkan produk beras aruk yaitu, mensosialisasikan pentingnya potensi yang dimiliki oleh desa dan menyadarkan pikiran masyarakat bahwa potensi tersebut sangat penting. Pemerintah desa juga mengajak masyarakat untuk melakukan pelatihan ke Provinsi dengan tujuan agar masyarakat bisa menambah pengetahuan dan wawasan yang lebih luas. Selain itu peran yang dilakukannya yaitu mengajak masyarakat untuk berpartisipasi untuk mempromosikan produk yang dimiliki supaya lebih dikenal oleh masyarakat luas.

Kemudian penelitian serupa juga dilakukan oleh Rizqi Choironi pada tahun 2018 dengan judul “Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Potensi Lokal Melalui Pengolahan Limbah Cangkang Kerang Di PKBM Kridatama Desa Sendang Sikucing Kecamatan Rowosari

Kabupaten Kendal”. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian tersebut menjelaskan tentang proses pemberdayaan masyarakat berbasis potensi lokal di PKBM Kridatama dilakukan melalui beberapa tahap.

Pertama, yaitu pembentukan perilaku menuju sadar dan peduli strategi yang digunakan dengan cara mengangkat dan mengembangkan kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan pengetahuan dan keterampilan lebih lanjut dalam rangka memperbaiki taraf kehidupan. Kedua, yaitu pemberian keterampilan dan wirausaha yaitu pembuatan kerajinan dari limbah cangkang kerang berupa bros, boneka, vas bunga dan vigura.

Dari penelitian yang dilakukan oleh Rizqi tersebut dapat diketahui bahwa dari kegiatan pemberdayaan masyarakat berbasis potensi lokal melalui pengolahan hasil limbah cangkang kerang hasil secara fisiknya dari segi lingkungan menjadi bersih, dan sesudah diberdayakan lingkungan menjadi terjaga. Sedangkan secara non fisiknya dilihat dari segi pendapatan ekonomi yaitu bertambahnya pendapatannya pendapatan istri nelayan sehingga dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga dalam upaya meningkatkan kesejahteraan keluarga dan dari segi sosial yaitu bertambahnya pengetahuan dan keterampilan istri nelayan.

Berdasarkan pemaparan diatas penelitian ini berfokus untuk menggali upaya-upaya optimalisasi potensi lokal dalam hal ini pangan lokal untuk meningkatkan perekonomian masyarakat di Desa Tanjung Gunung. Penelitian ini juga berfokus untuk menggali tentang faktor-faktor yang mendukung dan menghambat optimalisasi potensi lokal untuk meningkatkan perekonomian masyarakat di Desa Tanjung Gunung.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif adalah suatu metode penelitian yang mengumpulkan dan menganalisis data berupa kata-kata dan perbuatan-perbuatan manusia tanpa ada usaha untuk mengkuantifikasikan data kualitatif yang diperoleh (Afrizal, 2017: 102).

Peneliti menggunakan metode penelitian ini adalah untuk menggambarkan atau mendeskripsikan tentang upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah Desa dan masyarakat dalam mengoptimalkan potensi lokal untuk meningkatkan perekonomian masyarakat di Desa Tanjung Gunung. Dengan demikian metode penelitian kualitatif deskriptif sangat relevan untuk digunakan dalam penelitian yang dilakukan ini serta mampu memetakan hasil yang diperoleh dilapangan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Potensi Desa Tanjung Gunung

Potensi sumber daya alam yang ada di Desa Tanjung Gunung sendiri terdiri dari hasil laut dan hasil perkebunan. Dari potensi pertanian ini menghasilkan banyak jenis atau hasil yang diperoleh. Beragam jenis tumbuhan yang di tanam oleh petani di Desa Tanjung Gunung diantaranya adalah singkong. Tumbuhan singkong ini merupakan tumbuhan yang sudah lama di kenal oleh masyarkat luas. Singkong sudah banyak digunakan dalam berbagai macam panganan masyarakat. Singkong juga dapat di dimanfaatkan dalam berbagai bentuk olahan makanan bahkan bisa menjadi peluang usaha yang dapat menopang ekonomi masyarakat. Pangan lokal tersebut diantaranya adalah keripik ubi, sengkulak dan kemplang.



Gambar1. Kegiatan Pembuatan Keripik Singkong dan Sengkulak di Desa Tanjung Gunung, Kabupaten Bangka Tengah.

Potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Desa Tanjung Gunung yang lain adalah hasil laut yang berupa ikan. Ikan tidak hanya dijadikan sebagai lauk saja, namun diolah oleh masyarakat Desa Tanjung Gunung dalam bentuk panganan lokal. Hasil olahan tersebut berupa rusip, ampiyang, getas, dan kerupuk

ikan. Potensi tersebut di Desa Tanjung Gunung masih terus diupayakan oleh pemerintah dan masyarakat dalam meningkatkan ekonomi masyarakat Desa Tanjung Gunung.

B. Upaya Optimalisasi Potensi Lokal Desa Tanjung Gunung

Upaya yang diterapkan dalam optimalisasi potensi lokal Desa Tanjung Gunung, Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah ini terdapat beberapa langkah yang telah dilakukan. Upaya tersebut disusun agar pengoptimalan potensi lokal bisa berjalan secara optimal. Upaya yang dilakukan tersebut diantaranya adalah melalui tahap penyadaran masyarakat terkait potensi yang dimiliki, tahap pengkapasitasan masyarakat, dan tahap pendayaan masyarakat yang akan dijelaskan dalam tabel 1.

Tabel1. Upaya Optimalisasi Potensi Lokal di Desa Tanjung Gunung, Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah

No.	Upaya-upaya	Keterangan
1	Tahap penyadaran	Masyarakat Desa Tanjung Gunung khususnya ibu-ibu diberikan pencerahan dan dorongan melalui sosialisasi yang dilakukan oleh Pemdes untuk menyadari bahwa mereka memiliki potensi sumber daya alam yang bisa dioptimalkan untuk meningkatkan ekonomi sekaligus kesejahteraan masyarakat.
2	Tahap pengkapasitasan	Langkah ini dilakukan dengan memberikan pelatihan kepada masyarakat tentang pembuatan kemplang, ampiyang, keripik ubi dan sengkulak serta cara pemasaran produk.
3	Tahap pendayaan	Dengan langkah-langkah yang dilakukan, disini masyarakat sudah memiliki kemampuan dalam pembuatan panganan lokal dengan memanfaatkan hasil laut dan kebun yang di Desa tersebut sebagai wujud kemandirian untuk kesejahteraan ekonomi mereka.

Sumber: Hasil Pengolahan Data tahun 2020

Mengenai upaya dari beberapa langkah yang dilakukan dalam optimalisasi potensi lokal untuk meningkatkan ekonomi masyarakat Desa Tanjung Gunung, terdapat beberapa upaya yang akan dioptimalkan dari pemerintah Desa. Langkah-langkah tersebut adalah memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya potensi lokal atau sumber daya alam yang dimiliki oleh suatu Desa dalam meningkatkan perekonomiannya. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk menyadarkan masyarakat untuk

bagaimana memanfaatkan potensi yang ada agar diolah secara optimal dan berkelanjutan.

Langkah berikutnya dilakukan dengan memberikan pelatihan tentang pembuatan produk olahan hasil laut dan kebun, yakni pembuatan sengkulak, keripik ubi, ampiyang, getas dan kemplang ikan serta tata cara pemasaran produk yang dihasilkan. Kemudian dari pelatihan tersebut oleh pemerintah Desa kepada masyarakat khususnya ibu-ibu di Desa Tanjung Gunung ini dibentuk kelompok Usaha industri rumahan. Kelompok tersebut memiliki nama yang unik yaitu UMKM polaksa bersaudara Desa Tanjung Gunung, Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah.

Selanjutnya dengan adanya langkah-langkah yang sudah dilakukan pemerintah Desa Tanjung Gunung terkait upaya optimalisasi potensi lokal tersebut, kini masyarakat sudah ada yang memiliki usaha industri rumahan. Masyarakat juga diberikan bantuan berupa alat produksi dalam pembuatan olahan panganan lokal. Tujuan tersebut tidak lain adalah sebagai bentuk kepedulian pemerintah Desa kepada masyarakat Desa Tanjung Gunung terkait perekonomian dengan wisata yang ada.

Pemerintah Desa Tanjung Gunung juga tidak bekerja sendiri dalam upaya mengoptimalkan potensi lokal yang tujuannya adalah untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Pemerintah setempat bekerja sama dengan dinas perindustrian perdagangan koperasi dan umkm Kabupaten Bangka tengah agar inovasi dalam mewujudkan masyarakat yang berdaya dengan memanfaatkan potensi lokal dapat berjalan dengan optimal dan berkesinambungan. Hal inilah yang membuat masyarakat terus berpartisipasi dalam pengolahan potensi lokal dalam menunjang roda perekonomian yang lebih baik.

C. Faktor-Faktor dalam Upaya Optimalisasi Potensi Lokal untuk Meningkatkan Ekonomi Masyarakat

Dalam upaya optimalisasi potensi lokal untuk meningkatkan ekonpmi masyarakat Desa Tanjung Gunung terbagi menjadi dua yaitu faktor pendorong dan juga faktor penghambat. Faktor-faktor tersebut akan diuraikan lebih rinci dalam tabel 2 sebagai berikut:

Tabel2. Faktor-faktor dalam upaya optimalisasi potensi lokal dalam meningkatkan ekonomi masyarakat Di Desa Tanjung Gunung

No.	Faktor-Faktor	Uraian
1	Pendorong	<ul style="list-style-type: none"> • Ketersediaan Potensi atau sumber daya alam hasil laut yang berupa ikan dan hasil kebun berupa singkong. • Motivasi dari pemerintah Desa • Ekonomi • Partisipasi dari Masyarakat khususnya ibu-ibu di Desa Tanjung Gunung.
2	Penghambat	<ul style="list-style-type: none"> • Alat produksi yang minim • Proses pemasaran • Kondisi cuaca dalam pembuatan kemplang

Sumber: Hasil Pengolahan Data tahun 2020

Berdasarkan uraian mengenai faktor-faktor dalam upaya optimalisasi potensi lokal untuk meningkatkan ekonomi masyarakat di Desa Tanjung Gunung, dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa yang menjadi faktor pendorongnya adalah adanya potensi lokal yang berupa sumber daya alam yang memadai. Potensi tersebut terdiri dari hasil laut yang berupa hasil tangkapan ikan dari para nelayan. Beragamnya jenis ikan yang ada kemudian di olah oleh masyarakat khususnya ibu-ibu di Desa Tanjung Gunung dalam bentuk panganan lokal mengingat bahwa Desa Tanjung Gunung merupakan daerah pesisir yang memiliki berbagai objek wisata.

Kemudian pemerintah Desa Tanjung Gunung juga memotivasi warga Desa untuk mengoptimalkan potensi yang ada. Motivasi tersebut ditujukan kepada masyarakat setempat agar mereka bisa memanfaatkan peluang usaha demi kelangsungan hidup ekonomi masyarakat. Dalam hal ini pemerintah Desa Tanjung Gunung Juga sudah memberikan bantuan berupa peralatan untuk membuat hasil olahan potensi yang ada di Desa Tanjung Gunung.

Selain dukungan dari pemerintah Desa, alasan masyarakat menggeluti potensi yang ada juga karna faktor ekonomi. Ekonomi keluarga disadari oleh masyarkat Desa Tanjung Gunung khususnya ibu-ibu rumah tangga mengakui bahwa tidak cukup jika hanya bergantung kepada penghasilan dari suami tanpa adanya bantuan dari ibu rumah tangga. Sehingga pengolahan hasil potensi lokal menjadi suatu hal yang penting dalam meningkatkan ekonomi.

Kemudian faktor lain yang menjadi pendorong upaya optimalisasi potensi lokal dalam meningkatkan ekonomi masyarakat di Desa Tanjung Gunung ini juga dilatarbelakangi oleh partisipasi dari masyarakat itu sendiri. Partisipasi masyarakat dapat diketahui dari adanya ibu-ibu yang menggeluti usaha pangan lokal dari sumber daya alam yang dimiliki oleh Desa Tanjung Gunung.

Faktor penghambat dari upaya optimalisasi potensi lokal di Desa Tanjung Gunung yaitu adalah peralatan produksi yang minim, seperti dalam pembuatan kemplang yang masih mengandalkan cuaca panas dalam proses pengeringannya. Keadaan tersebut membuat ibu-ibu kesulitan untuk memproduksi pangan lokal dalam jumlah yang cukup banyak. Selain itu, ketika hadirnya covid-19 juga memicu pemasaran yang sulit karena masyarakat terkendala dalam hal keuangan. Disamping itu juga masyarakat belum paham mengenai pemasaran hasil produksi untuk bersaing dengan hasil olahan yang ada di luar Desa Tanjung Gunung.

Berdasarkan potensi lokal yang dimiliki Desa Tanjung Gunung tentunya ada faktor penghambat dalam upaya mengoptimalkan potensi lokal untuk meningkatkan ekonomi masyarakat di Desa Tanjung Gunung. Faktor penghambat seperti peralatan produksi yang minim diupayakan oleh pemerintah Desa dengan memberikan bantuan seperti memberikan bantuan mesin parut singkong agar produksi yang dihasilkan oleh masyarakat lebih cepat dan berkualitas. Inovasi tersebut sebagai bentuk kepedulian pemerintah Desa untuk kesejahteraan ekonomi masyarakat dan bisa bersaing ditengah hadirnya pariwisata di Desa Tanjung Gunung Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka tengah.

Kemudian pada faktor penghambat dibagian pemasaran ini, masyarakat mengupayakan untuk menjual hasil produksi mereka secara langsung ditoko-toko Desa Tanjung Gunung dan ada juga dari pihak pemerintah Desa bekerja sama langsung dengan dinas perindustrian, perdagangan, koperasi dan UMKM Kabupaten Bangka Tengah agar produksi yang dihasilkan oleh masyarakat Desa Tanjung Gunung ini dapat dipasarkan dengan baik. Selanjutnya pada faktor penghambat pada cuaca yang sering dikeluhkan oleh masyarakat dalam pembuatan kemplang, disini masyarakat mengupayakan

untuk melihat peluang usaha lain akan tetapi masih memanfaatkan bahan baku ikan sebagai hasil potensi laut. Jika cuaca dalam keadaan kurang mendukung untuk membuat kemplang yang pengeringannya menggunakan cuaca panas, disini masyarakat berinovasi untuk mengolah ikan dalam bentuk emping yang produksinya tidak menggunakan panas sinar matahari akan tetapi langsung digoreng. Masyarakat juga mengalihkan hasil produksi ikan dalam bentuk rusip sebagai pangan lokal dari masyarakat Desa Tanjung Gunung dan mengingat rusip juga diminati oleh masyarakat di Bangka Belitung.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian dalam optimalisasi potensi lokal untuk meningkatkan ekonomi masyarakat di Desa Tanjung Gunung, Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat disimpulkan bahwa, upaya yang dilakukan dalam optimalisasi potensi lokal terdiri dari beberapa langkah yaitu tahap penyadaran masyarakat, tahap pengkapasitasan masyarakat, dan tahap pendayaan masyarakat.

Selanjutnya untuk faktor-faktor dalam upaya optimalisasi potensi lokal dalam meningkatkan ekonomi masyarakat terdiri dari faktor pendorong seperti ketersediaan bahan baku atau potensi lokal, motivasi dari pemerintah Desa Tanjung Gunung, ekonomi dan juga partisipasi dari masyarakat. Sedangkan untuk faktor penghambatnya adalah peralatan produksi yang minim, cuaca, dan proses pemasaran.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih yang begitu besar kepada berbagai pihak yang telah berkenan membantu dalam penelitian ini. Khususnya keluarga penulis tercinta. Penelitian ini bukan hanya hasil karya ilmiah dari penulis seorang. Penulisan ini tentu juga ada kontribusi dari berbagai pihak terutama dosen pembimbing yang telah sabar membimbing dan memberi saran yang baik dalam penulisan hasil karya ini. Penulis juga tidak lupa berterima kasih kepada pihak pemerintah Desa Tanjung Gunung yang telah berkenan memberikan izin untuk melakukan pengambilan data dan membantu penulis

diberbagai hal. Penulis juga mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan motivasi kepada penulis yang tidak bisa penulis sebutkan namanya satu persatu.

V. DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal. 2016. *Metode Penelitian Kualitatif; Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Hermanita, 2013. *Perekonomian Indonesia*. Yogyakarta: Press Yogyakarta.
- Hikmat, R. Harry. 2010. *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: Humaniora Utama Press.
- M. Padangaran, Ayub. 2011. *Manajemen Proyek Pengembangan Masyarakat: Konsep, Teori dan Aplikasi*. Kendari: Unhalu press.
- Mukhtar, 2013. *Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif*. Jakarta Selatan: Referensi (GP Press Group).
- Nasrudin, Dindin. 2009. *Melirik Potensi Desa Menuju Masyarakat Sejahtera*. Jakarta Pusat: CV Karya Mandiri Pratama
- Satrya, Arif. 2015. *Pengantar Sosiologi Masyarakat Pesisir*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor.
- Soebiato, Poerwoko dan Totok Mardikanto. 2017. *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suseno, Franz Magnis. 2017. *Pemikiran Karl Marx Dari Sosialisme Utopia ke Perselisihan Revisionisme*. Jakarta: PT. Gramedia



***Korespondensi**

Email : anisatoboalimu04@gmail.com



Inovbook Publications

Wisma Monex 9th Floor

Jl. Asia Afrika No 133-137 Bandung,
40112



Karya ini dilisensikan di bawah
Lisensi Internasional Creative
Commons Atribusi Nonkomersial
sharelike 4.0.

STRATEGI BERTAHAN HIDUP PETANI (Studi pada Keluarga Petani Karet di Desa Jeriji pada Masa Pandemi Covid-19)

**Anisa Nur Fajri^{1*}, Bustami Rachman^{2*}, Iskandar
Zulkarnain^{3*}**

^{1,2,3} Universitas Bangka Belitung | Gang IV No.1, Balun Ijuk,
Merawang, Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka Belitung 33172

Disetujui: 30 Juli 2021

Abstract

This study aims to obtain information, regarding the survival strategy of rubber farming families in the Jeriji village Bangka Selatan during a pandemic Covid-19, the majority of the people in this Jeriji Village are almost 60% livelihoods as rubber farmers. This research is a descriptive qualitative research approach with the types and sources of data to answer this problem using primary and secondary data. Primary data were collected through observation, interviews, and discussions with rubber farming families. While secondary data is collected through other sources in the form of documents. The result of this study concluded that the living conditions of rubber famer families in Jeriji Village during the Covid-19 pandemic were influenced by several factors, namely: 1) family economic income during the Covid-19 pandemic, 2) the selling and buying price of rubber fluctuates lower, 3) changes in weather seasons, 4) the price of basic necessities increases. From the living conditions of rubber farming families in Jeriji Village, they are at the poverty line an to continue to survive, a number of rubber farming families in Jeriji Village carry out a survival strategy or mechanism, namely: 1) alternative subsistence strategies, 2) strategies to tie the belt tighter, 3) network strategies or social network relations. This strategy they do in order to continue to survive in the future.

Keywords: Covid-19 Pandemic, Rubber Farming Family, Survival Strategy

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan informasi, mengenai strategi bertahan hidup keluarga petani karet di Desa Jeriji Bangka Selatan pada masa pandemi Covid-19. Mayoritas masyarakat di Desa Jeriji ini hampir 60% bermata pencaharian sebagai petani karet. Penelitian ini merupakan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif dengan jenis dan sumber data untuk menjawab masalah ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan diskusi dengan keluarga petani karet. Sedangkan data sekunder dikumpulkan melalui sumber lain berupa dokumen-dokumen. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa kondisi kehidupan keluarga petani karet di Desa Jeriji pada masa pandemi Covid-19 yang dipengaruhi beberapa faktor, yakni : 1) pendapatan ekonomi keluarga pada masa pandemi Covid-19, 2) harga jual beli karet berfluktuasi semakin rendah, 3) perubahan musim cuaca, 4) harga kebutuhan pokok semakin meningkat. Dari kondisi kehidupan keluarga petani karet di Desa Jeriji berada pada garis kemiskinan dan untuk terus bertahan hidup sejumlah keluarga petani karet di Desa Jeriji melakukan strategi atau mekanisme survival, yakni : 1) strategi alternative subsistensi, 2) strategi mengikat sabuk lebih kencang,

3) strategi jaringan / relasi jaringan social. Strategi ini mereka lakukan agar dapat terus bertahan hidup yang akan datang.

Kata Kunci: Pandemi Covid-19, Keluarga Petani Karet, Strategi Bertahan

I. PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundangundangan. Artinya pemerintah daerah mempunyai hak dan wewenang untuk membuat inisiatif sendiri, mengelola, dan mengoptimalkan potensi sumber daya, serta mengatur arah pembangunan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akan tetapi, pada dasarnya kewenangan tersebut adalah pelimpahan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. (Simandjuntak, 2015)

Inovasi merupakan suatu penemuan baru yang berbeda dari yang sebelumnya berupa hasil pemikiran dan ide yang dapat dikembangkan juga diimplementasikan agar dirasakan manfaatnya. (Hutagalung & Hermawan, 2018: 26) Beberapa faktor penting yang berpengaruh dalam pengembangan inovasi pemerintah daerah adalah sumber daya manusia, partisipasi masyarakat, aspek kepemimpinan, infrastruktur, manajemen informasi, dan lingkungan bisnis (swasta). Seperti dijelaskan oleh (Muflihah & Susanto, 2017: 306-308) dan (Andhika, 2018: 210-213), yaitu bahwa kesuksesan pelaksanaan inovasi pemerintah daerah sangat dipengaruhi adanya kolaborasi penataan kelembagaan, aktor kebijakan, dan masyarakat. Kualitas sumber daya manusia sangat berpengaruh terhadap tumbuhnya inovasi, baik dari segi jumlah maupun jenis inovasi itu sendiri, terutama kemampuan pimpinan dalam mengorganisir lingkungan kerjanya untuk lebih inovatif. (Yudha & Susanto, 2019: 5)

Jembatan penghubung berbentuk infrastruktur pendukung akan memberikan dorongan suksesnya inovasi. Lebih lanjut, pemanfaatan teknologi harus didasari oleh

kebijakan pemerintah, hal ini menggambarkan pemerintah ikut mendorong pemanfaatan teknologi dalam meningkatkan efisiensi aktivitas nya. Bila dibandingkan dengan kemajuan teknologi, maka teknologi menjadi alat transformasi diberbagai bidang pelayanan pemerintah antara penerima dan penyedia layanan. Teknologi umumnya dimanfaatkan dalam aktivitas pemerintah untuk memperbaiki sektor pelayanan publik, saat ini inovasi lebih sering dikaitkan dengan pemanfaatan teknologi. (Andhika, 2018: 216)

Kondisi inovasi Pemerintah Indonesia saat ini berada pada urutan ke-85 dunia dan dua terbawah di tingkat Asia. (Cornell University, INSEAD, 2019: 36) Fakta ini membuktikan bahwa masih banyak pemerintah daerah yang belum melakukan inovasi dalam implementasi e-government di Indonesia. Ini juga merupakan salah satu tantangan dan peluang pemerintah daerah untuk saling mendukung dalam mengembangkan inovasi. (Rozikin et al., 2020: 69) Upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis (menggunakan) elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien. (Kementerian Komunikasi dan Informasi RI). (Supriyanto, 2016: 143) Masyarakat yang semakin modern dan mapan, memiliki segudang ekspektasi, seperti lingkungan tempat tinggal dan pekerjaan yang nyaman, adanya area publik yang memadai, serta kemudahan mengurus segala bentuk pelayanan publik. (Suhendra, 2017: 2)

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi ini juga sangat menguntungkan dibandingkan dengan cara-cara manual atau tradisional. Hal itu dibuktikan dengan semakin cepatnya masyarakat dalam mendapatkan informasi melalui berbagai teknologi informasi dan komunikasi yang semakin baik. Beberapa negara maju saat ini sudah mulai memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi terbaru yang bersifat digital dan melahirkan sebuah bentuk mekanisme birokrasi pemerintahan baru, yang disebut sebagai Electronic Government (E-government). (Widodo, 2016: 227) Hal ini dikarenakan di era globalisasi seperti saat ini perkembangan dan kemajuan Teknologi Informasi telah berjalan dengan sangat pesat. (Ulansari, 2015: 1852)

Seperti halnya Inovasi Telepon Sahabat Perempuan dan Anak di Kota Bekasi. Inovasi Telepon Sahabat Perempuan dan Anak atau yang sering sicut Tesa merupakan media bagi perempuan dan anak dalam upaya perlindungan dan pemenuhan hak perempuan dan anak dimana perempuan dan anak dapat secara langsung berpartisipasi untuk mengungkapkan permasalahan, menyampaikan pandangannya dan menemukan solusinya. Hal ini sejalan dengan Konvensi Hak Anak dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Tujuan adanya inovasi Telepon Sahabat Perempuan dan Anak yaitu memberikan layanan informasi, konsultasi, konseling dan rujukan dalam penanganan perempuan dan anak juga memberikan layanan pengaduan bagi masyarakat apabila terjadi kekerasan.

Selain itu, terdapat pula inovasi yang memanfaatkan teknologi yang dilakukan oleh Kota Jambi yang bernama Inovasi Aplikasi Beasiswa dan PPDB Online. Latar belakang yang mendorong terbentuknya inovasi PPDB Online yaitu khusus Kota Jambi pemerataan siswa yang akan melamar ke sekolah SMA/SMK belum merata dikarenakan sekolah belum sepenuhnya merata di setiap kecamatan. Selain itu, arus siswa dari lulusan SMP yang akan masuk ke jenjang SMA/SMK tidak sebanding. Sedangkan untuk Beasiswa Online, berangkat dari permasalahan calon pendaftar sangat antusias untuk mengetahui info mengenai beasiswa online ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jambi serta belum transparan.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis inovasi yang dilakukan oleh Kabupaten/Kota dalam upaya memanfaatkan perkembangan teknologi dalam meningkatkan efisiensi aktivitas yang dilakukan pada setiap Kota/Kabupaten.

II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu cara ilmiah, data, tujuan dan kegunaan (Sugiyono, 2013:2).

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode kualitatif deskriptif. Pendekatan kualitatif deskriptif adalah cara

kerja penelitian yang menekankan pada aspek pengalaman data demi mendapatkan kualitas dari hasil suatu penelitian, atau dengan kata lain pendekatan kualitatif adalah suatu mekanisme kerja penelitian yang mengandalkan uraian deskriptif kata atau kalimat yang disusun secara cermat dan sistematis, mulai dari penghimpunan data hingga menafsirkan dan melaporkan hasil penelitian (Ibrahim, 2015: 52). Penelitian kualitatif deskriptif berusaha mendeskripsikan seluruh gejala atau keadaan yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan (Mukhtar, 2013:11).

Jenis dan sumber data dalam penelitian ini, yakni: data sekunder dan data primer. Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan dari tangan kedua atau sumber-sumber lain yang telah tersedia sebelum penelitian dilakukan (Silalahi, 2017:291). Dalam penelitian ini data sekunder berupa data profil Desa Jeriji, bukan dari informan langsung, melainkan dari dokumen-dokumen seperti foto, buku, jurnal, skripsi yang berkaitan dengan strategi bertahan hidup terhadap keluarga petani karet. Sedangkan data primer yaitu data yang dikumpulkan dalam dari situasi aktual ketika peristiwa terjadi. Informan dari data primer ialah individu, kelompok focus, dan satu kelompok (Silalahi, 2017:289). Dalam proses penelitian ini data primer dilakukan melalui wawancara langsung dengan informan penelitian terkait informasi strategi bertahan hidup keluarga petani karet dalam menghadapi fluktuasi harga pada masa pandemi Covid-19 di Desa Jeriji Bangka Selatan.

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini jenis wawancara yang digunakan ialah wawancara tidak terstruktur, yakni wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya (Sugiyono, 2019: 198). Secara garis besar permasalahan yang akan ditanyakan sebagai bahan untuk menggali lebih dalam dari permasalahan yang diteliti. Peneliti akan melakukan wawancara kepada para Keluarga Petani karet sesuai pokok permasalahan dalam menghadapi fluktuasi harga pada masa pandemi Covid-19 sebagai informan tambahan peneliti akan melakukan wawancara kepada aparat Desa dan pengepul sehingga ingin mengetahui

bagaimana cara mereka bertahan hidup pada kondisi saat ini untuk mendapatkan informasi penelitian.

Dalam penelitian ini digunakan teknik penentuan informan dalam penelitian yang bersifat purposive sampling karena dapat menentukan informan sesuai dengan peneliti butuhkan. Teknik purposive sampling adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan atau kriteria-kriteria tertentu (Sujarweni, 014:72). Dalam hal ini peneliti menetapkan informan dengan kriteria yaitu para keluarga petani karet sedang menghadapi fluktuasi harga pasar pada masa pandemi Covid-19, penduduk usia 25 tahun ke atas yang bekerja sebagai petani karet, keluarga petani karet yang sudah lama bermata pencaharian sebagai petani karet serta keluarga petani karet dalam kondisi ekonomi yang menengah.

Metode penelitian kualitatif deskriptif ini berusaha menggambarkan secara mendalam terhadap situasi dan yang akan diteliti. Metode ini sangat relevan digunakan untuk penelitian guna menjelaskan bagaimana strategi bertahan hidup keluarga petani karet yang meliputi strategi alternative subsistensi, strategi mengikat sabuk lebih kencang, dan strategi jaringan/relasi jaringan social di Desa Jeriji Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan Untuk mencapai tujuan tersebut, maka penelitian menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Keluarga Petani Karet di Desa Jeriji

Desa Jeriji merupakan salah satu Desa yang berada di Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan. Sebagian besar wilayah Desa Jeriji yang dikenal sebagai hasil utama pertanian berupa tanaman karet.

Petani karet di Desa Jeriji masih tergolong sebagai keluarga petani karet tradisional dengan sistem cara pertanian yang masih sederhana yang menggunakan pisau karet. Kehidupan keluarga petani sangat sederhana di Desa Jeriji hal ini terlihat dari ketergantungan petani terhadap pendapatan mereka setiap minggu dengan harga jual beli yang berfluktuasi atau tidak stabil serta kondisi cuaca yang tidak menentu, apalagi pada masa pandemi Covid-19 ini yang membuat harga jual beli karet semakin tidak stabil dikarekan

perusahaan atau pabrik karet mengurangi produksinya.

Nilai jual beli harga karet yang berfluktuasi dan semakin merosot pada masa pandemic Covid-19 bahkan sulit untuk naik lagi dari harga 5 ribu rupiah yang membuat pendapatan keluarga petani karet yang diterima dari hasil bertani karet tidak cukup untuk memenuhi semua kebutuhan keluarga untuk hidup secara layak dan berkecukupan. Penghasilan yang didapatkan masih tergolong rendah dikarekan hal pekerjaannya hanya satu-satunya sebagai petani karet. Jika rata-rata penghasilan yang didapat subjek dari hasil bertani karet sekitar 200.000 - 300.000 rupiah perminggu, pendapatan yang tidak menentu tersebut bisa saja membuat subjek tidak mampu memenuhi semua kebutuhan keluarga karena untuk memenuhi semua kebutuhan dan kelangsungan hidup keluarga diperlukan biaya yang cukup sekitar Rp.1.500.000 perbulan.

Hal ini membuat keluarga petani karet di Desa Jeriji berada pada kondisi kehidupan yang minim atau garis kemiskinan. Kondisi yang minim memaksa sejumlah keluarga petani karet di Desa Jeriji untuk melakukan berbagai macam strategi untuk bertahan hidup, untuk menjaga kelangsungan hidup keluarganya.

B. Kondisi Kehidupan Keluarga Petani Karet di Desa Jeriji pada Masa Pandemic Covid-19

Kondisi yang berada pada garis kemiskinan di Desa Jeriji karena disebabkan oleh Pendapatan ekonomi keluarga pada masa pandemic Covid-19 yakni, pertama: yang dimana Pendapatan atau penghasilan merupakan gambaran yang lebih tepat tentang kondisi ekonomi keluarga petani karet di Desa Jeriji karena hal ini sangat penting untuk memicu kebutuhan hidup, terutama pada pemenuhan kebutuhan pokok keluarga sesuai dengan pendapatan keluarga, kedua: Harga jual beli karet berfluktuasi semakin rendah karena Harga karet merupakan harga yang diberikan oleh pembeli atau pengumpulan pada keluarga petani karet di Desa Jeriji dalam bentuk ukuran rupiah perkilogram dan harga yang berfluktuasi semata-mata tergantung pada kebijakan suatu perusahaan, ketiga: Harga bahan pokok semakin meningkat dimana Konsumsi adalah suatu kegiatan yang bertujuan menggunakan manfaat dari suatu

barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Atau tindakan manusia menikmati kegunaan dari barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup yaitu bahan pokok. Kenaikan harga bahan pokok merupakan salah satu pengaruh terhadap perekonomian dan kondisi kehidupan masyarakat. Banyak masyarakat mengeluh dengan harga bahan pokok semakin menaik apalagi pada masa pandemi Covid-19 salah satunya yakni keluarga petani karet di Desa Jeriji dengan kenaikan harga bahan pokok sangat di rasakan oleh sejumlah keluarga petani karet di Desa Jeriji dengan pendapatan yang kecil dari usaha bertani karet yang diiringi harga karet semakin turun terus menerus.

C. Strategi Bertahan Hidup Keluarga Petani Karet Di Desa Jeriji Pada Masa Pandemi Covid-19

kondisi kehidupan keluarga petani karet di Desa Jeriji, kondisi tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor yang menyebabkan kondisi kehidupan keluarga petani karet berada pada garis kemiskinan. Pada sub pembahasan ini peneliti memaparkan sekaligus membahas secara detail mengenai mekanisme survival bertahan hidup keluarga petani karet di Desa Jeriji yang peneliti temukan dilapangan. Mekanisme survival di sini peneliti definisikan sebagai suatu cara atau strategi bertahan hidup mendahulukan keselamatan keluarga yang digunakan oleh keluarga petani karet di Desa Jeriji dalam menghadapi kondisi sulit yang mereka alami sebagai petani karet. Keluarga petani karet sendiri memiliki strategi bertahan hidup yang berbeda-beda berdasarkan dengan kemampuan yang mereka miliki, yakni: strategi alternative subsistensi, yakni: Keluarga petani karet di Desa Jeriji menjadikan aktivitas bekerja dengan cara memanfaatkan segala potensi yang dimiliki sebagai strategi untuk bertahan hidup dalam menghadapi kondisi sulit yang mereka alami terutama dalam mengatasi permasalahan pendapatan yang kurang cukup dengan rata-rata Rp.700.000- Rp.1000.000 rupiah perbulan, strategi mengikat sabuk lebih kencang, yakni: Keluarga petani karet di Desa Jeriji melakukan biaya penghematan pengeluaran keluarga dengan cara memanfaatkan lahan kecil dibelakang rumah untuk menanam subsistensi

seperti umbi-umbian, papaya dan memanfaatkan hutan untuk memenuhi kebutuhan pangannya, dan strategi jaringan/ relasi jaringan social, yakni: Keluarga petani karet di Desa Jeriji memanfaatkan hubungan antar sesama penjual dan pembeli, memanfaatkan hubungan kekerabatan serta hubungan Patron Klien dalam menghadapi kondisi sulit. Strategi/ mekanisme survival dalam situasi yang krisis untuk tetap bisa mempertahankan susbsitensinya para keluarga petani harus memiliki strategi mempertahankannya, strategi tersebut dalam Scott (1983: 6). Ketiga strategi ini digunakan oleh keluarga petani karet di Desa Jeriji sebagai upaya untuk dapat bertahan hidup.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa strategi yang digunakan oleh para keluarga petani karet di Desa Jeriji dengan melakukan mekanisme survival yakni pertama, strategi alternative subsistensi, strategi bertahan hidup yang dilakukan keluarga petani karet di Desa Jeriji dengan mengoptimalkan sumber daya yang mereka miliki untuk menambah pendapatan mereka. Strategi alternative subsistensi yang dilakukan keluarga petani karet di Desa Jeriji, yaitu mencari pekerjaan sampingan dan peran anggota keluarga seperti istri yang juga ikut mengambil peran bekerja untuk menambah penghasilan yang dilakukan pada masa pandemi Covid-19. Pekerjaan sampingan yang dilakukan yaitu menjadi tukang kayu, berdagang/berjualan kecil-kecilan, ngambil upah (mengambil alih pekerjaan), serta memanfaatkan lahan karet dikebun untuk ditanami tanaman konsumsi untuk dijual. Kedua yakni, strategi mengikat sabuk lebih kencang, strategi yang dilakukan dengan menerapkan pola hidup paling hemat, pendapatan yang tidak menentu menuntut keluarga petani karet di Desa Jeriji untuk menerapkan budaya hidup hemat seperti makan dengan lauk seadanya, menanam tanaman konsumsi dilahan kecil untuk dikonsumsi sendiri, memanfaatkan hutan untuk memenuhi kebutuhan pangannya dan tidak pernah membeli pakaian kecuali hanya lebaran saja. Strategi ketiga yakni, strategi bertahan hidup yang dilakukan dengan cara meminta bantuan/meminjam uang kepada

kerabat, pengepul, pemilik toko, dan relasi lainnya seperti orang koperasi sebagai tambahan untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat dalam penelitian yang sudah penulis selesaikan khususnya kepada pembimbing yang selalu memberikan arahan dan nasihat dalam melakukan penelitian ini serta kepada teman-teman yang ikut serta membantu peneliti dalam melakukan pengambilan data serta telah memberikan semangat dan motivasi dalam proses penelitian yang dilakukan sehingga sudah berjalan dengan baik dan penelitian terselesaikan dengan lancar.

V. DAFTAR PUSTAKA

- Rahman, Bustami & Ibrahim. 2009. *Menyusun Proposal Penelitian Pangkal Pinang : UBB Press*.
- Mukhtar. 2013. *Metode Praktis penelitian deskriptif kualitatif*. Jakarta: Referensi
- Ranjabar, Jacobus. 2014. *Sistem Social Budaya Indonesia Suatu Pengantar*. Alfabeta: anggota ikatan penerbit Indonesia (IKAPI)
- Yusuf, Muri. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*. Kencana: PT Fajar Interpratama Mandiri
- Adi, Isbandi Rukminto. 2018. *Kesejahteraan sosial*. Jakarta: PT RajaGrafindo
- Scott, John. 2012. *Teori Social: Masalah-Masalah Pokok Dalam Sosiologi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- James C. Scott. 1994. *Moral Ekonomi Petani: Pergolakan dan Subsistensi di Asia Tenggara*. Diterjemahkan oleh Hasan Basri, disunting oleh Bur Rasuanto: Jakarta: LP3ES, 1981
- Silalahi, Ulber 2019. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung : Refika Aditama
- Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta
- Satori, Djam'an, dan Aan Komariah, 2009. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- Bungin, Burhan. 2011. *Metode penelitian kualitatif*. Jakarta: Rajawali Pers



*Korespondensi
Email : husniaghata00@gmail.com



Inovbook Publications
Wisma Monex 9th Floor
Jl. Asia Afrika No 133-137 Bandung,
40112



Karya ini dilisensikan di bawah
Lisensi Internasional Creative
Commons Atribusi Nonkomersial
sharelike 4.0.

IMPLEMENTASI MANAJEMEN KELAS PADA SEKOLAH DASAR DALAM UPAYA MENINGKATKAN MOTIVASI BELAJAR PESERTA DIDIK DI MASA PANDEMI COVID-19

Husni Mubarok

Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara | Jalan Taman Siswa,
Pekeng, Jl. Kauman, Kec. Tahunan, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah
59451

Disetujui: 25 Juli 2021

Abstract

This study aims to describe how teachers implement classroom management during the Covid-19 pandemic at SD Negeri 5 Jambu. This study uses a descriptive qualitative approach. The subjects in this study were sixth grade teachers and sixth grade students. The technique used is using observation, participatory interviews, and documentation. Analysis of the data using the interactive model of Miles and Huberman. The results showed that classroom management carried out by teachers in class VI at SDN 05 Jambu during the covid-18 pandemic seemed to have been effective but not yet fully optimal. Class management innovation is needed to optimize the process of student involvement in learning during the COVID-19 pandemic, including 1) Integrated Distance Learning Program (PJJ), 2) Online Learning Synchronization, 3) Hybrid Learning Innovation in Class Management. So, it can be concluded that classroom management carried out by the teacher has something to do with learning motivation. The better in organizing classes will have a positive influence on student learning motivation during the covid-19 pandemic.

Keywords: *Class Management, Learning Motivation, Covid-19, Learning*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan cara guru meimplementasikan manajemen kelas pada masa pandemi Covid-19 di SD Negeri 5 Jambu. Penelitian ini menggunakan pendekatan Kualitatif Deskriptif. Subjek dalam Penelitian ini guru kelas VI dan peserta didik kelas VI. Teknik yang digunakan yaitu menggunakan observasi, wawancara partisipatif, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen kelas yang dilakukan oleh guru dalam kelas VI di SDN 05 Jambu saat pandemic covid-18 terlihat sudah efektif namun belum sepenuhnya optimal. Dibutuhkan inovasi manajemen kelas untuk mengoptimalkan proses keterlibatan siswa dalam pembelajaran di masa pandemic covid -1 9, diantara yaitu 1) Program Belajar Jarak Jauh (PJJ) yang terintegrasi, 2) Online Learning Synchronization, 3) Inovasi Hybrid Learning dalam Manajemen Kelas. Jadi, disimpulkan manajemen kelas yang dilaksanakan oleh guru ada kaitanya terhadap motivasi belajar. Semakin baik dalam mengorganisir kelas akan memberikan pengaruh positif terhadap motivasi belajar siswa saat masa pandemic covid-19.

Kata Kunci: Manajemen Kelas, Motivasi Belajar, Covid-19, Pembelajaran.

I. PENDAHULUAN

Belajar merupakan proses yang kompleks dan akan terjadi pada setiap individu sepanjang hayatnya. Interaksi antara Lingkungan dan seseorang membuat terjadinya proses belajar. Oleh karena itu belajar dapat terjadi kapan dan dimana saja. Proses belajar mengajar yang dilaksanakan di sekolah pendidikan formal mengarahkan pada perubahan individu baik terencana dengan ideal, baik dari segi kognitif, Afektif dan psikomotorik. (Wibowo, 2013) mengatakan bahwa dalam interaksi belajar tersebut sangat dipengaruhi oleh beberapa komponen yang antara lain terdiri atas: murid, guru, kepala sekolah, materi pelajaran, sarana prasarana (perpustakaan), lingkungan dan beberapa fasilitas lain yang memenuhi dalam proses pembelajaran sehingga akan menunjang keefektifan proses pembelajaran

Pandemi Covid 19 ini memberi akibat yang cukup pelik bagi semua masyarakat. Ranah pendidikanpun juga terkena dampak dari virus covid-19 ini. Mulai dari TK sampai Universitas diharuskan menyesuaikan keadaan yang ada. Perkembangan ilmu teknologi dan ilmu pengetahuan semakin mendorong upaya-upaya untuk pembaharuan agar dapat beradaptasi dengan keadaan lingkungan. Maka dari itu, dengan adanya pandemi Covid-19 dewasa ini perlu dilakukan pembaharuan metode belajar, mengingat kemungkinan tertular penyakit yang cukup tinggi apabila kita membuat kerumunan.

Dalam hal pendidikan peran guru sangat penting. Kualitas pendidikan dipengaruhi oleh bagaimana guru memmanifestasikan dan mengaplikasikan kontribusinya ke dalam lembaga pendidikan untuk mewujudkan kecerdasan bangsa dan cita-cita Negara, sehingga hubungan guru dan pendidikan adalah kesatuan yang tidak bisa dipisahkan (Dimayati & Mudjino, 2010).

Sebagaimana kita ketahui Pembelajaran di masa pandemi Covid-19 di sini adalah pembelajaran dengan menggunakan sistem E-learning. Sementara itu pembelajaran yang menggunakan sistem daring merupakan jawaban dari adanya pandemi covid-19 dan langkah untuk agar siswa dapat bersekolah di masa pandemi seperti ini. Oleh karena itu

pelaksanaan Pembelajaran di masa pandemi Covid-19 belum bisa optimal dilaksanakan dan masih menghadapi berbagai permasalahan baik teknis ataupun non teknis. (Rigianti, 2020) mengatakan bahwa permasalahan tersebut timbul dari berbagai aspek baik dari instansi, guru, dan siswa

Di tengah-tengah permasalahan yang melanda, seorang guru harus senantiasa berupaya agar tujuan pembelajaran bisa diraih. Maka dari itu guru harus bisa membuat model pembelajaran yang optimal. Kemampuan guru dalam manajemen kelas sangat dibutuhkan agar pembelajaran menjadi lebih efektif.

Dengan manajemen kelas ini maka siswa akan termotivasi dalam pembelajaran. Manajemen suasana kelas yang pada khususnya merupakan modal penting bagi jernihnya pikiran dalam mengikuti pelajaran, sehingga anak akan merasa nyaman dan antusias. Pembelajaran yang kondusif dan suasana yang cenderung rekreatif, maka akan dapat mendorong siswa untuk siswa untuk mengembangkan potensi dan kreatifitasnya dalam dirinya. (Djamarah, 2010) mengatakan bahwa Pengelolaan kelas adalah suatu upaya memperdayakan potensi kelas yang ada seoptimal mungkin untuk mendukung proses interaksi edukatif mencapai tujuan pembelajaran.

Guru dengan segala kompetensinya juga dituntut untuk mempertahankan keadaan yang positif dalam belajar, sekaligus dituntut untuk mengubah keadaan yang negatif dalam belajar dikelas. Itulah sebabnya seorang guru harus mengetahui cara manajemen kelas yang baik untuk modal awal yang harus dimiliki sebagai seorang manajer kelas. (Mudasir, 2011) mengatakan bahwa keterampilan yang harus dimiliki oleh guru dalam manajemen kelas yaitu: 1) Menata tempat duduk siswa, 2) Menata alat peraga yang ada didalam kelas, 3) Menata kedisiplinan siswa, 4) Menata pergaulan siswa, 5) Menata tugas siswa, 6) Menata ruang fisik, 7) Menata kebersihan dan keindahan kelas, 8) Menata kelengkapan kelas, 9) Menata pajangan siswa. Tanpa manajemen pengaturan yang efektif, maka proses belajar-mengajar akan terganggu dan guru hanya kembali menertibkan dan menegur peserta didik yang menghambat proses belajar-mengajar akibatnya waktu yang digunakan guru untuk mengajar harus terpotong untuk menertibkan peserta didik tersebut.

Jadi, pengelolaan kelas yang efektif merupakan syarat utama agar proses belajarmengajar menjadi lebih kondusif. Dari hal tersebut, Tujuan umum penelitian ini adalah untuk memecahkan masalah yang berkaitan dengan motivasi belajar peserta didik dengan manajemen kelas yang baik.

Terry dalam (Danim & Yunan, 2010) menyatakan Manajemen kelas adalah proses perencanaan, pengorganisasian, aktuasi, dan pengawasan yang dilakukan oleh guru, baik individual maupun dengan atau melalui orang lain (teman sejawat atau siswa sendiri) untuk mencapai tujuan pembelajaran yang efektif dan efisien dengan cara memanfaatkan segala sumber daya yang ada.

Dalam menerapkan manajemen kelas tentunya guru harus mampu memahami kondisi siswa dan lingkungan belajar. Hal ini Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh

(Ningrum, 2017) menyatakan bahwa dalam menerapkan manajemen kelas ada beberapa faktor yaitu, penerapan prinsip-prinsip pengelolaan kelas, merancang lingkungan fisik kelas, menciptakan iklim belajar yang efektif, menjadi komunikator yang baik. Atas dasar inilah peneliti ingin mengetahui seberapa pentingnya manajemen kelas dalam meningkatkan motivasi belajar peserta didik.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengkaji implementasi pengelolaann manajemen kelas oleh guru di masa pandemi Covid-19. Objek kajian pada penelitian ini di Kelas VI SD Negeri 5 Jambu. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Menurut Hadari (Nawai, 2012) "Metode deskriptif diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan / melukiskan keadaan subyek / obyek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya". Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti yaitu dengan observasi, wawancara dan dokumentasi.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan 2 jenis sumber data, yaitu pengambilan data yang dihimpun langsung oleh peneliti dan disebut sumber primer, sedangkan apabila melalui tangan kedua disebut data sekunder. Berdasarkan hal tersebut maka peneliti menggunakan sumber data primer dari

kegiatan observasi yang dilakukan dan kegiatan wawancara langsung kepada guru kelas dan siswa kelas VI SDN 05 Jambu yaitu mengenai pelaksanaan manajemen kelas siswa kelas VI. Sedangkan data sekunder yang diperoleh peneliti adalah berupa dokumentasi yang ada di sekolah dan kajian literatur yang sesuai dengan bidang kajian dalam penelitian ini.

Adapun prosedur analisis data yang digunakan dalam penelitian ini sebagaimana dikemukakan oleh Miles dan Huberman (1992) dalam (Sugiyono, 2016) menyatakan prosedur analisis data terdiri dari tiga alur atau tahapan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilaksanakan di SDN 05 Jambu dengan melakukan pengamatan secara langsung mengenai pelaksanaan pengelolaan kelas pada siswa kelas VI SDN 05 Jambu. Selain melakukan observasi langsung, penulis juga melakukan wawancara terhadap guru kelas VI dan siswa kelas VI. Adapun tujuan dilakukannya wawancara adalah untuk mendapatkan infomasi pelaksanaan pengelolaan kelas di SDN 05 Jambu sebagai pendukung dari hasil observasi yang penulis lakukan. Kemudian penulis juga menggunakan teknik dokumentasi untuk mendapatkan bukti fisik pelaksanaan penelitian. Untuk mendeskripsikan hasil penelitian, sebagai berikut :

A. Proses Pembelajaran di Masa Pandemi

Menciptakan suasana belajar yang menarik merupakan hal penting saat ini, dimana saat ini banyak yang memilih untuk melaksanakan pembelajaran secara tatap maya dan hal ini menuntut pendidik harus memiliki keterampilan untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan menarik di masa pandemic Covid-19. Menurut (Nasir & Jaya, 2020) pengelolaan pembelajaran untuk mencapai suasana belajar yang menyenangkan terlebih dahulu dengan menyiapkan perangkat pembelajaran, media, dan alat evaluasi yang sesuai dengan kondisi siswa saat ini. Evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui keberhasilan yang sudah tercapai dalam pembelajaran.

Pelaksanaan Pembelajaran di SD Negeri 5 Jambu pada masa pandemi covid-19 memberlakukan sistem pembelajaran hybrid learning yaitu pembelajaran yang memadukan sistem pembelajaran online dan offline dengan ditunjang dengan jaringan komputer. Pembelajaran secara hybrid ini untuk menyeimbangkan pengetahuan dan ketrampilan siswa di masa pandemi Covid-19.

Pelaksanaan pembelajaran di masa pandemic covid-19 membuat guru mengalami beberapa hambatan. Berdasarkan hasil wawancara permasalahan Pembelajaran daring yang di hadapi oleh guru terletak pada pengelolaan kelas. Permasalahan pengelolaan kelas meliputi: sulitnya pembimbingan dan pengawasan pembelajaran, sulitnya menanamkan pendidikan karakter siswa, sulitnya menilai secara objektif. Guru diharapkan meningkatkan inovasi dan kreativitas dalam pengelolaan manajemen kelas sehingga siswa tetap termotivasi dalam belajar baik dilakukan secara daring ataupun luring.

Guru menjelaskan bahwa Pembelajaran daring di daerah pedesaan seperti ini tidak akan seoptimal di perkotaan Sebagai contoh saja di awal-awal dilaksanakannya Pembelajaran daring saat pandemi covid melanda, kami mencoba diskusi pada WA Grup dan yang terjadi kami mengalami kesulitan untuk berdiskusi dengan orang tua karena kurangnya pemahaman dan SDM Orang tua. Selain itu ada juga orang tua yang malah acuh tak acuh terhadap instruksi yang berikan untuk anak-anaknya.

Pada pelaksanaan pembelajaran luring, guru lebih menekankan dan me-follow up pembelajaran yang telah disampaikan saat pembelajaran daring. Sistem hybrid learning ini membuat guru bisa mengoptimalkan pembelajaran dengan menyesuaikan kemampuan dan pemahaman siswa.

Guru juga memotivasi siswa agar konsentrasi pelaksanaan pembelajaran berkonsentrasi untuk memusatkan pikirannya pada pembelajaran, tergantung dari cara guru dalam mengelola kelas baik secara fisik maupun non-fisik. Jadi, seorang guru harus selalu memberi semangat terhadap siswanya gar konsentrasi dalam belajar. Sejalan dengan hal tersebut (Susanto, 2017) menyatakan Manajemen pengelolaan kelas merupakan suatu rangkaian tindakan dan usaha yang

dilakukan pendidik untuk menciptakan kondisi yang kondusif dalam proses belajar mengajar.

Kegiatan pembelajaran dimaksudkan agar tercipta kondisi yang terjadinya belajar pada diri siswa. Dalam suatu kegiatan pembelajaran dapat dikatakan terjadi belajar, apabila terjadi proses perubahan perilaku pada diri siswa sebagai hasil dari suatu pengalaman. Pentingnya peran manajemen (pengelolaan) perkembangan siswa (peserta didik) yang dilakukan oleh guru dan orang tua dengan baik, akan tercipta suasana pembelajaran yang efektif, ramah, dan bahkan sopan santun, terutama pendidikan di sekolah maupun di rumah (Moh. Dwi Kurniyawan & S., 2020)

Pembelajaran secara hybrid ini membutuhkan peran dari beberapa pihak. menurut penuturan wali kelas, pembelajaran saat pandemi Covid-19 butuh dukungan penuh dari orang tua untuk menjadi pengajar saat dirumah dan pembimbing anak pada saat pembelajaran daring. Menurut Menurut (Wajdi, 2021) Pembelajaran online membutuhkan peran aktif orangtua dalam mendampingi anaknya belajar, Karena jika tidak mendapat dukungan dari orang tua maka pembelajaran tersebut akan sia-sia. Pembelajaran yang diterapkan harus bervariasi, agar tidak ada kejenuhan yang dialami peserta didik sehingga tujuan pembelajaran tercapai dan pembelajaran yang menyenangkan.

Masa Pandemi Covid-19 ini butuh pengelolaan proses perkembangan yang baik pada siswa. Proses ini merupakan proses internal siswa. Pada belajar dan perkembangan, siswa sendiri yang mengalami, melakukan, dan menghayatinya. Inilah yang dimaksud dengan pembelajaran, dimana proses interaksi terjadi antara guru dengan siswa, yang bertujuan untuk meningkatkan perkembangan mental, sehingga menjadi mandiri dan utuh, disamping itu pula proses belajar tersebut terjadi berkat siswa memperoleh sesuatu yang ada dilingkungan sekitar.

B. Penerapan Manajemen Kelas di Masa Pandemi Covid-19

Upaya untuk menciptakan suasana yang diliputi oleh motivasi siswa yang tinggi, perlu dilakukan manajemen kelas dengan baik. Langkah-langkah ini disebut sebagai prosedur

manajemen kelas. Sesuai hasil penelitian yang dilaksanakan oleh penulis di SD Negeri 5 Jambu menegnai penerapan manajemen kelas saat pandemi covid-19 ini:

1. Pelaksanaan Sesuai Prinsip-Prinsip Manajemen Kelas

1.1. Hangat dan antusias

Hasil pengamatan Fakta di lapangan menunjukkan bahwa semua peserta didik akan senang mengikuti kegiatan belajar di kelas jika gurunya bersikap hangat dan antusias kepada mereka. Hangat dalam konteks manajemen kelas adalah sikap penuh kegembiraan dan penuh kasih sayang kepada peserta didik. Hasil peneltitian kami, guru sudah melaksanakan prinsip hangat dan antusias, tap dalam ikatan emosional dengan peserta didik masih tergolong minim dan variasi pembelajaran relatif monoton. Contohnya dalam pelaksanaan kelas saat pembelajaran daring, terlihat guru sudah sangat semangat dan ceria, namum penggunaan metode sangat monoton. Diharapkan dapat menambah variasi metode pembelajaran baik daring ataupun luring. Hal ini sejalan dengan Penelitian dari Rusmiati, pengorganisasian kelas menjadi kunci terciptanya keberhasilan tujuan pembelajaran yang menyenangkan

1.2. Tantangan

Semangat belajar peserta didik dilandaskan akan kemampuan guru untuk memberikan tantangan kepada siswa. Hal ini akan membuat siswa focus dalam pembelajaran. Guru telah mekukan tantangan dalam pembelajaran, saat pembelajaran daring, guru menggunakan metode tanya jawab secara intensif kepada siswa melalui whatsapp grup.

1.3. Bervariasi

Dalam kegiatan proses pembelajaran saat pandemi covid-19, variasi gaya mengajar guru sangatlah dibutuhkan karena dapat menghindari kejenuhan dan kebosanan. Variasi gaya mengajar seperti variasi intonasi suara, gerak anggota badan, mimik wajah, serta dalam hal penggunaan metode dan media pengajaran yang dilaksanakan baik secara luring atau daring juga diperlukan.

Hasil pengamatan kami guru belum efektif dalam melakukan variasi pembejaran. Guru sering menggunakan model kooperatif

learning seperti ceramah dan ekpositori dalam pembelajaran dalam daring ataupun luring.

1.4. Keluwesan

Keluwesan dalam konteks manajemen kelas merupakan keluwesan perilaku guru untuk mengubah metode mengajar sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan kondisi kelas untuk mencegah kemungkinan munculnya gangguan belajar pada peserta didik serta untuk menciptakan iklim belajar mengajar yang kondusif dan efektif. Guru mengajar sesuai kondisi dan situasi peserta didik, namun pembelajaran sediki terhambat karena faktor peserta didik kelelahan akibat habis olahraga.

1.5. Penekanan pada hal-hal yang positif

Penekanan pada hal-hal yang positif yaitu penekanan yang dilakukan guru terhadap perilaku peserta didik yang positif. Guru telah melaksanakan penekanan hal positif dengan memberikan penguatan positif dalam pembelajaran. Jadi setiap opening pembelajaran, guru selalu menekankan nilai nilai kehidupan yang baik dan pada saat penutup pembelajaran guru memberikan motivasi dan pesan kepada siswa.

1.6. Penanaman disiplin diri

Tujuan dari kegiatan manajemen kelas salah satunya adalah menjadikan peserta didik dapat mengembangkan disiplin pada dirinya sehingga mampu tercipta iklim belajar yang kondusif. Itulah mengapa guru harus mampu menjadi suri tauladan yang baik dan dapat memotivasi siswa untuk melaksanakan disiplin. Guru harus bisa menjadi role model bagi siswa baik itu perilaku, ucapan, dan cara berpenampilan. (Rusmiati, 2017).

2. Merancang Lingkungan Kelas

Berdasarkan hasil penelitian, sebagian guru sudah memperhatikan gaya penyusunan tiap kelas, misalnya pada saat pembelajaran luring dengan mengubah tempat duduk siswa menjadi huruf U, leather L, dua meja dijadikan satudan kursi mengelilingi meja, saling berhadapan, dan berderet ke belakang sesuai dengan materi yang akan disampaikan dengan jarak 1 - 1,5 meter antar siswa. Pada saat pembelajaran daring, guru terlihat sudah merancang lingkungan kelas mulai dari lewat Whatsapp grup, Video WAG, ataupun zoom.

3. Menciptakan Iklim yang Positif untuk Pembelajaran

Gaya manajemen kelas guru di SDN 02 Banjaran ada yang menggunakan gaya otoriter, permisif, dan demokrasi. Namun, ternyata dari hasil penelitian diperoleh bahwa guru lebih condong menggunakan gaya manajemen kelas demokratis. Hal itu dikarenakan karena guru memberikan kesempatan pada siswa untuk mengeluarkan pendapat dan melibatkan siswa dalam aktivitas pembelajaran.

Tim Portal Informasi Pendidikan Sekolah Dasar (2009) mengatakan bahwa gaya manajemen guru yang demokratis lebih mungkin terbinanya sikap persahabatan guru dan siswa dengan dasar saling mempercayai. Namun, ada beberapa kekurangan guru yaitu,

- Pada pembelajaran daring, Guru belum mampu memaksimalkan peran media pembelajaran dan teknologi Informatika yang ada.
- Guru menyampaikan materi pembelajaran menyesuaikan waktu yang ditentukan sehingga pemahaman siswa belum maksimal.
- Guru mengajar hanya dengan metode ceramah secara efektif, tapi terlihat begitu monoton.

4. Menerapkan Peraturan

Berdasarkan hasil penelitian, cara tiap guru agar aturan yang dibuat dapat disepakati bersama pun bermacam-macam, yaitu memberikan hukuman atau hadiah yang masuk akal, menggunakan bahasa yang sopan dan halus, peraturannya jelas dan singkat, serta banyak mengajak siswa untuk berkomunikasi. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Suyanto dan (Jihad & Suyanto, 2013) beberapa saran agar aturan dapat disepakati bersama, yaitu dengan membuat aturan seminimal dan sejelas mungkin, memberikan hadiah atau hukuman yang masuk akal

5. Mengajak Siswa Saling Bekerja Sama

5.1. Mengembangkan Hubungan Positif dengan Siswa

Hasil penelitian diperoleh informasi bahwa cara mengembangkan hubungan positif pada siswa, yaitu melayani siswa dengan sebaik mungkin, memberikan perhatian pada siswa, menjadi sahabat siswa, dan mengajak siswa bermain sambil belajar.

5.2. Saling Berbagi dan Memikul Tanggung Jawab

cara yang dilakukan guru untuk mengajarkan siswa saling berbagi, yaitu dengan memberikan arahan positif pada siswa, melalui pesan dan dorongan. Selain itu, tiap guru juga mengajarkan siswa untuk mengemban tanggung jawab. Pada saat tugas daring bahasa jawa mengenai tugas menceritakan kegiatan di rumah, guru memberikan waktu deadline yang ditentukan. Siswa mengirim tugas video tersebut walaupun ada siswa yang terlambat.

5.3. Menghargai Perilaku yang Pantas

Berdasarkan hasil penelitian, guru memberikan pesan/nasehat dan sanksi pada siswa yang berperilaku kurang baik. konsekuensi harus sesuai dengan perilaku dan harus bertujuan untuk mendorong timbulnya perilaku yang patuh bagi siswa yang berperilaku kurang baik Untuk siswa berperilaku baik, penghargaan paling efektif, yaitu dengan pujian (Santrok, 2009)

6. Menjadi Komunikator yang Baik

6.1. Keterampilan Berbicara

Hasil yang kami dapatkan dalam ketrampilan berbicara, Guru sudah baik dalam menerapkan ketrampilan berbicara dalam pengajaran. Hal ini dibuktikan ketika guru membacakan soal dan materi dengan intonasi yang cukup keras.

6.2. Keterampilan Mendengarkan

Mengelola kelas secara efektif akan menjadi lebih mudah apabila guru dan siswa mempunyai keterampilan baik. Hal ini sejalan dengan (Alrohman, 2013) menjelaskan bahwa pelajar tidak pandai dalam mendengarkan, maka akan berakibat sulit memahami pembelajaran dan kemungkinan akan mengalami kegagalan.

Hasil penelitian didapat hasil bahwa cara membaca bergilir dengan menunjuk siswa secara acak, dan melemparkan pertanyaan tiba-tiba tentang materi yang telah disampaikan. Dengan cara di atas, keterampilan mendengarkan pada siswa dapat meningkat dan siswa menjadi lebih fokus dalam mengikuti kegiatan pembelajaran.

6.3. Komunikasi Nonverbal

Komunikasi nonverbal hanyalah berupa gerakan anggota tubuh untuk mempertegas

maksud yang disampaikan. (Pontoh, 2013) bahwa komunikasi nonverbal adalah komunikasi yang berbaur dengan pembicaraan, misalnya gerakan, ekspresi wajah, gerakan mata, ataupun karakteristik suara. Penggunaan komunikasi nonverbal ketika ada siswa yang berani menjawab saat pembelajaran daring, maka guru memberikan ajungan jempol dan tepuk tangan. Hal ini menandakan sebuah apresiasi dalam bentuk komunikasi nonverbal.

C. Inovasi Manajemen Kelas Pada Masa Pandemi Covid-19

Pandemi covid-19 dan adaptasi kebiasaan baru yang terjadi, guru dan orang tua dituntut untuk mampu dan memahami dalam cara menggunakan serta merealisasikan pembelajaran secara online dengan aplikasi pendidikan yang ada. Harapannya peserta didik dapat berkontribusi dalam pembelajaran secara daring yang diberikan oleh guru. Hal tersebut sesuai apa yang disampaikan oleh (Chan, 2010), penggunaan strategi ini akan menciptakan lingkungan belajar yang lebih menarik dan praktis, yang dapat memberikan pada inovasi dan kreativitas dalam kelas, dan diharapkan individu siap untuk bersaing pada abad21.

Sesuai dengan prinsip kebijakan pendidikan sebagaimana keputusan Mendikbud Nomor: 719/P/2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kurikulum pada Satuan Pendidikan dalam Kondisi Khusus, yakni:(1) peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, keluarga, masyarakat memperbaiki prioritas utama dalam menetapkan kebijakan pembelajaran; (2) Tumbuh kembang, peserta didik dalam kondisi psikososial menjadi hal pertimbangan dalam layanan pendidikan di masa pandemic covid-19.

Pembelajaran pada masa pandemi, sebenarnya dapat membantu guru sebagai pendidik, karena banyaknya alat bantu belajar seperti media terutama aplikasi online yang sudah banyak cara menggunakannya. Hal itu karena, guru memiliki kemampuan yang terbatas. (Groundwater-Smith et al., 2011) kemampuan guru dalam menyampaikan pelajaran mempunyai keterbatasan terutama kemampuan mengartikulasikan materi-materi dalam bentuk verbal

Terlihat pada manajemen Kelas yang diterapkan oleh guru wali kelas terlihat sudah

efektif namun belum maksimal, penulis melihat ada hal-hal yang perlu dilakukan oleh guru yaitu dengan mendesain inovasi manajemen kelas di masa pandemi covid-19 agar proses pembelajaran lebih optimal. Dengan inovasi, kreativitas dan usaha yang terus menerus, sehingga dapat menemukan cara-cara baru dan dapat menjadikan sesuatu yang lebih baik. Guru bisa menerapkan model pembelajaran inovatif yang dipadukan dengan pengelolaan kelas secara online (*digital class*).

Beberapa contoh inovasi Manajemen kelas pada pembelajaran di masa pandemi covid-19 adalah:

1. Program Belajar Jarak Jauh (PJJ) yang terintegrasi

Program pembelajaran pembelajaran ini dengan memadukan dengan model yang inovatif seperti kontekstual (*contextual learning*), model pembelajaran aktif, kreatif, efektif dan menyenangkan (PAKEM) dan Belajar secara Kuantum. Paradigma Teori Mengajar ini Dapat di Implementasikan di Masa Pandemi COVID-19. Pola pembelajaran yang terintegrasi akan membuat manajemen kelas lebih optimal.

2. Online Learning Synchronization

Pembelajaran di masa pandemi covid-19 membutuhkan bantuan sistem pembelajaran yang memberikan kemudahan dengan bantuan Teknologi. Guru harus meningkatkan peran dari teknologi agar bisa memberikan pembelajaran yang inovatif. Guru bisa menggunakan aplikasi online seperti google classroom, edmodo, kine master, google meet, dsb. Penggunaan aplikasi tersebut bisa disinkronkan dengan materi dan gaya belajar siswa. Pengelolaan kelas dengan bantuan teknologi akan membuat pembelajaran semakin menyenangkan dan siswa belajar menjadi fleksibel dimanapun dan kapanpun.

Selain itu, dalam meningkatkan keefektifan manajemen kelas, guru bisa berkordinasi dengan pihak orang tua siswa agar bisa berjalan dengan baik. Maka dari itu perlunya paguyuban orang tua siswa agar edukasi mengenai peran orang tua siswa dalam pembelajaran online di masa pandemi covid-19 bisa terjalin (*Parents education*).

3. Inovasi *Hybrid Learning* dalam Manajemen Kelas

Pembelajaran di masa Pandemi Covid-19 di sekolah dasar harus memiliki sistem dan perencanaan yang baik. Guru harus meningkatkan membuat content pembelajaran yang menarik. Selain itu monitoring dan evaluasi secara rutin juga harus dilakukan untuk memantau progres siswa dalam pembelajaran. Proses pembelajaran secara hybrid akan meminimalisir dampak psikososial di masa pandemi covid-19.

IV. KESIMPULAN

Dari indikator tersebut seluruhnya merupakan aspek dari pengelolaan kelas. Jadi, dapat dikatakan dalam usaha untuk menumbuhkan motivasi belajar pada peserta didik, seluruhnya bergantung pada manajemen kelas yang dilaksanakan. Guru dalam mengelola kelas di SD 5 Jambu belum efektif dalam mengaplikasikan prinsip manajemen kelas saat pandemi Covid-19.

Manajemen Kelas siswa (peserta didik) melalui peran guru sangat penting dilaksanakan dan menjadi perhatian khusus bagi guru bahkan orang tua saat pandemi Covid-19. Pembelajaran pada saat online sebagai strategi pembelajaran masa depan bagi peserta didik. Namun, sarana dan prasarana, pendidik, dan pendamping harus mendukung serta memahami cara penggunaan aplikasi pembelajaran online. Tanpa peran pendampingan orang tua dan guru dalam pembelajaran online tidak akan berjalan dengan baik, sehingga proses pembelajaran di masa pandemic akan terhambat.

Motivasi belajar peserta didik akan tercipta dengan baik, apabila manajemen kelas yang dilaksanakan berjalan dengan baik., dapat disimpulkan bahwa ada kaitannya dengan pengaruh pengelolaan kelas terhadap motivasi belajar siswa. Semakin baiknya cara mengelola kelas atau mengorganisir kelas akan membawa pengaruh positif terhadap motivasi belajar siswa yang dapat memanjang terhadap pembentukan kepribadian siswa. Pengelolaan kelas yang baik akan mempengaruhi suatu motivasi belajar siswa terutama dalam belajar.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan penghargaan dan terima kami penulis tujukan kepada Lembaga Penelitian

dan Pengabdian (LPPM) UNISNU Jepara yang memberikan bantuan dan dukungan sehingga bias menyelesaikan penelitian ini.

V. DAFTAR PUSTAKA

- Alrohmah, N. (2013). *Penerapan Metode Hypnoteaching Berbasis Pemecahan Masalah dalam Pembelajaran Menyimak Informasi*.
- Chan, S. (2010). *Applications of Andragogy in Multi-Disciplined Teaching and Learning*. Journal of Adult Education, 39(2), 25–35.
- Dimayati, & Mudjino. (2010). *Belajar dan Pembelajaran*. Rineka Cipta.
- Djamarah. (2010). *Guru dan anak didik dalam interaksi edukatif* (2010th ed.). Rineka Cipta.
- Groundwater-Smith, S. Le Cornu, R. J., & Ewing, R. (2011). *Teaching: Challenges and dilemmas*. Cengage Learning South Melbourne.
- Jihad, A., & Suyanto. (2013). *Menjadi Guru Professional: Strategi Meningkatkan Kualifikasi dan Kualitas Guru di Era Global*. Esensi.
- Mudasir. (2011). *Manajemen Kelas*. Nusa media.
- Nasir, N., & Jaya, H. N. (2020). *Manajemen Pembelajaran untuk Menciptakan Suasana Belajar Menyenangkan di Masa New Normal*. Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini, 5(2), 1556 - 1566.
- Nawai, H. (2012). *Metode Penelitian Bidang*. Gajah Mada University Press.
- Ningrum, E. P. (2017). *Kemampuan Guru Dalam Pengelolaan Kelas Di Sd Negeri Minomartani*. Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar (Universitas Negeri Yogyakarta), 6(1).
- Pontoh, W. (2013). *Peranan Komunikasi Interpersonal Guru Dalam Meningkatkan Pengetahuan Anak*. Jurnal: 'acta Diurma, 1(1).
- Rigianti. (2020). *Kendala Pembelajaran Daring Guru Sekolah Dasar di Kabupaten Banjarnegara*. 7, 297–302.
- Rusmiati, R. (2017). *Pengelolaan Kelas Rendah Di SD Amaliah Ciawi Bogor*. Jurnal Sosial Humaniora (Universitas Juanda), 7(2).
- Santrok, J. (2009). *Psikologi Pendidikan Edisi 3*. Salemba Humanika.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitiian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.

- Susanto. (2017). *Keterampilan Manajemen Kelas melalui Gerakan Sederhana Senam Otak (Brain Gym) di SD Pelita 2 Jakarta Barat*. Jurnal Abdimas, 3(1).
- Wajdi, F. (2021). *Manajemen Perkembangan Siswa SD Melalui Peran Guru dan Orang Tua pada Masa Pandemi*. JAMP: Jurnal Adminitrasi Dan Manajemen Pendidikan, 4(1), 41-50.
<http://journal2.um.ac.id/index.php/jamp/>
- Wibowo. (2013). *Manajemen Perubahan*. Raja Grafindo Persada.



Korespondensi

Email¹ : shindiadelestari@gmail.com

Email² : iskandarzubb@gmail.com

Email³ : lunafebriani.lf@gmail.com



Inovbook Publications

Wisma Monex 9th Floor

Jl. Asia Afrika No 133-137 Bandung,
40112



Karya ini dilisensikan di bawah
Lisensi Internasional Creative
Commons Atribusi Nonkomersial
sharelike 4.0.

STRATEGI PENANGANAN KONFLIK DENGAN INOVASI SOSIAL

(Studi pada Konflik Perebutan Lahan di Desa
Mempaya, Kecamatan Damar, Kabupaten Belitung
Timur)

Shindi Ade Lestari^{1*}, Iskandar Zulkarnain^{2*}, Luna
Febriani^{3*}

^{1,2,3} Universitas Bangka Belitung | Gang IV No.1, Balun Ijuk,
Merawang, Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka Belitung 33172

Disetujui: 25 Juli 2021

Abstract

The conflict that occurred over environmental issues involved several parties with the focus of their respective sectors. This conflict began in 2003 when the entry of PT. SCHG in the midst of the community has caused a lot of polemics in the surrounding community, in 2009 the PT. SCHG reported one of the communities mining the land to the police, therefore the conflict escalated where the people of Mempaya Village did not accept the actions taken by PT. At the SCHG, the people of Mempaya Village held a demonstration against PT. SCHG because the community did not accept the actions of PT. SCHG reported that the community was mining on land owned by PT. Lead. In the beginning, this conflict only occurred between PT. Timah and PT. SCHG, but in the Mempaya Village community there are community groups, namely the mining community group and the palm oil worker community group, which in these community groups have mutual interests such as the mining community being more pro to PT. Timah because when the land fell to PT. Timah, the mining community can freely mine on the land. and vice versa, the community groups of palm oil workers are more pro to PT. SCHG because when the land fell to PT. SCHG, the community of palm oil workers will not worry about losing their jobs. Therefore, from the conflict over this land, many actors were involved, including PT. Timah, PT. SCHG, mining community groups and palm oil workers community groups. The tendency of land grabbing that occurs between PT. Tin with PT. SCHG started with the planting of oil palm seedlings by PT. SCHG covers an area of 1,950 hectares and claims the land has become their right. The seizure case had been going on from 2003-2011 which was finally won by PT Timah. If viewed legally, the land is owned by PT Timah which has been regulated in the regulations. That is, it can be understood that in this case there is overlapping land access by PT. SCHG on land that should belong to PT Timah. Then a dispute arose that led to a land dispute between the two parties, namely PT Timah and PT. SCHG. The conflict over land that lasted for a long time led to a lot of polemics in the community until in the end the parties involved formed a mutual agreement to resolve the conflict through compensation in the form of a sum of money given by PT. Thanks to PT. SCHG. In this study, researchers used qualitative research methods using a case study approach. The result of this research is the land that is the conflict between our company and PT. That tin, both of our parties have finished making an agreement with each other, which is about the land that has been abandoned from our company so that there is no longer a sustainable form from the side of our company, while from the side of PT. The conflicted land tin has stopped producing. The conflict over land in Mempaya Village, the parties involved in the seizure of the land have no problem with the existence of the land, because the conflict over land grabs in Mempaya Village has made a mutually agreed agreement. Mining

communities and palm oil workers are currently no longer fighting over the land because they already have their respective lands to earn a living, which includes miners' land which cannot be planted with oil palm and which includes oil palm land may not be mined and land that is disputed or disputed. The contested land is no longer used by either the mining community or the palm oil worker community, instead the land is abandoned by the mining community and the palm oil worker community.

Keywords: *Seizure, Land, seizure of land, Conflict, innovation*

Abstrak

Konflik yang terjadi mempermasalahkan isu lingkungan yang melibatkan beberapa pihak dengan fokus sektornya masing-masing. Konflik ini berawal dari tahun 2003 yang dimana masuknya PT. SCHG ditengah-tengah masyarakat sudah banyak menimbulkan polemik dimasyarakat sekitar, pada tahun 2009 pihak PT. SCHG melaporkan salah satu masyarakat yang mernambang dilahan tersebut kepada pihak polisi, maka dari itu konflik pun semakin memuncak dimana para masyarakat Desa Mempaya tidak terima dengan tindakan yang dilakukan oleh pihak PT. SCHG tersebut para masyarakat Desa Mempaya melakukan demonstrasi terhadap PT. SCHG dikarenakan masyarakat tidak terima akan tindakan PT. SCHG yang melaporkan masyarakat menambang dilahan milik PT. Timah. Yang dimana mulanya konflik ini hanya terjadi antara Pihak PT. Timah dan pihak PT. SCHG, akan tetapi didalam masyarakat Desa Mempaya memiliki kelompok masyarakat yaitu kelompok masyarakat penambang dan kelompok masyarakat buruh sawit, yang dimana di kelompok masyarakat ini memiliki kepentingan satu sama lain seperti masyarakat penambang lebih pro kepada PT. Timah karena ketika lahannya jatuh kepada PT. Timah maka masyarakat penambang dengan leluasa menambang dilahan tersebut. dan sebaliknya pun begitu, kelompok masyarakat buruh sawit lebih pro kepada PT. SCHG karena ketika lahannya jatuh kepada PT. SCHG maka masyarakat buruh sawit tidak akan khawatir akan hilangnya pekerjaan. Maka dari itu, dari adanya konflik perebutan lahan ini banyak aktor-aktor yang dilibatkan antara lain pihak PT. Timah, pihak PT. SCHG, kelompok masyarakat penambang dan kelompok masyarakat buruh sawit. Kecendrungan perebutan lahan yang terjadi antara PT. Timah dengan PT. SCHG diawali dengan adanya penanaman bibit sawit oleh PT. SCHG seluas

1.950 Hektar serta mengklaim lahan tersebut sudah menjadi hak mereka. Kasus perebutan tersebut telah berlangsung dari tahun 2003-2011 yang pada akhirnya dimenangkan oleh PT Timah. Jika ditinjau secara hukum, lahan tersebut merupakan kepemilikan PT Timah yang sudah diatur dalam regulasi. Artinya, bisa dipahami dalam hal ini terdapat tumpang tindih akses lahan yang dilakukan PT. SCHG terhadap lahan yang seharusnya menjadi kepemilikan PT Timah. Maka muncul perselisihan yang mengarah kepada konflik perebutan lahan antara kedua belah pihak yakni PT Timah dengan PT. SCHG. Konflik perebutan lahan yang berlangsung lama tersebut banyak memunculkan polemik di masyarakat hingga pada akhirnya pihak-pihak yang terlibat membentuk suatu kesepakatan bersama untuk menyelesaikan konflik melalui kompensasi berupa sejumlah uang yang diberikan PT. Timah kepada PT. SCHG. Penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus. Hasil dari penelitian ini lahan yang menjadi konflik antara perusahaan kami dengan PT. Timah itu, kedua belah pihak kami sudah selesai membuat kesepakatan satu sama lain, yang dimana isinya tentang lahan yang sudah ditinggalkan dari perusahaan kami agar tidak ada lagi bentuk berkelanjutan ini dari sisi perusahaan kami, sedangkan dari sisi PT. Timah lahan yang di konflikkan telah berhenti produksinya. Konflik perebutan lahan di Desa Mempaya, pihak-pihak yang terlibat dalam perebutan lahan tersebut sudah tidak mempermasalahkan keberadaan lahan tersebut, karena konflik perebutan lahan di Desa Mempaya sudah membuat kesepakatan yang di sepakati bersama. Masyarakat penambang dan masyarakat buruh sawit di saat ini sudah tidak berebut lahan tersebut dikarena sudah ada lahan mereka masing-masing untuk mencari nafkah, yang termasuk lahan penambang tidak boleh di tanami sawit dan yang termasuk lahan sawit tidak boleh di tambang dan lahan yang menjadi sengketa atau lahan yang direbutkan tidak lagi di gunakan baik dari masyarakat penambang ataupun masyarakat buruh sawit, malahan lahan tersebut di tinggalkan oleh masyarakat penambang dan masyarakat buruh sawit.

Kata Kunci: Perebutan, Lahan, Perebutan Lahan, Konflik, Inovasi

I. PENDAHULUAN

Konflik merupakan suatu perspektif yang memandang masyarakat sebagai sistem sosial yang terdiri atas beragam kepentingan dimana ada suatu usaha untuk menalkukkan komponen lain guna memenuhi kepentingan tertentu atau memperoleh keuntungan sebesar-besarnya. Konflik yang terjadi dalam masyarakat tidak selalu mengarah pada fungsi yang negatif, konflik juga dapat bersifat positif bagi tatanan suatu masyarakat. Artinya, konflik tidak harus bersifat disfungsional atau merusak sistem yang bersangkutan, karena konflik juga bisa menimbulkan suatu konsekuensi yang bersifat positif. Menurut Coser (dalam Herman, 2015: 174). Konflik sumber daya alam (SDA) merupakan salah satu konflik yang menjadi isu hangat pada masyarakat khususnya wilayah yang memiliki akses sumber daya alam atau lebih dikenal dengan istilah konflik tenurial. Konflik tenurial merupakan permasalahan yang terkait erat dengan persoalan pokok mengenai ketidakadilan. Ketimpangan atau ketidakpastian penguasaan dan pengelolaan tanah beserta segala potensi alam yang dimilikinya menjadi faktor kunci yang mendorong struktur yang tidak adil bagi masyarakat. Tuntutan akan keadilan segera mencuat manakala komunitas masyarakat merasakan sumberdaya yang ada tidaklah memberikan manfaat bagi kehidupan mereka. Berdasarkan persinggungan di atas bahwasanya konflik tenurial umumnya berfokus pada perebutan terhadap akses lahan yang didalamnya terdapat pihak-pihak terlibat baik secara perorangan maupun kelompok. Sama halnya dengan konteks Bangka Belitung khususnya Belitung Timur yang masih cenderung lebih banyak berfokus kepada konflik tenurial.

Orientasi ekonomi masyarakat Bangka Belitung masih tergantung pada sektor pertambangan yang sedikit banyak memberikan pendapatan dari hasil produksi timah. Namun hal tersebut tidak dipungkiri memunculkan beberapa persoalan yang menjadi gejala masyarakat dalam hal akses lahan dalam hal pemanfaatan sumberdaya timah yang cenderung merujuk kepada konflik kepentingan baik dari PT timah sebagai BUMN maupun kelompok usaha lainnya seperti Hutan Tanaman Industri (HTI) kelapa sawit. Konflik tersebut muncul dikarenakan adanya

perebutan akses lahan yang mengarah kepada tumpang tindih dalam cakupan wilayah kerja. Konflik tenurial dengan penyerobotan tanah yang diduga dilakukan perusahaan perkebunan kelapa sawit PT Gunung Pelawan Lestari (GPL) di Dusun Air Abik Desa Gunung Muda Kecamatan Belinyu (Zulkarnain dkk:2018, 93). Hal tersebut berpasasan dengan konflik serupa pada Desa Mempaya yang dimana terdapat perebutan lahan antara PT Timah yang bergerak pada sektor timah dengan PT. SCHG (Sumber Cahaya Hasil Gemilang) yang bergerak pada sektor perkebunan kelapa sawit.

Pada kasus yang sama di Desa Mempaya, konflik yang terjadi mempermasalahkan isu lingkungan yang melibatkan beberapa pihak dengan fokus sektornya masing-masing. Konflik ini berawal dari tahun 2003 yang dimana masuknya PT. SCHG ditengah-tengah masyarakat sudah banyak menimbulkan polemik dimasyarakat sekitar, pada tahun 2009 pihak PT. SCHG melaporkan salah satu masyarakat yang menambang dilahan tersebut kepada pihak polisi, maka dari itu konflik pun semakin memuncak dimana para masyarakat Desa Mempaya tidak terima dengan tindakan yang dilakukan oleh pihak PT. SCHG tersebut para masyarakat Desa Mempaya melakukan demonstrasi terhadap PT. SCHG dikarenakan masyarakat tidak terima akan tindakan PT. SCHG yang melaporkan masyarakat menambang dilahan milik PT. Timah. Yang dimana mulanya konflik ini hanya terjadi antara Pihak PT. Timah dan pihak PT. SCHG, akan tetapi didalam masyarakat Desa Mempaya memiliki kelompok masyarakat yaitu kelompok masyarakat penambang dan kelompok masyarakat buruh sawit, yang dimana di kelompok masyarakat ini memiliki kepentingan satu sama lain seperti masyarakat penambang lebih pro kepada PT. Timah karena ketika lahannya jatuh kepada PT. Timah maka masyarakat penambang dengan leluasa menambang dilahan tersebut. dan sebaliknya pun begitu, kelompok masyarakat buruh sawit lebih pro kepada PT. SCHG karena ketika lahannya jatuh kepada PT. SCHG maka masyarakat buruh sawit tidak akan khawatir akan hilangnya pekerjaan. Maka dari itu, dari adanya konflik perebutan lahan ini banyak aktor-aktor yang dilibatkan antara lain pihak PT. Timah, pihak PT. SCHG, kelompok masyarakat penambang dan kelompok

masyarakat buruh sawit. Kecendrungan perebutan lahan yang terjadi antara PT. Timah dengan PT. SCHG diawali dengan adanya penanaman bibit sawit oleh PT. SCHG seluas 1.950 Hektar serta mengklaim lahan tersebut sudah menjadi hak mereka. Kasus perebutan tersebut telah berlangsung dari tahun 2003-2011 yang pada akhirnya dimenangkan oleh PT Timah. Jika ditinjau secara hukum, lahan tersebut merupakan kepemilikan PT Timah yang sudah diatur dalam regulasi. Artinya, bisa dipahami dalam hal ini terdapat tumpang tindih akses lahan yang dilakukan PT. SCHG terhadap lahan yang seharusnya menjadi kepemilikan PT Timah. Maka muncul perselisihan yang mengarah kepada konflik perebutan lahan antara kedua belah pihak yakni PT Timah dengan PT. SCHG.

Konflik perebutan lahan ini berlanjut sampai meja hijau, pihak PT. Timah dan pihak PT. SCHG sudah beberapa kali melakukan persidangan, pada awal persidangan keputusan majelis hukum menyatakan bahwa PT. SCHG yang memenangkan kasus konflik perebutan lahan ini, karena diawal persidangan masyarakat tidak ikut serta bersaksi dalam persidangan. Akan tetapi disidang terakhir yang dimana masyarakat ikut bersaksi dalam persidangan, keputusan majelis hukum yang menyatakan bahwa pihak PT. Timah memenangkan kasus konflik perebutan lahan tersebut karena hak cipta sepenuhnya ada di PT. Timah.

Dengan adanya konflik tersebut membawa dampak bagi masyarakat disekitarnya, salah satunya hubungan sosial. Hubungan sosial ketika konflik terjadi memiliki hubungan yang renggang dikarenakan mereka memiliki kepentingan-kepentingan yang berbeda satu sama lain. Jika hubungan sosial antara kelompok renggang, maka perekonomian antarkelompok pun juga menurun, karena dengan munculnya konflik banyak aktivitas masyarakat yang terhenti sementara, sehingga masyarakat tidak bisa berkerja. Maka dari itu, kurangnya pendapatan penghasilan yang diperoleh oleh masyarakat sekitar.

Pada saat konflik ini sedang berlangsung terjadi lah berbagai polemik yang terjadi dalam masyarakat yang dimana masing-masing masyarakat umum itu mempunyai kepentingan mereka masing-masing, salah satunya masyarakat yang berkerja sebagai

buruh harian pada saat terjadi konflik perebutan lahan para masyarakat yang berkerja sebagai buruh harian berpihak atau mendukung PT. SCHG karena masyarakat tersebut mempunyai kepentingan tersendiri, kepentingan mereka atas adanya konflik itu, ketika PT. SCHG yang memenangkan konflik lahan tersebut maka masyarakat yang berkerja sebagai buruh harian tidak akan khawatir atas terancamnya hilang pekerjaan mereka sebagai buruh harian di PT. SCHG tersebut, sedangkan di sisi lain masyarakat yang berprofesi sebagai penambang lebih berpihak dan mendukung kepada PT. Timah karena mereka memiliki kepentingan, kepentingan mereka dengan adanya konflik itu, ketika PT. Timah yang memenangkan konflik atas lahan itu maka masyarakat sebagai penambang bisa leluasa menambang di lahan tersebut. Konflik perebutan lahan yang berlangsung lama tersebut banyak memunculkan polemik di masyarakat hingga pada akhirnya pihak-pihak yang terlibat membentuk suatu kesepakatan bersama untuk menyelesaikan konflik melalui kompensasi berupa sejumlah uang yang diberikan PT. Timah kepada PT. SCHG.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus yang dianggap relevan dengan penelitian ini. Pendekatan studi kasus merupakan penyelidikan empiris yang menyelidiki fenomena kontemporer dalam konteks kehidupan nyata (Yin, 1981a, 2009). yaitu penelitian yang terfokus pada suatu kasus tertentu untuk diamati dan dianalisis secara cermat sampai tuntas. Kasus yang dimaksud bisa berupa tunggal atau jamak, misalnya berupa, individu atau kelompok. Sebagai sebuah studi kasus maka data yang dikumpulkan dari berbagai sumber dan hasil penelitian ini hanya berlaku pada kasus yang diselidiki (Groat & wang, 2013).

Sumber data primer diperoleh melalui teknik wawancara dan observasi langsung oleh peneliti. Sumber data primer pada penelitian ini adalah pelaku yang terlibat konflik dan pihak-pihak yang mengetahui konflik. Sedangkan sumber data sekunder berupa dokumen, arsip, studi kepustakaan baik dari media cetak maupun media internet dan lain sebagainya.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Latar Belakang terjadinya konflik

Konflik yang terjadi di Desa Mempaya itu dilatar belakangi dengan adanya kesalah pahaman yang terjadi antara kedua belah pihak yang dimana sebenarnya lahan yang didirikan oleh PT. SCHG itu sebenarnya milik KP timah, pihak PT. SCHG meminta lahan kepada pihak desa dan diberikan lahan tersebut tanpa melihat peta lahan sebelumnya yang dimana lahan yang diberikan pihak desa terhadap PT. SCHG itu sebenarnya milik PT. Timah secara kepemilikan dikarenakan PT. Timah jelas memiliki surat-surat atas lahan tersebut.

lokasi lahan yang diperebutkan sebenarnya milik PT. Timah, sebelum pihak PT. SCHG tidak tahu menahu mengenai dengan kepemilikan lahan tersebut, pihak PT. SCHG meminta lahan tersebut kepada pihak kantor Desa Mempaya dan pihak kantor Desa memberikan lahan tersebut tanpa melihat denah peta lahan terlebih dahulu sebelum memberikan lahan tersebut kepada pihak PT. SCHG, dan ternyata lahan yang ditanami sawit, yang diberikan pihak desa kepada PT. SCHG termasuk kedalam lokasi KP Timah. Jadi pihak PT. SCHG dan pihak PT. Timah 1-1 dalam memanfaatkan lahan tersebut, PT. SCHG mengambil hasil panen sawitnya, sedangkan PT. Timah mengambil timahnya yang ada dilahan tersebut. dan dulu awalnya diantara pihak PT. SCHG dan PT. Timah pernah terjalin hubungan kerjasama, tetapi tidak saling merugikan awalnya, dan masyarakat penambang boleh kerja asal jangan merusak sawit yang ditanam oleh pihak PT. SCHG, dan sebaliknya pun juga begitu boleh karyawan PT. SCHG kerja asal lokasi PT. Timah jangan diambil.

Mereka kan kalau ketemu dengan timah tidak mengerti timah tersebut milik orang apa tidak, akan terkena masalah atau tidak. Pada saat tahun 2011 dimana tahun itu yang menjadi awal terjadinya konflik tersebut masyarakat dan mitra-mitra itu mereka bekerjasama dibawah naungan PT. Timah, multimitra. Jadi mereka bekerja diatas IUP antara PT. Timah dan PT. SCHG. Karena PT. SCHG juga ada surat izin usaha perkebunan dan PT. Timah juga ada surat izin usaha pertambang).

Keinginan masyarakat dan oknum pengusaha yang memang berkecimpung di PT. Timah mereka berspekulasi nambang-nambang disitu dengan oknum masyarakat desa Mempaya. dikemudian hari pihak PT. SCHG mengalami kerugian karena suatu tanam tumbuh diatas ada kelapa sawit. Kelapa sawit itu sudah berproduksi dan selanjutnya PT. SCHG membuat laporan kepihak polisi.

Hal ini lah yang menjadikan faktor utama terjadinya konflik di masyarakat Mempaya, yang dimana adaya kesalah pahaman diantara kedua belah pihak mengenai dengan status kepemilikan lahan tersebut. konflik perebutan lahan ini berawal dari adanya razia yaitu razia tambang konvensional, yang dimana pihak PT. SCHG melaporkan masyarakat Mempaya kepada kalposek, dan akhirnya datang lah kalposek ke Desa Mempaya untuk menangkap masyarakat Penambang di Desa Mempaya tersebut. tapi bapak yuno selaku masyarakat Desa Mempaya mengatakan bahwa jangan tangkap orang kami, pihak kami belum tentu salah dan pihak PT. SCHG juga belum tentu salah dan sebaliknya pihak PT. SCHG belum tentu benar dan pihak kami juga belum tentu benar pak. Jadi tolong cari jalan keluarnya dari masalah ini, jangan sepihak saja.

Dengan terjadinya pelaporan yang dilakukan pihak PT. SCHG terhadap masyarakat penambang, maka dari itu banyak masyarakat desa Mempaya merasa marah dan tidak terima dengan laporan razia tersebut. maka dari itu masyarakat Mempaya bersama sama untuk mencari jalan tengah dari masalah ini maka muncullah inisiatif dari masyarakat Mempaya untuk melakukan demo untuk menyelesaikan permasalahan ini. maka demo lah para masyarakat Mempaya ke PT. Timah untuk meminta kejelasan status kepemilikan lahan tersebut, sekitar 800 massa masyarakat Mempaya yang diikuti sertakan dalam demo ini, dan ternyata pihak PT. Timah mengatakan bahwa lahan itu merupakan lahan kepemilikan mereka.

Maka masyarakat Mempaya merasa ada kekuatan dengan lahan tersebut karena lahan tersebut sudah diberikan oleh pihak PT. Timah terhadap masyarakat setempat, maka terjadilah sidang dikantor desa, terjadilah perdebatan antara pihak PT. SCHG dan PT. Timah tidak putus-putus. Sampai dimana pihak PT. SCHG juga mengatakan bahwa lahan itu juga merupakan kepemilikan mereka, dan PT.

Timah juga menyatakan bahwa lahan itu milik mereka juga. Dari adanya perdebatan yang tidak ada titik temunya maka dari pihak masyarakat untuk menyatakan kebenaran dan sampai di pengadilan meja hijau.

B. Dinamika Konflik

Konflik yang terjadi pada tahun 2003 sampai 2011 ini berawal dari masuknya PT. Sawit ditengah-tengah masyarakat, yang bernama PT. SCHG (Sumber Cahaya Hasil Gemilang) yang kini sekarang sudah berganti nama menjadi PT. PUS (Perusahaan Unggul Sejahtera). Sejak masuknya PT. SCHG ditengah masyarakat sudah bermasalah dengan masyarakat Desa Mempaya. PT. SCHG mengambil alih lahan PT. Timah dengan cara menanam kavling milik PT. Timah dengan ditanami bibit sawit seluas 1.950 hektar. UV timah masyarakat kan mau mencari timah dan pihak PT. SCHG mau memanen sawitnya, diatas punya PT. SCHG dibawah punya PT. Timah. Sekarang awal yang bayar pajak pertama kali dari zaman belanda sampai sekarang PT Timah dan PT. SCHG juga ikut membayar pajak, jadi lahan itu sengketa tumpang tindih.

Awalnya kedua belah pihak saling bekerjasama tapi tidak merugikan yang dimana orang KP boleh bekerja asal tidak merusak sawit, orang PT. SCHG boleh bekerja asal lokasi timah jangan diambil.

Dari razia berlanjut ke demo dan bahkan sampai ke jalur hukum pengadilan, sebelum sampai menuju proses persidangan sudah banyak cara yang ditempuh untuk menyelesaikan permasalahan ini. Sudah sering diadakan pertemuan bagi pihak-pihak yang terlibat tapi itu tidak kunjung selesai sampai harus menempuh jalur hukum.

Pada saat itu masih zaman Bapak Ahok selaku Bupati Belitumg Timur, Pak Ahok tidak akan mengeluarkan HDU sebelum pihak PT. SCHG dengan masyarakat Mempaya telah menemukan jalan tengahnya karena ini awalnya plasma murni ternyata tidak ada satupun batang plasmanya dan kami sekarang tidak mempermasalahkannya itu karena masyarakat kami juga disitu, yang masyarakat penambang nambang lah hak PT. Timah kami tambang, yang hak PT. SCHG tidak kami tambang”.

Setelah banyak jalan yang ditempuh untuk menyelesaikan konflik ini yang berawal dari

mediasi, negosiasi, dan sampai menuju persidangan.

Akhir dari puncak konflik ini di meja hijau persidangan, yang dimana hasil dari persidangan tersebut tidak ada yang menang atau yang kalah, jadi antara pihak PT. Timah dan PT. SCHG berpaham lah untuk berdamai, yang dimana perdamaian ini berisi mengenai tentang timahnya boleh diambil, PT. SCHG pun juga bisa beli timah disitu yang penting di peta HDU kami tidak ada ganggu yang bukan kapling timah dan itu lah solusi dari masyarakat penambang maupun PT. SCHG dan masyarakat yang kerja di PT. SCHG. kalo setahu saya kalo lagi sistem yang kemarin adanya sistem ganti rugi kalo misalnya orang nambang timah mengambil timah tetapi sawitnya roboh maka akan digantilah, terjadilah kemarin penggantian ganti rugi.

Dari adanya konflik ini banyak dampak dapat dirasakan oleh masyarakat setempat khususnya masyarakat penambang dan masyarakat buruh sawit. dampaknya itu lah awal terjadinya mau sama-sama menang, disisi lain kami masyarakat penambang mau menang, PT. SCHG pun juga mau menang. Jadi ini dibenturkan oleh PT. SCHG antara masyarakat Penambang dan masyarakat kerja buruh sawit, jangan sampai kami tempur sekampung. Karena sama-sama kerja di kampung, masyarakat kampung juga yang kerja di PT. SCHG, masyarakat kampung juga yang nambang. Istrinya kerja di PT. SCHG sedangkan lakinya kerja nambang timah. Jadi susah akhirnya mencari jalan tengah jadi yang terbaiklah, jadi pihak PT. SCHG tidak keberatan UV timah ditambang sampai selesai.

Dampaknya kepada karyawan PT. SCHG yang awalnya 1.200 Hektar menjadi 800 Hektar, otomatis kekurangan karyawan, karyawannya banyak dimutasikan dan dipesiun dini. Lahannya dikit tetapi karyawannya lebih banyak daripada lahan makannya muncullah mutasi dan pesiun dini karyawan.

Dengan adanya konflik ini banyak yang merasakan dampak dari konflik ini salah satunya pihak yang dirugikan adalah para pekerja buruh sawit PT. SCHG. dengan adanya konflik ini kami selaku pekerja buruh sawit merasa dirugikan karena banyak dari kami pekerja buruh sawit dimutasi, diberhentikan, bahkan di pesiun dini karena lahannya

berkurang yang dulunya 1.950 hektar menjadi 800 hektar.

C. Aktor-aktor yang terlibat

Menurut Amr Abdalla melalui model SIPABIO (2012, dikutip dari novri susan, 2012:98). Aktor konflik merupakan pihak berkonflik dalam bentuk individu maupun kelompok yang berpartisipasi dalam konflik. Pihak berkonflik dibagi menjadi beberapa, antara lain pihak utama yang secara langsung berhubungan dengan kepentingan, pihak sekunder yang tidak secara langsung terkait dengan kepentingan. Konflik perebutan lahan di Desa Mempaya melibatkan beberapa pihak. Pihak utama yang terlihat secara langsung adalah pihak PT. Timah, pihak PT. SCHG, masyarakat penambang, dan masyarakat buruh sawit. Aktor utama konflik, yaitu PT. Timah dan PT. SCHG yang terlibat secara langsung dalam konflik perebutan lahan di Desa Mempaya. pihak-pihak yang terlibat dalam konflik lahan di Desa Mempaya, yaitu Masyarakat Penambang dan Masyarakat Buruh Sawit.

Masyarakat penambang dan masyarakat buruh sawit, pihak desa, jadi sengketa ini diselesaikan dengan cara musyawarah melalui persidangan karena PT. SCHG mau sidang dia tidak mau kalah jadi sidang yang akan menentukannya, persidangan terjadi kurang lebih 5-7 kali rasa aku, banding terus dan bahkan naik banding terus-menerus. dengan adanya konflik masing-masing pihak memiliki perannya masing-masing.

PT. Timah memihak kepada masyarakat penambang dan itu hak mereka, disisi lain mereka tidak mau dari konflik ini sampai terjadi unsur kekerasan, baku hantam. Kedua belah pihak karena sesama masyarakat desa mempaya yang menimatinnya dan pendamaiannya disitu.

Jadi untuk selanjutnya kemarin untuk take over dari awal ke yang sekarang jadi mereka manajemen mengambil kesimpulan bahwa kerjasama itu diambil dilihat dari PT. TIN kemarin, diambil PT. TIN iya sekarang diambil 10 Hektar kena Lokasi KP Timah olah lah dari PT. Timah tapi hasilnya diambil dari PT. TIN. PT. TIN (satu penambang dan satunya perkebunan).

D. Rekonsiliasi Konflik

Konflik bisa reda ketika kedua belah pihak mengadakan perdamaian dan tidak diperpanjang. konflik itu hanya bisa reda karena perdamaian kedua belah pihak dan sekarang tidak bermasalah, Jadi untuk kesepakatan selanjutnya yang KP Timah yang sudah diukur tidak diambil dari PT. SCHG, dari karyawannya ditinggalkan karena jangan sampai ada konflik yang baru lagi.

Konflik yang terjadi antara pihak PT. Timah dan PT. SCHG bisa reda dengan cara meminimalisir diantara kedua belah pihak yang terjadi satu sama lain, diantara pihak pt. Timah dan pihak PT. SCHG menarik semua pengawainya agar tidak bekerja diwilayah yang dikonflikkan, pihak PT. SCHG wilayah yang diperebutkan diabaikan, tidak dirawat, tidak dipanen dan ditinggalkan oleh pihak PT. Timah.

Upaya yang dilakukan pihak-pihak yang terlibat untuk menyelesaikan konflik perebutan lahan adalah dengan cara membuat sebuah kesepakatan yang telah disepakati bersama antara PT. SCHG dan PT. Timah.

Lahan yang menjadi konflik antara perusahaan kami dengan PT. Timah itu, kedua belah pihak kami sudah selesai membuat kesepakatan satu sama lain, yang dimana isinya tentang lahan yang sudah ditinggalkan dari perusahaan kami agar tidak ada lagi bentuk berkelanjutan ini dari sisi perusahaan kami, sedangkan dari sisi PT. Timah lahan yang di konflikkan telah berhenti produksinya.

Dan dimana adanya kesepakatan pembagian lahan oleh PT. SCHG dan disepakati oleh PT. Timah. Selain adanya bentuk kesepakatan itu, pihak perusahaan PT. SCHG dan PT. Timah juga membuat kesepakatan yang disepakati bersama yang berisi mengenai tentang ganti rugi kompensasi berupa uang.

Kalau upaya mencapai kesepakatan itu dari kami masyarakat, PT. SCHG rapat dikantor desa, pihak sawit undang, pihak timah diundang, aparat-aparat terkait diundang, aparat pemerintah, dinas kehutanaan, perkebunan jadi semuanya turunlah untuk menyelesaikannya dan akhirnya damai.

Setelah adanya perdamaian di kedua belah pihak, maka masing-masing pihak memiliki hubungan yang baik sekarang satu sama lain, hubungan antara masyarakat penambang dan masyarakat buruh sawit

sudah membaik tidak ada lagi yang diperebutkan walaupun kerja di satu lokasi.

E. Inovasi Sosial Sebagai Penanganan Konflik

Inovasi adalah ide atau gagasan yang diterima dan disadari sebagai suatu hal yang baru dari sebelumnya, sedangkan Inovasi sosial adalah gagasan atau ide baru yang dilakukan untuk mengatasi masalah sosial masyarakat, melibatkan perubahan hubungan kelembagaan (kolaborasi), meningkatkan kapasitas juga kesejahteraan masyarakat, dan meningkatkan peluang jangka panjang atau keberlanjutan. Berdasarkan pendapat Moulaert et. al. (2017: 25), inovasi sosial memiliki kriteria sebagai berikut: 1) mengatasi permasalahan sosial, 2) menciptakan hubungan kelembagaan baru (kolaborasi), 3) Meningkatkan kapasitas, 4) Meningkatkan kesejahteraan, dan 5) Keberlanjutan. Berdasarkan data yang diperoleh peneliti di lapangan, konflik perebutan lahan di selesaikan di persidangan meja hijau, dengan cara adanya kesepakatan yang di sepakati bersama, Pihak PT. SCHG dan PT. Timah 1-1 pembagiannya, yang dimana PT. SCHG mengambil hasil dari lahan, sedangkan PT. Timah mengambil timah yang sudah menjadi hak mereka, karena dulu PT. SCHG dan PT. Timah kerjasama tapi tidak saling merugikan.

Pihak PT. SCHG boleh kerja asalkan lokasi PT. Timah jangan diambil, sedangkan boleh masyarakat Penambang kerja asal jangan rusak sawit. Ganti rugi itu ada ketika masyarakat penambang kerja ngambil timah tapi sawitnya roboh maka terjadilah ganti rugi. Kapling timah yang sudah diukur tidak diambil dari PT. SCHG dan ditinggalkan dari PT. SCHG. Yang menjadi UV timah akan ditambang sampai selesai dan Pihak PT.SCHG tidak keberatan. Timahnya boleh diambil, pihak PT. SCHG pun juga bisa beli timah dsitu, yang penting dipeta HDU tidak diganggu dari masyarakat penambang yang bukan kapling timah. Dan dimana adanya kesepakatan pembagian lahan oleh PT. SCHG dan disepakati oleh PT. Timah. Selain adanya bentuk kesepakatan itu, pihak perusahaan PT. SCHG dan PT. Timah juga membuat kesepakatan yang disepakati bersama yang berisi mengenai tentang ganti rugi kompensasi berupa uang jika seandainya masyarakat penambang merusak sawit ketika menambang.

Konflik perebutan lahan di Desa Mempaya, pihak-pihak yang terlibat dalam perebutan lahan tersebut sudah tidak mempermasalahakan keberadaan lahan tersebut, karena konflik perebutan lahan di Desa Mempaya sudah membuat kesepakatan yang di sepakati bersama. Masyarakat penambang dan masyarakat buruh sawit di saat ini sudah tidak berebut lahan tersebut dikarena sudah ada lahan mereka masing-masing untuk mencari nafkah, yang termasuk lahan penambang tidak boleh di tanami sawit dan yang termasuk lahan sawit tidak boleh di tambang dan lahan yang menjadi sengketa atau lahan yang direbutkan tidak lagi di gunakan baik dari masyarakat penambang ataupun masyarakat buruh sawit, malahan lahan tersebut di tinggalkan oleh masyarakat penambang dan masyarakat buruh sawit, karena masyarakat penambang dan masyarakat buruh sawit mngambil jalan tengahnya agar tidak ada konflik yang berkelanjutan setelah adanya kesepakatan yang disepakati bersama.

Dengan adanya kesepakatan yang di sepakati bersama. Oleh karena itu, konflik perebutan lahan tersebut terselesaikan dengan semestinya dan konflik perebutan lahan itu tidak akan terjadi kembali, di karenakan telah ditemukan cara yang baik untuk menyelesaikannya dengan cara berbagai kesepakatan yang disepakati bersama.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, peneliti mengenai Strategi Penangan Konflik dengan Inovasi Sosial (Studi pada Konflik Lahan di Desa Mempaya, Kecamatan Damar, Kabupaten Belitung Timur), hasil temuan di lapangan dapat disimpulkan bahwa:

Konflik yang terjadi pada tahun 2003 sampai 2011 ini berawal dari masuknya PT. Sawit ditengah-tengah masyarakat, yang bernama PT. SCHG (Sumber Cahaya Hasil Gemilang) yang kini sekarang sudah berganti nama menjadi PT. PUS (Perusahaan Unggul Sejahtera). Sejak masuknya PT. SCHG ditengah masyarakat sudah bermasalah dengan masyarakat Desa Mempaya. PT. SCHG mengambil alih lahan PT. Timah dengan cara menanam kavling milik PT. Timah dengan ditanami bibit sawit seluas 1.950 hektar.

Konflik yang terjadi di Desa Mempaya itu dilatar belakang dengan adanya kesalah

perjalanan mencari dukungan dan menggugah simpati masyarakat, kaitannya dengan pemilu legislatif tentu melibatkan berbagai orang-orang tertentu seperti orang kuat lokal ataupun orang yang berpengaruh di suatu lingkungan yang dikondisikan baik secara terstruktur ataupun tidak.

pahaman yang terjadi antara kedua belah pihak yang dimana sebenarnya lahan yang didirikan oleh PT. SCHG itu sebenarnya milik KP timah, pihak PT. SCHG meminta lahan kepada pihak desa dan diberikan lahan tersebut tanpa melihat peta lahan sebelumnya yang dimana lahan yang diberikan pihak desa terhadap PT. SCHG itu sebenarnya milik PT. Timah secara kepemilikan dikarenakan PT. Timah jelas memiliki surat-surat atas lahan tersebut.

Lahan tersebut sudah diberikan oleh pihak PT. Timah terhadap masyarakat setempat, maka terjadilah sidang di kantor desa, terjadilah perdebatan antara pihak PT. SCHG dan PT. Timah tidak putus-putus. Sampai dimana pihak PT. SCHG juga mengatakan bahwa lahan itu juga merupakan kepemilikan mereka, dan PT. Timah juga menyatakan bahwa lahan itu milik mereka juga. Dari adanya perdebatan yang tidak ada titik temunya maka dari pihak masyarakat untuk menyatakan kebenaran dan sampai di pengadilan meja hijau.

Akhir dari puncak konflik ini di meja hijau persidangan, yang dimana hasil dari persidangan tersebut tidak ada yang menang atau yang kalah, jadi antara pihak PT. Timah dan PT. SCHG berpaham lah untuk berdamai, yang dimana perdamaian ini berisi mengenai tentang timahnya boleh diambil, PT. SCHG pun juga bisa beli timah disitu yang penting di peta HDU kami tidak ada ganggu yang bukan kapling timah dan itu lah solusi dari masyarakat penambang maupun PT. SCHG dan masyarakat yang kerja di PT. SCHG. kalo setahu saya kalo lagi sistem yang kemarin adanya sistem ganti rugi kalo misalnya orang nambang timah mengambil timah tetapi sawitnya roboh maka akan digantilah, terjadilah kemarin pengantian ganti rugi.

Konflik bisa reda ketika kedua belah pihak mengadakan perdamaian dan tidak di perpanjang, konflik itu hanya bisa reda karena perdamaian kedua belah pihak dan sekarang tidak bermasalah, Jadi untuk kesepakatan selanjutnya yang KP Timah yang sudah diukur

tidak diambil dari PT. SCHG, dari karyawannya ditinggalkan karena jangan sampai ada konflik yang baru lagi. Upaya yang dilakukan pihak-pihak yang terlibat untuk menyelesaikan konflik perebutan lahan adalah dengan cara membuat sebuah kesepakatan yang telah disepakati bersama antara PT. SCHG dan PT. Timah.

lahan yang menjadi konflik antara perusahaan kami dengan PT. Timah itu, kedua belah pihak kami sudah selesai membuat kesepakatan satu sama lain, yang dimana isinya tentang lahan yang sudah ditinggalkan dari perusahaan kami agar tidak ada lagi bentuk berkelanjutan ini dari sisi perusahaan kami, sedangkan dari sisi PT. Timah lahan yang di konflikkan telah berhenti produksinya.

Dan dimana adanya kesepakatan pembagian lahan oleh PT. SCHG dan disepakati oleh PT. Timah. Selain adanya bentuk kesepakatan itu, pihak perusahaan PT. SCHG dan PT. Timah juga membuat kesepakatan yang disepakati bersama yang berisi mengenai tentang ganti rugi kompensasi berupa uang.

Kalau upaya mencapai kesepakatan itu dari kami masyarakat, PT. SCHG rapat di kantor desa, pihak sawit undang, pihak timah diundang, aparat-aparat terkait diundang, aparat pemerintah, dinas kehutanan, perkebunan jadi semuanya turunlah untuk menyelesaikannya dan akhirnya damai.

Setelah adanya perdamaian di kedua belah pihak, maka masing-masing pihak memiliki hubungan yang baik sekarang satu sama lain. hubungan antara masyarakat penambang dan masyarakat buruh sawit sudah membaik tidak ada lagi yang diperebutkan walaupun kerja di satu lokasi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Selesainya penelitian ini, saya banyak mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah terlibat dalam penelitian yang sudah saya selesaikan khususnya kepada kedua pembimbing saya dalam melakukan penelitian ini serta kepada teman-teman saya yang ikut serta membantu mensukseskan saya dalam melakukan pengambilan data serta telah memberikan semangat dan motivasi dalam proses penelitian yang saya lakukan sehingga sudah berjalan dengan baik dan penelitian saya sudah terselesaikan dengan lancar.

V. DAFTAR PUSTAKA

- Soekanto, Soerjono. 2014. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Rusdiana, A. 2015. *Manajemen Konflik*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Susan, Novri. 2009. *Pengantar Sosiologi Konflik*. Jakarta: Kencana.
- Susan, Novri. 2009. *Sosiologi Konflik dan Isu-isu Kontemporer*. Jakarta: Kencana.
- Ibrahim. 2015. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Mukhtar. 2013. *Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Wirawan, I.B. 2012. *Teori-Teori Sosial Dalam Tiga Paradigma (Fakta Sosial, Definisi Sosial, dan Perilaku Sosial)*. Cetakan ke-1. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Yadiman, Dahniel. 2013. *Konflik sosial dan anarkisme*. Yogyakarta: CV ANDI OFFSET.
- Rahman, Bustami dan Ibrahim. 2009. *Menyusun Proposal Penelitian*. Pangkalpinang: UBB Press.
- Scott, John. 2012. *Teori sosial : Masalah-masalah Pokok dalam Sosiologi*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Manajemen*. Bandung : Alfabeta.
- Sujarweni, Wiratna. 2014. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Limbong, Bernhard. 2012. *Konflik Pertanahan*. Jakarta: Pustaka Margaretha.



Korespondensi

Email¹ : cindyfbrn00@gmail.com

Email² : lunafebriani.lf@gmail.com

Email³ : iskandarzubb@gmail.com



Inovbook Publications

Wisma Monex 9th Floor

Jl. Asia Afrika No 133-137 Bandung,
40112



Karya ini dilisensikan di bawah
Lisensi Internasional Creative
Commons Atribusi Nonkomersial
sharelike 4.0.

ANALISIS FENOMENA TREN BERSEPEDA DI MASA PANDEMI PADA *NOOB FOLDING BIKE COMMUNITY BANGKA*

**Cindi Febriana^{1*}, Luna Febriani^{2*}, Iskandar
Zulkarnain^{3*}**

^{1,2,3} Universitas Bangka Belitung | Gang IV No.1, Balun Ijuk,
Merawang, Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka Belitung 33172

Disetujui: 25 Juli 2021

Abstract

This study analyzes the phenomenon of cycling trend during the pandemic at NOOB Folding Bike Community Bangka. This study aims to find out the members' motivations that make them interested to join the community and to identify the cycling trend at NOOB Folding Bike Community Bangka during the pandemic. The method used in this study was a qualitative method along with a descriptive analysis approach. In addition, the data collection techniques were observations, direct interviews, and documentation. This study applies the theory of the consumer society proposed by Jean Baudrillard including the concepts of use value, sign value, and simulation in order to analyze the problems in this research. The results of this study portray that the phenomenon of the cycling trend during the pandemic at NOOB Folding Bike Community Bangka is developed through social media. Additionally, this trend is also a form of lifestyle change caused by the environmental situation where the society is currently facing the covid-19 pandemic that eventually creates a new habit in daily life. The emergence of this trend eventually provides a new way of self-change to take better care of health during the pandemic. Initially, this trend is used to fulfill the health need, however, it is currently developed to fulfill other needs since consuming a recent trend can shape an existence and social identity for the members of NOOB Folding Bike Community Bangka.

Keywords: *Phenomenon, Cycling Trend, NOOB Folding Bike Community Bangka, Pandemic*

Abstrak

Penelitian ini mengkaji tentang analisis fenomena tren bersepeda di masa pandemi pada NOOB Folding Bike Community Bangka. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui motivasi para anggota tertarik bergabung dalam komunitas tersebut dan mengidentifikasi tren bersepeda pada *NOOB Folding Bike Community Bangka* di masa pandemi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan melakukan observasi, wawancara langsung, dan dokumentasi. Teori yang digunakan untuk menganalisis permasalahan dalam penelitian ini adalah teori masyarakat konsumsi dari Jean Baudrillard yang mana pada konsep mengenai nilai guna, nilai tanda dan simulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fenomena tren bersepeda di masa pandemi pada *NOOB Folding Bike Community Bangka* berkembang melalui media sosial dan juga bentuk perubahan gaya hidup yang didukung oleh situasi lingkungan yang sedang menghadapi pandemi covid-19 yang pada akhirnya menciptakan kebiasaan baru dalam kehidupan sehari-hari. Kemunculan tren ini akhirnya memberikan cara baru dalam perubahan diri individu untuk lebih menjaga kesehatan dimasa pandemi, awalnya tren bersepeda di masa pandemi guna sebagai

kebutuhan kesehatan, namun tren ini berkembang kearah kebutuhan lain, karena mengkonsumsi sebuah tren yang sedang berkembang saat ini dapat membentuk sebuah eksistensi dan identitas sosial bagi anggota yang tergabung pada *NOOB Folding Bike Community Bangka*.

Kata Kunci: Fenomena, Tren Bersepeda, *NOOB Folding Bike Community Bangka*, Pandemi

I. PENDAHULUAN

Sejak kasus pertama diumumkan pada 2 Maret 2020, untuk pertama kalinya pemerintah mengumumkan dua kasus pasien positif Covid-19 di Indonesia. Lonjakan pasien positif Covid-19 terus terjadi dan kian meningkat di setiap harinya. Penyakit virus Covid-2019 (*corona virus disease/COVID-19*) merupakan sebuah nama baru yang diberikan oleh World Health Organization (WHO) penyakit ini ditetapkan sebagai pandemi karena seluruh warga dunia berpotensi terkena infeksi penyakit COVID-19. Dalam istilah kesehatan, pandemi berarti terjadinya wabah suatu penyakit yang menyerang banyak korban, serempak di berbagai negara. Sementara itu, dikutip dari Huffpost, Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit AS (CDC) menjelaskan bahwa virus Corona Covid-19 biasanya tersebar melalui tetesan atau droplet ketika orang yang terinfeksi bersin atau batuk dan juga melalui benda yang terkontaminasi.

Pada situasi pandemi Covid-19 seperti saat ini sangat berdampak pada semua sektor, terutama sektor kesehatan. Semua orang memiliki kewajiban untuk melindungi diri sendiri maupun orang lain, dengan cara menerapkan protokol kesehatan yang baik dan benar, serta menjaga kesehatan tubuh agar tetap sehat dengan menerapkan gaya hidup sehat seperti menjaga asupan gizi yang baik, istirahat yang cukup, dan juga melakukan aktivitas fisik secara rutin yakni dengan berolahraga. Di berbagai kota di Indonesia, olahraga yang saat ini sedang banyak di gemari oleh masyarakat modern dari seluruh kalangan usia adalah tren bersepeda.

Fenomena tren bersepeda yang sedang banyak digemari oleh masyarakat Bangka Belitung ini juga diharapkan dapat membantu menjaga kesehatan tubuh selama masa pandemi. Tren bersepeda kini digemari

lantaran banyak yang beranggapan bahwa bersepeda memungkinkan penggunaannya untuk tidak berdekatan dan menjaga jarak satu sama lain sesuai dengan larangan pemerintah tentang protokol kesehatan yang salah satunya dengan cara menjaga jarak. Namun, saat ini muncul beragam komunitas sepeda dengan kegiatan bersepeda bersama, yang mana justru memicu terjadinya perkumpulan antara anggota komunitas.

Fenomena tren yang sedang populer saat ini tentunya mempunyai pengaruh terhadap masyarakat modern untuk mengonsumsi tren tersebut sebagai suatu bentuk konsumsi masyarakat modern. Menurut Martono (2012:89) bahwa masyarakat modern memiliki pergeseran pada distribusi gengsi sosial. Gengsi sosial tidak hanya diwujudkan dalam berbagai simbol fisik, misalnya cara berpakaian, atau melalui atribut yang melekat pada seseorang, namun penunjukan status individu dapat dilihat dalam simbol-simbol nonfisik, misalnya pemilihan tempat makan, tempat belanja, merk baju yang dikenakan, dapat menunjukkan status sosial seseorang, dan inilah yang disebut sebagai masyarakat konsumsi.

Lebih daripada itu masyarakat modern bisa dikatakan hidup dalam suatu budaya, yaitu budaya konsumen dimana konsumsi mempengaruhi kehidupan sehari-hari dalam keseharian masyarakat. Dalam kehidupan sosial masyarakat nilai-nilai, pemaknaan dan harga dari segala sesuatu yang dikonsumsi menjadi semakin penting dalam pengalaman individu. Secara nyata kegiatan konsumsi pada masyarakat modern dapat dilihat dan dibuktikan melalui bagaimana rasionalitas konsumsi telah beroperasi pada masyarakat budaya konsumtif. Setiap harinya begitu banyak waktu yang biasa dihabiskan untuk berkonsumsi, berpikir tentang apa yang akan dikonsumsi serta menyiapkan apa yang akan dikonsumsi. Sebagian besar orang akan merasa memerlukan pekerjaan untuk bisa berkonsumsi, melanjutkan pendidikan demi bisa berkonsumsi lebih baik, menilai orang lain dengan apa-apa yang dikonsumsinya, menunjukkan identitas diri dengan benda-benda konsumsi, serta segala sesuatu hal yang berhubungan dengan orang lain berdasarkan keterikatannya pada benda-benda yang dikonsumsi, dan lain sebagainya.

Dalam kehidupan sosial pada saat ini masyarakat hidup dalam suatu budaya yang mengedepankan gaya hidup dimana masyarakat modern mengonsumsi hal-hal baru yang biasa disebut dengan budaya populer. Salah satu bentuk budaya populer yang disenangi masyarakat modern saat ini ialah mengonsumsi sebuah tren, tren pada umumnya merupakan sebuah bentuk respon positif masyarakat terhadap suatu hal yang baru sehingga banyak yang mengikuti tren tersebut, mereka akan mengikuti tren tersebut sepanjang tren tersebut masih populer dan fenomenal dikalangan masyarakat, salah satunya tren yang populer pada masa pandemi saat ini yaitu tren bersepeda.

Meningkatnya tren bersepeda di masa pandemi juga disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya ialah peran dari komunitas (Yang, 2010). Salah satu komunitas sepeda yang menarik untuk diteliti oleh peneliti yaitu NOOB Folding Bike Community Bangka yang terbentuk pada masa pandemi di bulan Juni 2020, yang mulanya diawali hanya beranggotakan 2 orang dan terus bertambah hingga saat ini sudah mencapai 22 orang dengan jumlah laki-laki sebanyak 15 orang dan perempuan 7 orang. Pekerjaan anggota dari komunitas ini pun beragam tidak hanya berada pada satu instansi saja, sebagian dari mereka ada yang bekerja sebagai PNS, karyawan swasta, dan mayoritas pekerja kontrak. Usia anggota komunitas yang tergabung pun beragam dari usia 20-30 tahun dengan etnis dan juga agama yang berbeda.

Pada komunitas NOOB ini pun memiliki sistem perekrutan anggota hanya dengan cara mengikuti bersepeda bersama para anggota selama 3 kali dan kemudian sudah dapat bergabung pada komunitas tersebut. Untuk merk sepeda yang digunakan anggota komunitas pun bervariasi seperti pasific noris, ecosmo, pikes, police, dan MTB pasific dengan range harga mulai dari 3jt-10jt. Kegiatan yang dilakukan oleh komunitas yang terbentuk di masa pandemi ini yaitu bersepeda bersama sebanyak 2 kali dalam seminggu. Selain bersepeda bersama para anggota komunitas NOOB mereka juga sering gowes bareng dengan komunitas sepeda yang serupa setelah bersepeda mereka nongkrong bersama para anggota di salah satu angkringan di alun-alun lapangan merdeka Pangkalpinang.

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait fenomena tren bersepeda di masa pandemi pada NOOB Folding Bike Community Bangka dan faktor yang mempengaruhi individu bergabung pada komunitas tersebut. Hal ini dikarenakan, sesuai dengan perkembangan zaman dan juga dalam situasi pandemi saat ini tren yang bermunculan tentu akan merubah perilaku konsumsi pada masyarakat modern.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan metode pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Teknik penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan purposive sampling.

Data yang dihasilkan setelahnya akan dianalisis dengan teknik reduksi data, *display data*, dan penarikan kesimpulan. Sehingga hasil dari data yang diperoleh nantinya dapat menjawab permasalahan yang ada.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Motivasi Anggota Bergabung dalam NOOB Folding Bike Community Bangka

1. Gaya Hidup

Perubahan gaya hidup yang kini berkembang di masa pandemi menimbulkan banyak cara manusia untuk bisa beraktivitas. Prioritas utama dalam melakukan setiap kegiatan agar terhindar dari paparan virus Covid-19 yaitu dengan menjaga kesehatan dan juga kebersihan, seluruh mobilitas masyarakat saat ini menerapkan protokol-protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.

Masyarakat saat ini perlahan mulai mampu beradaptasi dengan perubahan yang sangat drastis ini. Masyarakat juga kini memiliki gaya hidup baru di tengah pandemi yakni gaya hidup sehat yang salah satu caranya dilakukan dengan bersepeda. Berkembangnya tren bersepeda di masa pandemi saat ini disebabkan oleh banyaknya masyarakat yang ikut-ikutan dengan hal yang sedang populer di masa pandemi saat ini dengan merubah gaya

hidup, hal tersebut sudah menjadi hal yang lumrah bagi masyarakat modern saat ini khususnya di Indonesia. Masyarakat modern saat ini senang jika mengikuti sesuatu yang sedang populer dan banyak diikuti oleh banyak orang. Diartikan bahwa suatu hal yang sedang berkembang dan populer dikalangan masyarakat pasti akan dikonsumsi dan dijadikan sebagai gaya hidup seperti yang dilakukan oleh anggota *NOOB Folding Bike Community Bangka*.

2. Eksistensi

Tertariknya para anggota bergabung pada *NOOB Folding Bike Community Bangka* selain sebagai bentuk perubahan gaya hidup sehat di masa pandemi, juga sebagai bentuk eksistensi diri. Hal ini berkaitan dengan konsep konsumerisme yang mana konsumsi bukan hanya dimaknai sebagai proses pemenuhan kebutuhan pokok manusia, namun telah dialihfungsikan sebagai sarana mengekspresikan posisi seseorang dan identitas kultural seseorang di dalam masyarakat. Apalagi di era modern seperti saat ini, sosial media memiliki pengaruh yang sangat hebat dalam kehidupan manusia. Sosial media sudah menjadi bagian dari gaya hidup dimana dijadikan tempat untuk mengekspresikan diri dan menunjukkan eksistensi diri.

Akses terhadap media menjadi bagian penting bagi setiap orang serta kemajuan teknologi dan informasi menghadirkan dunia dalam genggaman. Perkembangan media sangat berperan dalam perubahan gaya hidup seseorang. Seperti yang terjadi di masa pandemi seperti saat ini, perkembangan media berperan dalam mengekspresikan diri menjadi lebih eksis.

B. Fenomena Tren Bersepeda pada *NOOB Folding Bike Community Bangka* di Masa Pandemi

Di masa pandemi yang terjadi seperti saat ini tentunya memberikan dampak yang sangat luar biasa bagi kehidupan masyarakat, karena saat ini masyarakat dituntut untuk dapat menjaga kesehatannya sendiri maupun orang lain, kebiasaan-kebiasaan baru pun dilakukan oleh masyarakat agar terhindar dari pandemi virus Covid-19 ini, beberapa hal dilakukan seperti berolahraga untuk menjaga daya tahan tubuh dan juga mematuhi protokol kesehatan

dengan mencuci tangan yang baik dan benar serta menggunakan masker.

Dalam hal ini, kegiatan bersepeda dianggap sebagai olahraga yang tepat dilakukan kala pandemi Covid-19. Hal ini dikarenakan terkait himbauan pemerintah untuk tidak melakukan interaksi sosial dengan banyak orang atau physical distancing, jadi bersepeda memungkinkan penggunaannya untuk tidak berdekatan dengan orang lain. Dengan ini penggunaan sepeda di masa pandemi kian diminati ditengah adaptasi kebiasaan baru (*new normal*) pandemi Covid-19.

Berkembangnya pengguna sepeda di masa pandemi membawa tren baru di kalangan masyarakat, serta banyaknya pengguna sepeda yang kemudian membentuk komunitas, tentunya kehadiran komunitas sendiri sangat mempengaruhi semakin berkembangnya tren bersepeda dimasa pandemi. salah satu komunitas yang menarik diteliti oleh peneliti yaitu *NOOB Folding Bike Community Bangka* yang mana komunitas ini merupakan komunitas yang baru dibentuk di masa pandemi.

C. Tren Bersepeda menjadi Inovasi dalam Menjaga Kesehatan di Masa Pandemi

Salah satu bentuk upaya dalam meningkatkan daya tahan tubuh dan juga kesehatan di masa pandemi yaitu dengan melakukan perubahan gaya hidup. Hal tersebutlah yang akhirnya membuat individu mulai sadar akan pentingnya menjaga daya tahan tubuh agar tidak terinfeksi oleh virus covid-19 dengan melakukan perubahan gaya hidup sehat.

Tren bersepeda di masa pandemi saat ini menjadi salah satu pilihan bagi masyarakat modern untuk melakukan perubahan gaya hidup menjadi lebih sehat dengan cara berolahraga bersepeda. Pasalnya olahraga bersepeda dianggap sebagai olahraga yang cocok dilakukan di masa pandemi, karena bersepeda sendiri tidak memicu adanya interaksi antar individu. Namun yang terjadi pada saat ini justru bersepeda dimasa pandemi justru di jadikan sebagai komunitas yang malah memicu terjadinya interaksi antar individu.

D. Perilaku dan Motivasi Individu yang Tergabung dalam *NOOB Folding Bike Community Bangka* di Masa Pandemi

Menurut Baudrillard, fungsi-fungsi utama objek konsumsi bukanlah pada kegunaan dan manfaatnya. Melainkan lebih kepada nilai tanda atau simbol yang disebarluaskan melalui media yang saat ini telah menjadi bagian gaya hidup dari masyarakat. Tahapan konsumsi yang dilakukan oleh masyarakat modern saat ini didukung dengan teori dari Baudrillard. Dimana pengonsumsi sebuah tren bersepeda di masa pandemi pada *NOOB Folding Bike Community Bangka* diawali dengan banyaknya kemunculan tren bersepeda diberbagai media sebagai olahraga yang populer dilakukan oleh kalangan masyarakat modern di masa pandemi. mulanya tren bersepeda yang dilakukan merupakan bentuk upaya menjaga kesehatan dengan melakukan perubahan gaya hidup sehat,

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mengenai tren bersepeda di masa pandemi pada *NOOB Folding Bike Community Bangka*. Teori Jean Baudrillard dianggap cukup relevan untuk mengkaji fenomena tren bersepeda di masa pandemi pada *NOOB Folding Bike Community Bangka*.

Di zaman yang sangat modern seperti saat ini merupakan era dimana orang membeli barang bukan lagi karena seseorang membutuhkan barang karena nilai manfaat yang ada pada barang tersebut melainkan saat ini dikarenakan oleh gaya hidup seseorang yang memiliki sebuah hasrat untuk memenuhi keinginan akan barang tersebut. Seperti tren bersepeda di masa pandemi yang terjadi saat ini, sepeda bukan hanya digunakan sebagai alat berolahraga untuk menjaga kesehatan tubuh di masa pandemi saja, melainkan dijadikan sebagai bentuk gaya hidup yang selalu berkaitan dengan upaya untuk membuat diri menjadi eksis dan berbeda dengan kelompok lain. Dari sebuah citra yang diarahkan dan dibentuk melalui apa yang ditawarkan oleh media, yang tidak hanya nilai guna yang ada pada sepeda tersebut. Namun citra dan gaya ketika tergabung dalam *NOOB Folding Bike Community Bangka* dan mengikuti tren yang sedang berkembang pada saat ini. Karenanya yang di konsumsi itu adalah makna yang

terdapat dalam tren yang sedang berkembang tersebut.

Dalam budaya masa, Baudrillard dalam (Lubis, 2014:174) menunjukkan bagaimana sesungguhnya pergeseran yang terjadi pada nilai-nilai dari media kedalam kesadaran masyarakat massa yang telah memaksakan kesadarannya untuk mengikuti perkembangan zaman yang terjadi saat ini. Hal ini diungkapkan oleh Baudrillard, dalam kenyataannya dijelaskan bahwa masyarakat modern telah tergoda oleh citra yang ditampilkan oleh media. Sebagaimana dalam fenomena tren bersepeda di masa pandemi pada *NOOB Folding Bike Community Bangka* saat ini. Sesungguhnya keberadaan citra yang dapat membentuk identitas sosial saat bergabung dalam *NOOB Folding Bike Community Bangka* dan mengikuti tren bersepeda di masa pandemi mengalihkan fungsi dari sepeda yang sebenarnya dalam sepeda itu sendiri. Sepeda yang digunakan dijadikan tren dikalangan *NOOB Folding Bike Community Bangka* yang disebut sebagai citra dan mengambatkan fungsi sepeda sebagai alat berolahraga untuk menjaga kesehatan di masa pandemi.

Dalam pemikiran Baudrillard, menerangkan terhadap semua ketakutan dan kegelisahan terburuk dari masyarakat yang melihat gaya hidup sebagai pola pengaturan dan munculnya diskriminasi terhadap budaya berdasarkan model. Hal ini dianggap Baudrillard sebagai bagian dari fenomena budaya, dimana gaya hidup merupakan ciri perkembangan modernitas yang menyatakan bahwa gaya hidup merupakan hasil interpretasi yang istimewa dalam pencarian jati diri seseorang. Dengan demikian gaya hidup diungkapkan sebagai tindakan yang sudah terpola dalam memanfaatkan barang-barang tertentu dengan bagaimana cara masyarakat tersebut bermain dengan identitasnya. Seseorang dapat memilih tren yang sedang berkembang sebagai sesuatu yang akan ia konsumsi dengan adanya simulakra.

Simulakra adalah ruang realitas yang disarati oleh proses reduplikasi dan daur ulang sebagai fragmen kehidupan yang berbeda (dalam wujud komoditas citra, fakta, tanda, serta kode silang sengkabut), dalam satu dimensi ruang dan waktu yang sama (Piliang dalam Hidayat, 2012:75). Dengan adanya simulakra sebagai ruang realitas yang

memberikan wadah baru pada anggota *NOOB Folding Bike Community Bangka* yang memiliki keinginan untuk mengikuti tren bersepeda di masa pandemi. Ruang realitas diciptakan karena sebagai kebutuhan dari masyarakat dalam hal ini anggota *NOOB Folding Bike Community Bangka*. Mereka memilih tren baru yakni tren bersepeda yang menjadi sebuah kebutuhan pada fenomena pandemi seperti sekarang. Dalam wacana simulasi, sesuatu ditentukan oleh tanda, citra, dan kode dimana identitas seseorang tidak lagi ditentukan oleh apa yang ada dalam dirinya. Dimana manusia mengaktualisasikan dengan eksistensi dirinya dalam ruang realitas yang memiliki perbedaan antara yang nyata dengan yang palsu.

Dalam hal ini, simulakra tersebut ada dalam individu seseorang itu sendiri, dalam fenomena ini penggunaan sepeda dan tergabungnya dalam *NOOB Folding Bike Community Bangka*. Hal ini menjadikan seseorang mendapatkan simulasi-simulasi terbaik dalam representasi kepribadian dan jiwa seseorang. Identitas seseorang tidak ditentukan oleh dirinya sendiri melainkan oleh konstruksi tanda, citra, kode dan telah menjadi pergeseran nilai, dari yang awalnya konsumsi penggunaan sepeda sebagai upaya menjaga kesehatan di tengah pandemi sebagai nilai guna kini bergeser menjadi nilai tanda atau simbol yang ada saat tergabung dalam *NOOB Folding Bike Community Bangka*. Hal tersebut terjadi karena penggunaan sepeda di masa pandemi diekspresikan sebagai gaya hidup yang dibentuk oleh simulasi-simulasi dari media dan lingkungan sosial.

E. Dampak Inovasi Sepeda terhadap Keberadaan Komunitas Sepeda

Olahraga sepeda telah menjadi tren di masa pandemi saat ini, antusiasme masyarakat pun muncul dengan turut serta bersepeda. Dimana olahraga bersepeda yang mereka lakukan saat ini tidak hanya dilakukan oleh masing-masing individu saja, karena saat ini banyak bermunculan komunitas-komunitas sepeda yang hadir di masa pandemi seperti sekarang. Namun, saat ini sepeda sudah terdapat sentuhan inovasi, dimana inovasi tersebut memunculkan sepeda yang dimodifikasi untuk dapat digunakan berolahraga sekaligus bekerja.

Hal tersebut tentunya mempunyai dampak terhadap keberadaan komunitas

sepeda sendiri, dimana kegiatan bersepeda dapat dilakukan sekaligus bekerja. Jadi, mereka tidak perlu menyita waktu untuk berolahraga, karena inovasi tersebut dapat menggabungkan waktu kerja dan berolahraga sekaligus.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, penelitian mengenai Analisis Fenomena Tren Bersepeda Di Masa Pandemi Pada *NOOB Folding Bike Community Bangka* maka hasil penelitian dalam kajian masyarakat konsumerisme Jean Baudrillard.

Pada mulanya, fenomena tren bersepeda di masa pandemi pada *NOOB Folding Bike Community Bangka* merupakan sebuah inovasi yang dibutuhkan dalam perubahan gaya hidup sehat pada masa pandemi, olahraga bersepeda sendiri dilakukan guna menjaga kesehatan dan daya tahan tubuh di masa pandemi. Namun, saat ini inovasi-inovasi sepeda bermunculan dengan hadirnya *workbikecycling* dimana sepeda tersebut dapat menggabungkan antara kegiatan berolahraga dan bekerja dalam satu waktu, yang kemudian kebutuhan tersebut berkembang kearah kebutuhan lain. Yang awalnya untuk alasan kesehatan lalu berkembang sebagai bentuk konsumsi baru yaitu mengkonsumsi sebuah tren yang sedang berkembang dimana dapat membentuk sebuah identitas sosial serta memunculkan citra diri yang dianggap mengikuti perkembangan zaman hingga membuat para anggota *NOOB Folding Bike Community Bangka* yang tergabung memperoleh kesenangan dengan turut menjadi bagian dari perkembangan tren tersebut. Walaupun hal tersebut dilakukan hanya untuk kesenangan tersendiri saja, karena bersepeda di masa pandemi dan tergabung dalam suatu komunitas ini hanya menjadi ajang gaya hidup mereka.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih disampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam terselesainya penelitian ini, terutama kepada kedua orang tua saya yang selalu mendukung, juga para pembimbing yang telah memberikan masukan terhadap penelitian ini serta tidak lupa juga terima kasih atas bantuan dari teman-teman anggota *NOOB Folding Bike Community Bangka* yang telah menyempatkan

waktu untuk berbincang mengenai penelitian yang saya lakukan.

V. DAFTAR PUSTAKA

- Baudrillard, Jean. 2018. *Masyarakat Konsumsi*. Bantul: Kreasi Wacana.
- Barker, Chris. 2018. *Cultural Studies*. Bantu: Kreasi Wacana.
- Arikunto, S. 2017. *Pengembangan Instrumen Penelitian dan Penilaian Program*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Lubis, Akhyar Yusuf. 2014. *Postmodernisme Teori dan Metode*. Jakarta: Rajawali Pers
- Ibrahim. 2015. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Moleong, Lexy. J. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Piliang, Y.A. 2012. *Semiotika dan Hipersemiotika*. Bandung: Matahari
- Martono, Nanang. 2012. *Sosiologi Perubahan Sosial (Perspektif Klasik, Modern, Post Modern, dan Poskolonial)*. Jakarta: Rajawali Press.
- Mukhtar. 2013. *Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif*. Jakarta: Rineka.
- Ritzer, George dan Douglas J Goodman. 2010. *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Kencana.
- Silalahi, Ulber. 2010. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Manajemen*. Bandung: Alfabeta.
- Suyanto, Bagong. 2014. *Sosiologi Ekonomi*. Jakarta: Kencana.



***Korespondensi**

Email¹ : yessinirmala14@gmail.com
Email² : imeaulia@gmail.com
Email³ : ela.hasyim@yahoo.com



Inovbook Publications

Wisma Monex 9th Floor
Jl. Asia Afrika No 133-137 Bandung,
40112



Karya ini dilisensikan di bawah
Lisensi Internasional Creative
Commons Atribusi Nonkomersial
sharelike 4.0.

INOVASI KEBUDAYAAN : TARI CHIT NGIAT PAN REFLEKSI HUBUNGAN SOSIAL ATAS SEMBOYAN “TONG NGIN FAN NGIN JIT JONG”

Yessi Nirmala^{1*}, Aimie Sulaiman^{2*}, Jamilah Cholillah^{3*}

^{1,2,3} Universitas Bangka Belitung | Gang IV No.1, Balun Ijuk,
Merawang, Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka Belitung 33172

Disetujui: 25 Juli 2021

Abstract

This study analyzes innovation, one of which is cultural innovation. The culture studied is a culture that is formed as the result of cultivation or human creativity which is called art, especially dance art. The focus of this research is to discuss the reflection of social relations on the motto "Tong Ngin Fan Ngin Jit Jong" in Chit Ngiat Pan Dance. The method used in this study was a qualitative method with an interpretive analysis approach. In addition, the data were collected by observation technique, informant interview determined by purposive sampling technique, and documentation. In order to analyze this study, the theory of Symbolic Interactionism by Herbert Blumer is applied with three main principles, namely meaning, language, and thought. The researcher uses dance symbols as the unit of analysis, which are movement, fashion, and make-up. The meaning of the Chit Ngiat Pan Dance shows an adjustment to the meaning of solidarity, namely "Tong Ngin Fan Ngin Jit Jong" which is explored through the dance symbols. This motto is the key to the creation of the Chit Ngiat Pan Dance aside from promoting Chinese ethnic culture. Language is obtained as the result of the interaction among fellow dancers, that the Chit Ngiat Pan Dance was initially created for the purpose of competition. Thought is a goal to gain victory in the competition in order to advance to the international stage. The use of the motto "Tong Ngin Fan Ngin Jit Jong" has created acculturation which shows the solidarity between Malay and Chinese ethnic groups in Bangka Belitung represented through the dance art.

Keywords: Cultural innovation, solidarity reflection, acculturation

Abstrak

Penelitian ini mengkaji tentang inovasi yang salah satunya adalah inovasi kebudayaan. Kebudayaan yang dikaji merupakan kebudayaan yang terbentuk dari hasil budidaya atau kreativitas manusia yang disebut dengan seni. Seni yang dimaksud adalah seni tari. Fokus pada penelitian ini adalah membahas terkait bagaimana refleksi hubungan sosial atas semboyan “Tong Ngin Fan Ngin Jit Jong” pada Tari Chit Ngiat Pan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan analisis interpretatif. Data dikumpulkan dengan teknik observasi, wawancara informan yang ditentukan dengan teknik *sampling purposive*, dan dokumentasi. Teori yang digunakan dalam menganalisis penelitian adalah teori Interaksionisme Simbolik oleh Herbert Blumer dengan tiga hal prinsip utama yaitu meaning, language dan thought. Peneliti menggunakan simbol tari sebagai unit analisis yakni gerak, tata busana, dan tata rias. Pemaknaan (*meaning*) pada Tari Chit Ngiat Pan menunjukkan adanya penyesuaian dengan

makna solidaritas yakni “Tong Ngin Fan Ngin Jit Jong” yang digali lewat simbol tari. Semboyan tersebut merupakan kunci dari penciptaan Tari Chit Ngiat Pan selain dari mengangkat kebudayaan Etnis Tionghoa. Bahasa (*language*) di peroleh sebagai hasil interaksi dari sesama penari bahwa Tari Chit Ngiat Pan diciptakan berawal dari tujuan kompetisi. Pikiran (*thought*) adalah kompetisi yang di ikuti adalah suatu tujuan untuk memperoleh kemenangan sehingga dapat melangkah ke tahap internasional. Adanya pemanfaatan semboyan “Tong Ngin Fan Ngin Jit Jong” melahirkan akulturasi yang menunjukkan adanya solidaritas antar Etnis Melayu Dan Etnis Tionghoa di Bangka Belitung yang ditunjukkan kembali melalui seni tari.

Kata Kunci: inovasi kebudayaan, refleksi solidaritas, akulturasi.

I. PENDAHULUAN

Manusia adalah makhluk yang tidak dapat hidup tanpa bergantung dengan orang lain atau dengan kata lain manusia disebut sebagai makhluk sosial. Manusia menghimpun diri menjadi satuan sosial-budaya dan menjadi masyarakat. Pencapaian tersebut di bangun atas adanya dasar interaksi dan sosialisasi. Kemampuan untuk dapat berinteraksi dan bersosialisasi dimanfaatkan manusia untuk menciptakan hubungan sosial lewat pengenalan satu sama lain, adanya kerjasama, serta upaya untuk mencapai tujuan yang sama.

Kehidupan manusia memiliki berbagai keragaman yang meliputi perbedaan bahasa, agama, pengalaman sejarah, isolasi geografis, sistem kekerabatan, dan ras. Adanya keberagaman dapat dijadikan acuan bagi kemunculan kelompok-kelompok yang memiliki suatu kesamaan. Poerwanto mengatakan bahwa bagi manusia melalui keberagaman tersebut dapat menjadi kepercayaan atau keyakinan yang menjadi salah satu unsur penting kebudayaan untuk memahami segala sesuatu disekelilingnya (Nurhaliza 2019: 23).

kebudayaan adalah rangkaian dan penerapan simbol – simbol atau lambang – lambang yang penuh makna dalam kehidupan manusia (Panjaitan et.al, 2014:11). Konsep kebudayaan memang tidak dimiliki oleh seseorang saja, melainkan didapatkan karena ia adalah bagian dari suatu kelompok atau

etnis. Dari suatu kelompok itulah kemudian seseorang mendapatkan konsep-konsep, misalnya *belief* (keyakinan), nilai-nilai, dan cerita-cerita (Meinarno et.al, 2011: 91). Kebudayaan merupakan sesuatu yang memiliki peran penting bagi kehidupan bermasyarakat sebab tidak ada manusia tanpa kebudayaan begitupun sebaliknya tidak ada kebudayaan tanpa manusia (Kistanto, 2015: 1).

Kesenian merupakan salah satu bagian dari kebudayaan. Seni diartikan dalam Bahasa Sansekerta berasal dari kata “sani” yang artinya pemujaan, pelayanan, donasi, permintaan atau pencarian dengan hormat dan jujur. Dalam bahasa Inggris, seni disebut “art” yang artinya terdapat kualitas dan nilai estetis pada karya manusia serta menciptakan kemampuan bagi seseorang dalam membuat, menyusun dan merencanakan sesuatu secara sistematis yang diselaraskan dengan tujuan mengungkapkan makna kejiwaan serta mencapai hasil yang menyenangkan sesuai dengan prinsip-prinsip estetis, baik secara intuitif maupun kognitif (Rahmawati, 2017: 10).

Fungsi seni dikategorikan secara ritual maupun sosial bagi identitas kultural masyarakat. Seni secara ritual merupakan sebuah seni yang sudah ada sejak dulu dan diwariskan secara turun temurun dari generasi ke generasi yang biasanya dilakukan bagi prosesi upacara adat sebagai kepercayaan masyarakat. Seni secara sosial menurut Hadi dapat menjadi penghubung antara seni dengan kehidupan masyarakat dengan faktor-faktor spesifiknya yang meliputi geografi, ekonomi, pendidikan, agama, dan adat istiadat (Purnami, 2014: 7). Selain itu dalam persepektif Sosiologis juga memandang sebuah karya seni tidak hanya sekedar kegiatan yang terbatas pada individu tertentu, serta tidak semata-mata hanya memberikan kepuasan kepada seniman penciptanya, melainkan bermanfaat bagi kehidupan sosial secara keseluruhan (Ratna, 2013: 226). Artinya seni sangat berperan penting bagi terbentuknya kehidupan manusia terkait hubungannya dengan berbagai aspek yang dirasa memberikan banyak manfaat bagi kehidupan masyarakat dimana kesenian tumbuh dan berkembang.

Salah satu bagian dari kebudayaan yang merupakan produk hasil karya manusia adalah seni tari. Seni tari adalah salah satu bentuk kesenian yang menggunakan gerakan tubuh

secara berirama yang di lakukan di tempat dan waktu tertentu untuk keperluan dalam mengungkapkan perasaan, maksud serta pikiran (Rahmawati, 2017: 16). Seni tari memiliki corak yang beragam yang disebabkan oleh banyak hal. Menurut Mulyani fungsi tari secara garis besar dikelompokkan menjadi tiga macam, yakni; sebagai sarana upacara, sebagai hiburan, dan sebagai sarana pertunjukan (Rahmawati 2017: 18).

Terdapat satu tarian yang merupakan produk hasil karya masyarakat Bangka Belitung yaitu Tari Chit Ngiat. Tari yang dipopulerkan oleh komunitas Sanggar kesenian Tari Astari yang merupakan organisasi di mitra kerja kesenian tradisi Bangka Belitung Kota Pangkalpinang ini diangkat dari salah satu ritual agama Kong Hu Cu Etnis Tionghoa yakni Chit Ngiat Pan atau sembahyang rebut. Tarian ini mengemas maknasebagai ungkapan ekspresi dari harmonisasi hubungan sosial antara masyarakat Tionghoa dan masyarakat Melayu yang dikenal dengan istilah "Tong Ngin Fan Ngin Jit Jong" yang artinya "Cina, Melayu sama saja".

akan tetapi Tari Chit Ngiat Pan tidak ditampilkan bersamaan dengan prosesi ritual sembahyang rebut itu sendiri, akan tetapi Tari Chit Ngiat Pan ditampilkan dalam sebuah acara yang tentunya berbasis Bhinneka Tunggal Ika (Okezone.com, 2019). Artinya Tari Chit Ngiat Pan secara tidak langsung juga menyiratkan arti yang menunjukkan bahwa hubungan sosial antar etnis Melayu dan etnis Tionghoa diupayakan berkedudukan sama sesuai dengan semboyan "Tong Ngin Fan Ngin Jit Jong" yang artinya "Cina, Melayu sama saja". Pemaknaan terkait arti yang membenarkan adanya hubungan sosial yang mengacu pada semboyan tersebut dapat dianalisis melalui refleksi yang terdapat pada Tari Chit Ngiat Pan. Pengertian refleksi menurut KBBI adalah cerminan atau gambaran.

Lewat pemanfaatan simbol – simbol yang terdapat pada tari dapat peneliti gunakan sebagai alat bagi peneliti untuk dapat membenarkan antara tujuan tari dengan makna dan simbol yang diperoleh setelah dilakukannya analisis pada Tari Chit Ngiat Pan. Maka peneliti dalam hal ini tertarik untuk mengetahui gambaran hubungan sosial atas semboyan "Tong Ngin Fan Ngin Jit Jong" yang dikemas pada Tari Chit Ngiat Pan dengan judul

penelitian Tari Chit Ngiat Pan: Refleksi Hubungan Sosial atas semboyan "Tong Ngin Fan Ngin Jit Jong".

II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan interpretatif. Metode ini dinilai relevan dengan penelitian karena menyesuaikan dengan tujuan dari penelitian yakni menginterpretasi makna lewat sebuah simbol. Simbol yang dimaksud merupakan simbol yang terdapat pada unsur-unsur pada Tari Chit Ngiat Pan.

Sumber data dalam penelitian ini dikategorikan sebagai sumber data primer dan sumber data sekunder. Data primer adalah data yang sumber datanya langsung memberikan data kepada pengumpul data yang diperoleh responden melalui kuesioner, kelompok fokus, dan panel, atau data hasil wawancara peneliti dengan narasumber, sedangkan data sekunder adalah data yang datanya tidak langsung memberikan data pada pengumpul data dan diperoleh melalui catatan, buku, majalah berupa laporan keuangan publikasi perusahaan, laporan pemerintah, artikel, buku-buku teori, dan sebagainya (Sujarweni, 2014:73).

Teknik penentuan informan dalam penelitian ini adalah teknik sampling purposive. teknik *sampling purposive* adalah teknik pengambilan data yang digunakan peneliti untuk menentukan sampel dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2016: 156). Alasan penggunaan teknik *sampling purposive* dalam penelitian ini dikarenakan peneliti memepertimbangkan berdasarkan informan yang dianggap paling mengetahui tentang apa yang diharapkan oleh peneliti mengenai objek penelitian. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis dalam penelitian ini adalah merujuk pada petunjuk dari Miles dan Hubberman yakni reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan (Ibrahim, 2015: 109-112).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Seni tari merupakan salah bagian dari kebudayaan yang memiliki peran penting sebagai sarana pemersatu bangsa sekaligus untuk melestarikan atau mempertahankan

suatu kebudayaan. Pada situasi yang serba modern menyebabkan konsumsi terhadap budaya lokal menjadi tersaingi. Hadirnya musik dengan macam genre seperti lagu barat berirama pop, jazz, R&B serta tarian yang bertajuk modern dance menjadi lawan dalam mempertahankan kesenian dalam negeri. Ketakutan budayawan yakni pengaruh globalisasi mampu menggerus pikiran anak muda untuk lebih menyukai budaya luar, sehingga banyak diantaranya organisasi di mitra kerja kesenian berusaha menciptakan karya-karya baru yang bisa membangkitkan kembali kreatifitas anak bangsa.

Sebagai salah satu tempat organisasi di mitra kerja kesenian tradisi Bangka Belitung Kota Pangkalpinang yang bergerak dalam mensukseskan pembangunan di bidang kesenian yakni Sanggar Seni Astari. Tari Chit Ngiat Pan merupakan hasil karya dari Sanggar Seni Astari yang mengusung konsep “Tong Ngin Fan Ngin Jit Jong” yang artinya “Cina, Melayu sama saja”. Semboyan “Tong Ngin Fan Ngin Jit Jong” merupakan istilah yang digunakan oleh masyarakat Bangka Belitung sebagai sikap saling menghargai antar masyarakat berbeda etnis khususnya masyarakat Etnis Melayu dan Etnis Tionghoa.

A. Refleksi Hubungan Sosial “Tong Ngin Fan Ngin Jit Jong” pada Tari Chit Ngiat Pan

Tarian merupakan produk seni yang mempunyai nilai estetis atau disebut dengan nilai keindahan yang melekat pada karya – karya seni termasuk pada karya seni tari salah satunya. Tari Chit Ngiat Pan terdiri atas komponen – komponen simbol yang memiliki makna sebagai proses dari interaksi sosial. Interaksi sosial ditunjukkan melalui penggunaan simbol yang kemudian menghasilkan makna. Simbol tersebut dapat disampaikan melalui gerak, tata busana, dan tata rias (Kurnia, 2016: 8). Adapun alternatif yang digunakan untuk menganalisis makna dan simbol yakni mengacu pada tiga hal prinsip utama interaksionisme yang digagas oleh Herbert Blumer yaitu meaning, language dan thought. Proses penentuan atas tiga hal prinsip utama tersebut, dibangun dengan tiga konsep dasar yang dikenal dengan teori makna diantaranya yaitu Pertama, manusia dalam menanggapi sesuatu didasarkan pada makna yang terkandung dalam sesuatu tersebut yang

ada pada diri mereka. Kedua, selanjutnya makna tersebut dibentuk atas interaksi individu dengan orang lain. Ketiga, makna selanjutnya dirumuskan melalui proses interpretasi oleh setiap individu untuk menilai, merumuskan dan memodifikasi berdasarkan pada kejadian perjumpaan dengan orang-orang di lingkungannya (Arisandi, 2015: 126).

1. Pemaknaan (Meaning): Bentuk Penyajian Tari Chit Ngiat Pan dan keterkaitannya dengan semboyan “Tong Ngin Fan Ngin Jit Jong”.

Tari Chit Ngiat Pan diproduksi sanggar sebagai bagian dari kompetisi Parade Tari Nusantara ke 36 TMII tahun 2017. Kompetisi ini menjadi kesempatan berharga bagi para pelaku seni, pencipta seni, dan penikmat seni sebagai tempat menampilkan hasil karya seni. Lewat kompetisi parade nusantara ke-36 TMII, Indonesia dapat melestarikan, mengembangkan serta mengenalkan kebudayaan yang menjadi kekayaan Indonesia khususnya seni tari daerah. Segala bentuk kebudayaan yang ada di dalamnya dikemas dan disampaikan melalui sebuah tarian dengan tema yang sudah menjadi ketentuan dalam kompetisi tersebut yakni “Kreativitas Tari pada Proses (Rangkaian) Adat Masyarakat Daerah Berbasis Seni Kerakyatan.”

Meskipun tari yang diproduksi Sanggar Seni Astari berkaitan dengan tradisi sembahyang rebut, tetapi dalam tarian ini hanya mengisahkan proses dari perayaan tradisi dan tidak diselenggarakan pada proses pelaksanaan sembahyang rebut. Artinya tradisi ini dipinjam hanya untuk memenuhi syarat pada kompetisi Parade Tari Nusantara ke 36 TMII 2017.

Mengenali keterlibatan kedua etnis dapat dilihat dari penyajian tari Tari Chit Ngiat Pan. Melalui pencarian makna lewat simbol pada seni tari yang meliputi gerak, busana dan tata rias (Kurnia, 2016: 8). Simbol seni tari yang peneliti gunakan sebagai alat ukur untuk memperoleh makna terkait refleksi hubungan sosial atas semboyan “Tong Ngin Fan Ngin Jit Jong” pada Tari Chit Ngiat Pan.

1.1. Gerak

Gerak adalah suatu bahasa yang disampaikan oleh penari dalam menyampaikan maksud sebuah tarian. Gerakan termasuk jenis komunikasi non verbal

yang artinya isyarat yang bukan kata-kata. Menurut Kurniati (2016: 14-15) Gerakan tubuh (kinestetik) biasanya digunakan untuk mengganti kata atau frasa. Setiap gerakan pada tarian selalu mengandung makna yang terkandung di dalamnya. Tari Chit Ngiat Pan dalam hal ini menggambarkan makna kegembiraan dan kekusyukan dalam upacara sembahyang rebut. Dikarenakan konsep tarian mengusung cerita dari ritual adat Etnis Tionghoa, maka makna yang terkandung di dalamnya pun menyesuaikan dengan prosesi ritual upacara sembahyang rebut mulai dari awal tarian hingga penutup secara.

Arti pada setiap gerakan Tari Chit Ngiat Pan jelas sekali menggambarkan perayaan sembahyang rebut meskipun tarian ini tidak ada kaitannya dengan perayaan sembahyang rebut. Ritual upacara sembahyang rebut diadakan setiap tahunnya oleh orang-orang Cina di Bangka Belitung. Perayaan ini merupakan kepercayaan sebagai warisan budaya Etnis Tionghoa yang jatuh pada bulan 7 tanggal 15 penanggalan kalender Cina. Chit Ngiat Pan memiliki tujuan yakni untuk menceminkan sikap saling membantu serta mengasihi kepada sesama makhluk ciptaan Tuhan apapun itu wujudnya baik itu hubungan pada manusia yang masih hidup atau dengan yang meninggal.

1.2. Busana

Busana adalah pakaian yang dikenakan oleh penari. Menurut Astuti (2017: 95) busana berfungsi sebagai pendukung tema atau isi tari serta untuk memperjelas peran-peran dalam sajian tari. Pada Tari Chit Ngiat Pan busana yang digunakan merupakan perpaduan dari Etnis Melayu dan Etnis Tionghoa. Konsep penetapan busana masih mengacu pada tema tarian yang menunjukkan bentuk toleransi tinggi antar umat berbeda agama. Kolaborasi yang mencolok terlihat dari penggunaan warna. Penggunaan warna merah menunjukkan Etnis Tionghoa dan warna hijau menunjukkan Etnis Melayu.

1.3. Tata rias

Rias merupakan karakter atau watak digambarkan pada wajah yang sedang diperankan (Astuti, 2017: 90). Adanya rias dapat menunjang tampilan para penari agar terlihat menarik untuk dipandang para penonton. Tata rias yang pada Tari Chit Ngiat

Pan terbagi atas dua bagian yakni tata rias wajah, dan tata rias rambut,

1.3.1. Tata rias wajah

Tampilan rias wajah penari Tari Chit Ngiat Pan tampak seperti rias penari pada umumnya. Rias wajah memanfaatkan penggunaan alat make - up seperti toner, foundation, bedak, eye shadow, pensil alis, bulu mata palsu, eye liner, blush on, dan lipstik. Penata rias penari berasal dari anggota Sanggar Seni Astari.

Jenis make up yang diaplikasikan ke wajah merupakan make up karakter. Make up karakter menurut Budiarti (2017:40) adalah seni yang menggunakan bahan-bahan kosmetika untuk membentuk peran atau karakter dengan pertimbangan pencahayaan serta sudut pandang penonton yang dilakukan dengan cara yang dapat digunakan dalam keputusan skenario. Macam-macam dari teknik merias karakter adalah:1) rias wajah dengan tuntutan peran sesuai jenis kelamin, 2) rias karakteristik wajah sesuai suku bangsa, 3) rias wajah sesuai pada usia, 4) rias wajah sesuai karakteristik tokoh yang diperankan (Budiarti, 2017:40). Pada Tari Chit Ngiat Pan karakter yang diambil menyesuaikan dengan jenis kelamin para penari. Sehingga dibuat berbeda seperti rias penari lelaki terdapat ukiran jambang, kumis, dan jenggot. Sedangkan penari perempuan hanya riasan seperti biasa layaknya wajah perempuan aslinya hanya saja lebih dipertegas dengan adanya riasan make up. Tata rias yang digunakan tidak menunjukkan adanya riasan wajah khusus yang memperlihatkan tampilan riasan Etnis Tionghoa. Riasan wajah penari terlihat seperti riasan pada umumnya yang sering dijumpai di Indonesia yaitu riasan Melayu. Dengan dibedakan antara laki - laki dan perempuan atas riasan wajah yang mengacu pada make up karakter yang menyesuaikan pada jenis kelamin penari.

1.3.2. Tata rambut

Tata rias rambut pada Tari Chit Ngiat Pan pada penari perempuan rambutnya disanggul serta menggunakan aksesoris kepala yang dinamakan paksian. Paksian berfungsi untuk menunjang penampilan penari agar terlihat cantik dan rapi. Paksian merupakan aksesoris adat budaya Etnis Melayu. Sedangkan pada penari laki - laki bagian kepala seperti dihiasi kain ikat

penutup kepala khas pria Etnis Melayu agar terlihat menarik.

2. Bahasa (*Language*): Sebagai Tujuan Kompetisi

Bahasa diwujudkan sebagai simbol yang merupakan sebuah proses yang berlanjut dan bukan sesuatu yang sedang terjadi. dengan kata lain simbol berarti proses penyampaian makna. Bahasa merupakan sistem lambang yang memungkinkan orang – orang untuk berbagi makna (Kurniati, 2016: 8). Dalam interaksionime simbolik, penyampaian makna dan simbol disebut dengan subject matter. Melalui bahasa dapat menjadi sarana dalam mengembangkan makna yakni melalui penggunaan simbol – simbol. Makna yang diperoleh merupakan hasil dari proses interaksi sosial (mony, 2015: 134).

Pada saat itu kompetisi yang diikuti sertakan Sanggar Seni Astari adalah kompetisi Parade Nusantara ke 36 TMII. Akan tetapi sebelum naik ke tingkat profinsi/kota, Tari Chit Ngiat dipentaskan di tingkat kabupaten yakni di alun – alun Kota Pangkalpinang baru akhirnya sampai di kompetisi Parade Nusantara ke 36 TMII. Perlibatan dengan semboyan “Tong Ngin Fan Ngin Jit Jong” dapat dilihat dari pencarian makna melalui gerak, tata rias, dan tata busana (Kurnia, 2016: 8).

Semboyan “Tong Ngin Fan Ngin Jit Jong” sempat populer dikalangan petinggi daerah salah satunya oleh Gubernur Provinsi Bangka Belitung yakni Hudarni Rani periode 2002-2007. Dikarenakan semboyan “Tong Ngin Fan Ngin Jit Jong” sudah melekat sebagai simbol kekerabatan antar Etnis Tionghoa dan Etnis Melayu di Bangka Belitung maka semboyan ini ketua sanggar dan koreografer sepakat dikaitkan dengan tema kompetisi “Kreativitas Tari pada Proses (Rangkaian) Adat Masyarakat Daerah Berbasis Seni Kerakyatan”.

Tari Chit Ngiat belum pernah ditampilkan langsung sebagai ritual adat sembahyang rebut. Akan tetapi tidak adanya penolakan dari pihak sanggar jika terdapat ajakan dari Etnis Tionghoa terutama para tetua adat jika pada perayaan sembahyang rebut yang diselenggarakan di kelenteng atau di tempat peribadatan Etnis Tionghoa menampilkan Tari Chit Ngiat Pan. Kabar baiknya lagi bahwa tokoh adat Etnis Tionghoa menerima adanya kerja sama antara pihak sanggar dengan pihak

pengurus Klenteng jika ingin menampilkan Tari Chit Ngiat Pan terutama dalam memeriahkan prosesi ritual sembahyang rebut. Tari Chit Ngiat Pan pernah tampil di beberapa tempat dan tidak hanya berhenti pada kompetisi Parade Nusantara ke-36 TMII. Tempat tersebut jika dilihat dari sudut pandang penonton selain disuguhkan bagi seniman penikmat seni juga disuguhkan bagi golongan orang yang berkedudukan penting.

3. Pikiran (*Tought*): Komodifikasi Ekonomi – Politik

Manusia menurut Blumer (169: 64) sebagai hasil dari proses interaksi sosial akan menghasilkan karakter yang berbeda. adanya pengetahuan dari mengarahkan individu pada keinginannya. Tindakannya dapat dibentuk melalui identifikasi keinginan, penentuan tujuan, pemetaan arah tujuan, perkiraan situasi serta tafsiran atas tindakan orang lain dan lain sebagainya (mony, 2015: 134).

Setyobudi (2017: 105) mengatakan bahwa ranah seni sudah menjadi fenomena komodifikasi. Komodifikasi adalah sesuatu yang dapat dipertukarkan untuk memperoleh keuntungan berupa profit atau laba. Tari Chit Ngiat Pan termasuk kedalam kategori tari kreasi dikarenakan tari dirancang atas ide koreografer yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi dengan tetap memelihara nilai artistiknya. Ide koreografer menyesuaikan dengan tema sebuah kompetisi yang pada saat itu mengangkat tema “Kreativitas Tari pada Proses (Rangkaian) Adat Masyarakat Daerah Berbasis Seni Kerakyatan”. Pada saat itu kompetisi yang diikuti sertakan Sanggar Seni Astari adalah kompetisi Parade Nusantara ke-36 TMII. Fenomena ini Frow (1997) dan Meethan (2001) lihat sebagai komodifikasi ekonomi-politik yang ditandai dengan eratnya hubungan antara budaya dan ekonomi (Setyobudi, 2017:105). Kebudayaan tidak lagi menjadi jati diri sebuah daerah bagi masyarakat yang secara tradisional di jaga kelestariannya tetapi kebudayaan menjadi terkomodifikasi atas dasar ukuran nilai profit dan laba.

Seni dilihat sebagai medan pergesekan kepentingan politisi agen budaya seperti praktisi seni, akademisi (dosen seniman dan seniman – pengamat) media massa, seni rakyat, pembisnis (*event organizer, entertaint industries, tourism industries, production house,*

music industry, fashion and textile industries) Maecenas, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan organisasi penyantunan dana (Setyobudi, 2017: 111). Jika semboyan “Tong Ngin Fan Ngin Jit Jong” hanya digunakan sebagai kekuatan bagi penunjang tema kompetisi “Kreativitas Tari pada Proses (Rangkaian) Adat Masyarakat Daerah Berbasis Seni Kerakyatan” artinya terdapat komodifikasi pada sebuah karya seni.

Akan tetapi jika melihat dari simbol tarian pada Tari Chit Ngiat, keterlibatan antar kedua etnis terlihat jika dimaknai secara satu persatu dengan mengacu pada simbol yang meliputi gerak, tata rias, dan tata busana (Kurnia, 2016: 8). Namun berdasarkan pada tujuan Tari Chit Ngiat Pan diciptakan hanya sebagai syarat dalam mengikuti kompetisi. Artinya kecintaan terhadap kebudayaan hanya terpanggil ketika adanya keadaan yang bersifat mutualisme.

B. Refleksi Hubungan Sosial “Tong Ngin Fan Ngin Jit Jong” pada Tari Chit Ngiat Pan

Berdasarkan temuan peneliti di lapangan mengenai interpretasi simbol pada Tari Chit Ngiat Pan dan kaitannya dengan hubungan sosial “Tong Ngin Fan Ngin Jit Jong” dianalisis dengan teori Herbert Blumer yakni Interaksionisme Simbolik dengan menggunakan pendekatan dengan mengacu pada tiga premis yakni meaning, language, dan thought. Gillin dan Gillin sebagai pakar Sosiologis mengatakan bahwa hubungan sosial merupakan bentuk dari interaksi yang terdiri atas interaksi Asosiatif atau Disosiatif (Soekanto, 2013:64). Hubungan sosial yang dilihat mengacu pada pendapat dari Gillin dan Gillin. Apabila Tari Chit Ngiat Pan merefleksikan atau menggambarkan atas hubungan sosial antar Etnis Melayu dan Etnis Tionghoa, maka ini merujuk pada pernyataan Gillin dan Gillin. Pernyataan menurut Gillin dan Gillin tersebut adalah adanya hubungan sosial yang mana hubungan sosial biasanya disebut dengan interaksi sosial. Menurut Gillin dan Gillin terdapat dua proses sosial sebagai akibat dari adanya interaksi sosial yakni proses Asosiatif dan proses Disosiatif (Soekanto, 2013: 64).

Proses Asosiatif meliputi akomodasi, asimilasi dan akulturasi. Sedangkan proses Disosiatif meliputi persaingan atau pertentangan. Akomodasi adalah suatu proses yang mengarah pada usaha-usaha manusia

untuk meredakan suatu pertentangan agar mencapai suatu kestabilan. Selain itu proses perubahan pola kebudayaan untuk menyesuaikan diri dengan mayoritas disebut asimilasi.

Melihat pada tujuan pembentukannya, Tari Chit Ngiat Pan terfokus pada kompetisi Parade Tari Nusantara ke-36 TMII 2017. Akan tetapi Tari Chit Ngiat Pan tetap mengusahakan untuk tetap melibatkan kedua etnis yakni Etnis Melayu dan Etnis Tionghoa pada tarian tersebut dengan mengangkat tema yang berbasis kerakyatan yakni menciptakan hubungan baik antar Etnis Melayu dan Etnis Tionghoa. Hubungan baik tersebut disepakati bagi ketua sanggar dan koreografer kaitkan dengan semboyan “Tong Ngin Fan Ngin Jit Jong” yang artinya “cina, melayu sama saja”.

Upaya dalam melibatkan kedua etnis yakni Etnis Melayu dan Etnis Tionghoa dalam sebuah karya seni yang jika dikaitkan dengan pandangan dari Gillin dan Gillin merupakan sebuah bentuk dari akulturasi. Akulturasi merupakan proses sosial yang muncul ketika kelompok manusia dengan kebudayaan tertentu dihadapkan dengan unsur-unsur kebudayaan asing, yang secara perlahan kebudayaan asing diterima dan tanpa menghilangkan ciri khas budaya masyarakat itu sendiri. Akulturasi dalam karya seni Tari Chit Ngiat Pan ditunjukkan adanya perpaduan kebudayaan antar Etnis Melayu dan Etnis Tionghoa yang jelas terlihat pada tujuan serta ditunjang dari simbol pada tarian yang meliputi gerak, tata rias, dan tata busana (Kurnia, 2016: 8).

Berdasarkan pada temuan hasil yang mengacu pada tiga premis Blumer meaning, language, dan thought, terdapat pengkolaborasi diantara kedua etnis tersebut yakni antar Etnis Melayu dan Etnis Tionghoa. Pada premis satu (1) yaitu meaning, adanya perolehan makna tarian pada objek sebagai simbol. Objek yang dalam hal ini berupa simbol tari yang meliputi gerak, tata rias, dan tata busana. Hasil menunjukkan bahwa adanya pengkolaborasi diantara kedua etnis tersebut yakni Etnis Melayu dan Etnis Tionghoa pada Tari Chit Ngiat Pan melalui gerak, tata rias, dan tata busana (Kurnia, 2016: 8).

Pada premis dua (2) yakni language bahwa upaya yang dilakukan dalam menciptakan tema yang berkaitan dengan menciptakan

hubungan baik antar Etnis Melayu dan Etnis Tionghoa atau serupa dengan makna semboyan “Tong Ngin Fan Ngin Jit Jong” ternyata selain hanya sebatas pada kebutuhan kompetisi yakni Parade Tari Nusantara ke-36 TMII 2017, Tari Chit Ngiat Pan juga pernah ditampilkan pada beberapa acara lain. Pada premis tiga (3) yakni *tought* yang membangun pikiran sebagai hasil dari makna yang dibentuk atas hasil interaksi. Interaksi peneliti peroleh sebagai hasil dari wawancara yang menunjukkan bahwa banyak diantaranya hasil wawancara diperoleh dari ketua sanggar dan koreografer dengan jawaban yang menunjukkan bahwa Tari Chit Ngiat Pan diproduksi sebagai tari kreasi dengan tujuan kompetisi. Dengan kata lain Tari Chit Ngiat Pan diproduksi dengan menyesuaikan pada kebutuhan satu atau dua orang secara finansial yang bersifat mutualisme.

C. Inovasi Kebudayaan

Inovasi adalah kata yang digunakan untuk menyatakan tentang penemuan, karena sesuatu yang bersifat kebaruan disebut dengan penemuan (Sutirna, 2018:18). Pada kebudayaan tentunya seniman berusaha menciptakan karya baru untuk mempertahankan masyarakat agar tidak lepas dari jati diri kebudayaannya. Lewat sebuah komunitas Sanggar kesenian Tari Astari sebagai salah satu tempat organisasi di mitra kerja kesenian tradisi Bangka Belitung Kota Pangkalpinang yang bergerak dalam mensukseskan pembangunan di bidang kesenian. Berdirinya sanggar ini di latarbelakangi oleh keinginan untuk melestarikan kebudayaan terutama yang ada di Bangka Belitung dari pengaruh arus globalisasi. Kurangnya perhatian dan respon positif dari berbagai pihak, mengakibatkan budaya asing yang masuk turut mempengaruhi perkembangan seni dan budaya di Indonesia, serta dapat membawa perubahan dan pola kebiasaan adat istiadat daerah yang lambat laun akan mengikis budaya lokal dan ditakutkan kebudayaan tersebut dapat terancam punah.

Melalui sebuah inovasi kebudayaan maka kebudayaan di Indonesia tidak terancam kepunahana. Salah satu alternatif yang dapat dilakukan adalah dengan berkarya. Mengandalkan pada kebudayaan leluhur yang telah melekat di masyarakat yang kemudian

digali untuk dikembangkan lagi menjadi sesuatu yang baru. Kebudayaan yang mengerucut ke dalam sistem yang lebih mikro yakni kesenian. Seni tari merupakan salah satu bentuk dari inovasi kebudayaan yang dikemas dalam gerakan yang sedemikian rupa diciptakan oleh koreografer.

Ritual sembahyang rebut tentu saja hanya di gelar setiap tahunnya oleh orang-orang Cina di Bangka Belitung pada bulan 7 tanggal 15 penanggalan kalender Cina. Ritual ini tentunya hanya diketahui oleh masyarakat Bangka Belitung. Akan tetapi melalui adanya sebuah kompetisi tarian dengan membawakan tari Tari Chit Ngiat Pan dengan konsep sembahyang rebut yang bertajuk solidaritas atau “Tong Ngin Fan Ngin Jit Jong”. Maka pemaknaan sembahyang rebut dapat dikenal banyak orang bahkan diluar Bangka Belitung.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti mengenai Refleksi Hubungan Sosial “Tong Ngin Fan Ngin Jit Jong” pada Tari Chit Ngiat Pan. Hasil temuan dilapangan dapat disimpulkan bahwa seni diproduksi sebagai salah satu tujuan bagi pembangun hubungan yang bersifat mutualisme artinya hubungan yang saling menguntungkan bagi dua pihak. Pihak yang diuntungkan yakni pihak sanggar sebagai penyaji tari dan pihak agen – agen kebudayaan yang disesuaikan pada kebutuhannya masing – masing. Disamping mampu meningkatkan kepekaan terhadap pencipta seni untuk tidak memutuskan rantai kebudayaan, seni juga berfungsi sebagai alternatif bagi sarana hiburan pada beberapa acara tertentu. Beberapa acara yang menjadi tempat Tari Chit Ngiat Pan ditampilkan secara garis besar ditampilkan pada acara bergengsi. Seharusnya tarian yang diproduksi tidak hanya sebatas pada pementasan kompetisi atau pada acara – acara tertentu yang melibatkan penonton kelas – kelas elit, tetapi juga diupayakan untuk tampil sebagai tari tradisonal yang berhubungan dengan kebutuhan masyarakat seperti pada upacara ritual adat dan semacamnya.

Pemanfaatan semboyan sebagai ciri khas suatu daerah menjadi salah satu cara agar seni memperoleh respon positif dan diterima menyesuaikan pada keinginan agen budaya misalnya seperti pada ajang kompetisi Parade

Nusantara ke 36 TMII tahun 2017 dengan basis kerakyatan. Mengenai keterlibatan dengan agen kebudayaan selaras dengan pernyataan dari Frow (1997) dan Meethan (2001) lihat sebagai komodifikasi ekonomi-politik. Pernyataan berikut ditandai dengan adanya aktivitas tari yang mengacu pada keinginan finansial yang didorong oleh agen kebudayaan yang melibatkan komuitas Sanggar Seni diseluruh Indonesia yang salah satunya adalah Sanggar Seni Astari. Aktivitas tari tersebut berupa karya seni yang diciptakan atau diproduksi mengikuti keinginan agen budaya yang kemudian disesuaikan kembali dengan tema yang ditentukan oleh ketua sanggar dan koreografer tari. Fenomena tersebut dapat dilihat sebagai tujuan yang melandasi eratnya hubungan antara budaya dan ekonomi (Setyobudi, 2017: 105).

Pernyataan diatas diperkuat lagi melalui adanya proses produksi Tari Chit Ngiat Pan yang terpanggil ketika adanya ajang kompetisi yang diselenggarakan oleh agen kebudayaan. Agen kebudayaan dapat meliputi praktisi seni, akademisi (dosen seniman dan seniman – pengamat) media massa, seni rakyat, pembisnis (*event organizer, entertaint industries, tourism industries, production house, music industry, fashion and textile industries*) Maecenas, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan organisasi penyantunan dana (Setyobudi, 2017: 111).

Tidak hanya sebatas pada pemanfaatan semboyan sebagai ciri khas suatu daerah saja, tetapi koreografer juga menyeimbangkan keterlibatan antar berbeda etnis yakni Etnis Melayu dan Etnis Tionghoa pada Tari Chit Ngiat Pan. Salah satunya dengan meletakkan beberapa komponen yang menunjukkan adanya kolaborasi antar berbeda etnis di Bangka Belitung untuk menjadi bukti bahwa seni pada Tari Chit Ngiat Pan sudah mengacu pada semboyan “Tong Ngin Fan Ngin Jit Jong”. Keterlibatan tersebut kemudian menghasilkan sebuah proses sosial yang Gillin dan Gillin sebut sebagai akulturasi. Proses akulturasi ditunjukkan dengan adanya perpaduan kebudayaan antar Etnis Melayu dan Etnis Tionghoa yang dikemas ada sebuah tarian dan terlihat jelas pada tujuan serta simbol tari yang meliputi gerak, tata busana, dan tata rias.

UCAPAN TERIMA KASIH

Sebagai akhir dari selesainya penelitian ini maka penulis megucapkan terimakasih yang

sebesar-besarnya kepada semua pihak yang teribat dalam penelitian. Karena penelitian ini tidak akan berhasil tanpa adanya bantuan dari keluarga, dosen pembimbing, dan pihak Sanggar Seni Astari Pangkalpinang yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada ketua sanggar ibu Tricahya Karnawati, kepada koreografer tari Leonardo, beserta para penari yang sudah menyempatkan waktu untuk diwawancara meski masih dalam masa pandemi. Penulis berharap sanggar untuk tidak berhenti berkarya demi membanggakan nama Bangka Belitung di kancah nasional atau pun internasional.

V. DAFTAR PUSTAKA

- Arisandi, Herman. 2015. *Buku Pintar Pemikiran Tokoh-Tokoh Sosiologi dari Klasik sampai Modern*. Yogyakarta: IRCloD
- Ibrahim. 2015. *Metodologi Penelitian Kualitatif Panduan Pelitian Beserta Contoh Proposal Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Kurnia, Muhdi. 2016. *Tari Tradisi Melayu, Eksistensi dan Revitalisasi Seni*. Medan: Puspantara. <https://books.google.co.id>. Dikses pada 1 Juli 2021.
- Panjaitan, Ade Putra, dkk. 2014. *Korelasi Kebudayaan Dan Pendidikan: membangun pendidikan berbasis budaya lokal*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia. <https://books.google.co.id>. Dikses pada 1 Juli 2021.
- Ratna, Nyoman Kutha. 2013. *Paradigma Sosiologi Sastra*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Soekanto, Soerjono. 2013. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Manajemen*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sujarweni, Wiratna V. 2014. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Puatakabarupress.
- Sutirna. 2018. *Inovasi dan Teknologi Pembelajaran*. Yogyakarta: Deepublish. <https://books.google.co.id>. Dikses pada 1 Juli 2021.

Sumber Skripsi dan jurnal:

- Budiarti, Tri Linda. 2017. *Kontribusi Make-Up Karakter terhadap Hasil Rias Cosplayer*

- Anime*. <https://core.ac.uk>. Diakses pada 26 juni 2021
- Company Profile Sanggar Seni Astari Tahun 2014
- Imam, Setyobudi. 2017. *Budaya Perlawanan di Ranah Seni Indonesia Produksi-Diri Masyarakat, Habitus, Komodifikasi*. <https://jurnal.uns.ac.id> Diakses pada 2 April 2021
- Kistanto, Nurdien Harry. 2015. *Tentang Konsep Kebudayaan*. <https://ejournal.undip.ac.id>. Diakses pada 17 Agustus 2020
- Kurniati, Desak Putu Yuli. 2016. *Modul Komunikasi Verbal dan Non Verbal*. <https://jurnal.uinsu.ac.id> Diakses pada 24 Februari 2021
- Nurhaliza, siti. 2019. *Akulturasi Budaya Tari (Topeng Endel) untuk Menumbuhkan Nilai-Nilai Kearifan Lokal pada Anak di Kecamatan Dukuhturi, Kabupaten Tegal*. <https://lib.unnes.ac.id>. Diakses pada 15 Agustus 2020.
- Purnami, Fitri. 2014. *Kajian Sosiologis Kesenian Belenggo di Kelurahan Cipedak Kecamatan Jagakarsa*. Jakarta. <https://eprints.uny.ac.id>. Diakses pada 19 Januari 2021.
- Rahmawati, Dian Hendra. 2017. *Analisis Semiotika Tari Cangget Agung*. <https://digilib.unila.ac.id>. Diakses pada 15 Juli 2020.

Kbbi.kemendikbud.go.id. Entry: Refleksi. <https://kbbi.kemendikbud.go.id>. Diakses pada 28 Mei 2021

Sumber Internet:

- Kompasiana.com. 2017. *Perayaan Chit Ngiat Pan/Chiong Shi Ku Sembahyang Rebut Bangka*. <https://www.kompasiana.com/perayaan-chit-ngiat-pan-chiong-shi-ku-sembahyang-rebut-bangka>. Diakses pada 20 Juli 2020.
- Infobudaya.net. 2017. *Ritual Chit Nyiat Pan Sembayang Rebut*. <https://www.infobudaya.net/2017/08/ritual-chit-nyiat-pan-sembayag-rebut>. Diakses pada 20 Juli 2020.
- Paradetarinusantara.com. 2017. *Parade Tari Nusantara 2017 Chit Ngiat Pan Bangka Belitung*. <https://paradetarinusantara.com//parade-tari-nusantara-2017-chit-ngiat-pan-bangka-belitung> Diakses pada 20 Februari 2021



***Korespondensi**

Email¹ : maulanaangry02@gmail.com

Email² : sitiaisyahsogaan@gmail.com

Email³ : fatihholis1212@gmail.com



Inovbook Publications

Wisma Monex 9th Floor

Jl. Asia Afrika No 133-137 Bandung,
40112



Karya ini dilisensikan di bawah
Lisensi Internasional Creative
Commons Atribusi Nonkomersial
sharelike 4.0.

PENGARUH PEMBELAJARAN ONLINE PADA MASA PANDEMI COVID 19 TERHADAP PRESTASI BELAJAR SISWA KELAS IX SMP

**Nikmatul Maulana^{1*}, Siti Aisyah^{2*}, Fatih Holis
Ahnaf^{3*}**

^{1,2,3} Universitas Islam Zainul Hasan | Jl. Raya Panglima Sudirman
No.360, Semampir, Kec. Kraksaan, Probolinggo, Jawa Timur 67282

Disetujui: 25 Juli 2021

Abstract

Education during the Covid-19 Pandemic which is now a major problem in the world of education, schools are now limited to face-to-face or called offline. Now the government requires schools to change the learning system to online. This slightly makes students and teachers experience a difficulty in learning, because schools have to change the system in learning, namely through the internet, which initially teachers use the media system and teach face to face, because of the Covid-19 pandemic, finally teachers and students are limited by distance in learning, and finally the effectiveness in learning is a little problematic because there are several factors that interfere with learning, including sometimes students in online learning have few obstacles, such as among students not having cellphones to study online and sometimes students have problems with the signal in their respective villages.

Keywords: *Effect of Online Learning, Pandemic Period, Student Achievement.*

Abstract

Pendidikan dimasa Pandemi Covid-19 yang kini menjadi sebuah faktor utama masalah dalam dunia pendidikan, sekolah kini dibatasi dalam bertatap muka atau disebut Luring (Luar jaringan) kini pemerintah mewajibkan sekolah harus merubah sistem pembelajaran menjadi Daring (Dalam Jaringan). Hal tersebut sedikit membuat siswa dan guru mengalami sebuah kesulitan dalam belajar, karna sekolah harus merubah sistem dalam belajar yaitu melewati internet, yang awalnya guru menggunakan sistem media dan mengajar bertatap muka, karna adanya Pandemi Covid-19 akhirnya guru dan siswa terbatas jarak dalam belajar, dan akhirnya keefektifan dalam belajar sedikit bermasalah karna adanya beberapa faktor yang mengganggu dalam belajar, diantaranya terkadang siswa dalam belajar Daring siswa memiliki sedikit kendala, seperti diantara siswa tidak memiliki gadget untuk belajar Daring dan kadang siswa terkendala pada sinyal di desa masing-masing.

Keywords: Masa Pandemi, Pengaruh Pembelajaran Online, Prestasi Siswa.

I. PENDAHULUAN

Pendidikan menjadi sebuah tempat setiap anak bertatap muka dengan seorang guru untuk belajar, sebelum sebuah kejadian wabah Covid-19 siswa masih aktif sekolah untuk bertatap muka dan asik belajar, namun sejak adanya wabah yang menyebar dan sangat meluas di setiap kota dan bahkan negara terutama Indonesia, sejak adanya Covid-19 pendidikan yang awalnya normal sedikit tidak normal yaitu diliburkan sejak bulan Maret 2020, pada awal masuknya Covid-19 pada Indonesia hingga masuk berita di kota-kota kecil hingga akhirnya pemerintah menetapkan keputusan sekolah dari tingkat SD hingga Mahasiswa bahkan juga anak didik atau anak TK juga diliburkan. Belajar merupakan kunci pertama dalam dunia pendidikan. Dunia pendidikan telah berbeda mengapa tidak, terjadinya pandemi covid 19 sejak ditetapkan sebagai bencana nasional membuat pembelajaran seketika diberhentikan untuk sementara hal tersebut, menyebabkan para peserta didik mengalami kebingungan bagaimana jika pandemi ini semakin berkelanjutan.

Sejak mula masuknya Covid-19 menjadikan siswa dalam belajar sudah terganggu yang biasanya aktif belajar disekolah dari mereka yang aktif bertanya, aktif dalam menjawab sebuah pertanyaan dan diskusi, kini siswa mulai diliburkan dalam pembelajaran bertatap muka. Kejadian pandemi yang telah terjadi sudah hampir dua tahun lamanya membuat suasana dalam pembelajaran menjadi membosankan dan kurang efektif. Media yang digunakan, penurunan terhadap prestasi, membuat mereka merasa kebingungan dan kesusahan. Membahas dampak yang terjadi dibalik pandemi dalam ranah pendidikan yakni pembelajaran dilakukan secara tidak manual yakni secara online. Adanya pembelajaran online di dalamnya terdapat dampak yang sering terjadi dimana mengenai akses internet serta kurangnya adanya fasilitas yang diperlukan. Dampak yang terjadi bukan hanya terhadap guru melainkan pemahaman yang dimiliki oleh peserta didik seakan hanya terbatas parahnya target yang akan di capai semakin hari semakin mengurangi standart. Sedangkan, di dalam pendidikan sendiri perlu mengikuti perkembangan baik dalam ranah media serta pembelajaran.

Pada dasarnya, tahap atau proses pembelajaran yang dilalui dalam masa pandemi saat ini perlu lebih kita pahami serta selalu mengantisipasi akan keadaan-keadaan yang kita sebagai manusia tidak pernah tahu mengenai hal-hal yang tidak terduga dalam pendidikan maupun keluarga. Pembelajaran online disini perlu perlu ditegaskan kembali bahwasannya menurut Arif S. Sadiman dkk (2003) menyatakan bahwasannya media sendiri sebagai saluran yang digunakan oleh orang-orang dengan bertujuan agar dapat menyalurkan adanya suatu pesan serta informasi yang didapatkan. Secara garis besar dapat kita simpulkan bahwasannya pembelajaran berbasis media online ialah suatu penggunaan yang dilakukan dalam proses pembelajaran yang dimana di dalamnya memanfaatkan tersdapatnya media teknologi atau informasi agar lebih mudah.

Pembelajaran melalui media online, dibaliknya bukan hanya terdapat dampak tetapi dibalik pembelajaran online terdapat adanya suatu kelebihan yang dapat menjamin kelayakan media teknologi jika digunakan dalam pembelajaran. Teori tersebut diungkapkan oleh Munir (dalam Nurita P. 2013:140) didalamnya menyatakan bahwasannya kelebihan dalam penggunaan media pembelajaran sebagai sarana terlaksananya pembelajaran online ialah diantaranya mencakup 1) meningkatnya terhadap interaksi pembelajaran, 2) mempermudah cara berinteraksi dikarenakan, memiliki kebebasan yakni dimanapun dan kapan saja, 3) terdapat jangkauan yang sangat luas artinya, di dalam maupun diluar daerah tersebut tetap bisa dilaksanakan, 4) terakhir dapat mempermudah penyimpanan mengenai materi-materi yang diberikan oleh pendidik.

Permasalahan dalam penelitian pembuatan artikel ini dimana di dalamnya berfokus terhadap bagaimana pengaruh akan pembelajaran online yang telah lama dilakukan serta, bagaimana dengan adanya mengenai pengaruh pembelajaran online terhadap masing-masing prestasi peserta didik. Menurut KBBI prestasi sendiri diartikan sebagai adanya hasil yang telah dicapai, telah dilakukan, dan dikerjakan, dengan kata lain, adanya pengaruh terhadap prestasi sangatlah perlu menjadi pantauan bagi setiap masing-masing seorang guru tujuannya, dengan begini seorang guru

akan mengetahui bagaimana progress dalam setiap pembelajaran yang dilakukan secara online.

Alasan pengangkatan dalam permasalahan ini dimana, kita dapat mengetahui bagaimana dengan adanya progress dalam pendidikan sendiri dengan tetap menetapkan protokol kesehatan saat dalam pelaksanaan aktivitas pembelajaran secara online. Pembelajaran melalui daring ini sebagai bukti bahwasannya produk aktivitas belajar dari rumah diberi umpan balik. Sedangkan seseorang dapat dikatakan telah berhasil dalam belajar jika ia mampu menunjukkan adanya perubahan dalam dirinya. Maka prestasi disini, bahwa hasil belajar dalam pembelajaran dengan adanya perubahan tingkah laku hasil dari interaksi antara guru dan siswa dalam proses belajar. Menurut Nitko (2011:18) bahwasannya keberhasilan dalam adanya pembelajaran adalah dimana tercapainya beberapa tuantujuan pembelajaran dengan oobjektiv serta, dengan adanya hasil akhir dan proses yang menjadkannya efektif dan psikomotor.

Bermulanya keefektifan belajar menjadi pengaruh utama dalam mendapatkan progress dalam keberhasilan pembelajaran yang dilakukan. Keefektifan pembelajaran sendiri ialah menurut Dean (2000:51) mengemukakan bahwasannya menurutnya keefektifan pembelajaran merupakan adanya kesuksesan dalam pembelajaran yang ditandai dengan adanya keinginan siswa sedangkan, nilai yang diperoleh oleh siswanya sangat mempengaruhi hasil dari keefektifan pembelajaran disamping faktor-faktor yang terjadi. Sedangkan dalam pemberlakuan sistem pembelajaran saat ini mungkin sering terjadinya kegagalan dalam pembelajaran sendiri, hal ini disebabkan penggunaan media serta metode yang digunakan dalam sistem pembelajaran online sendiri. Oleh karena itu mengapa prestasi sendiri dikategorikan sangatlah penting dalam ranah progres pembelajaran maupun kemajuan dalam berfikir pembelajaran secara online.

II. METODE PENELITIAN

Dalam Penelitian ini, penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif, di dalam penelitian tersebut mendeskripsikan bagaimana tingkat pola pembelajaran siswa siswi SMP terhadap

prestasi siswa selama sebelum Covid-19 dan saat terjadinya Covid-19. Adanya beberapa ahli yang telah menjabarkan mengenai maksud dalam penelitian deskriptif kualitatif menjadikan tambahan wawasan untuk sebuah penelitian ini, penelitian ini menekankan sebuah fakta adanya pembelajaran yang terjadi dalam sekolah saat sebelum Covid-19 datang, pendidikan disekolah sebelum Covid-19 ramai di masyarakat terutamanya di pedesaan, pendidikan normal seperti biasanya, setiap sekolah selalu bertatap muka untuk belajar, namun sejak datangnya Covid-19 di Indonesia pada bulan Maret 2020 menjadikan pemerintah meliburkan semua sekolah, baik tingkat SD sampai dengan Mahasiswa di Institut dan Universitas.

Menurut Arikunto (2010:151), menjelaskan bahwasannya penelitian deskriptif yaitu di dalamnya mengumpulkan adanya data yang berdasarkan faktor-faktor yang menjadikan pendukung terhadap suatu objek penelitian, kemudian menganalisa faktor-faktor tersebut untuk dicari perannya. Pendapat lain mengenai makna deskriptif kualitatif dikemukakan oleh Sulisty, Basuki (2006:24), penelitian kualitatif merupakan penelitian yang berhubungan dengan adanya ide, persepsi, pendapat, kepercayaan yang akan diteliti dan kesemuanya tidak dapat di atur dengan adanya angka.

Pada penelitin ini berdasarkan adanya suatu permasalahan dalam pengaruh pembelajaran online terhadap prestasi siswa siswi SMP, bertujuan mengangkat fakta, kejadian, serta keadaan yang terjadi terhadap para peserta didik selama adanya pembelajaran secara online. Alasan peneliti menggunakan metode penelitian ini dimana, dalam suatu ranah jenjang pendidikan masing-masing memiliki standar cara belajar sendiri, serta banyak hal yang masih belum diketahui dalam pengaruh pola belajar terhadap prestasi peserta didik. Peneliti juga dapat belajar mengenai bagaimana timbulnya adanya permasalahan prestasi siswa dalam belajar secara lebih kompleks dengan cara adanya situasi sosial yang dilakukan.

Adanya pembelajaran yang diselenggarakan sebelum terjangkit pandemi pada saat ini, pembelajaran dilakukan secara bertatap muka. Adanya penelitian ini kita dapat mengetahui bahwasannya aktivitas dalam pembelajaran yang terjadi sebelum pada masa pandemi

terjadi, para peserta didik dapat menunjukkan bakat serta prestasinya. Terselenggaranya pembelajaran pun dilakukan secara lebih terstruktur dan kondusif dikarenakan, hal yang menjadi pembeda pada masa terjadinya Covid-19 saat ini pembelajaran yang telah terstruktur menjadi kurang kondusif kembali dikarenakan, fasilitas media kurang memadai dan terjangkitnya akses internet yang terbatas.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Dampak Covid-19 pada Pendidikan

Pendidikan merupakan hal utama dalam mencari sebuah ilmu, dalam pendidikan terjadi interaksi antara seorang guru dalam mengajar dan seorang siswa yang sedang belajar, dalam hal tersebut interaksi antara seorang guru dan siswa sangatlah penting untuk menjalin sebuah keefektifan dalam belajar, sebelum adanya Covid-19 sekolah selalu belajar bertatap muka antara siswa dengan seorang guru, sejak datangnya Covid-19 pada bulan Maran 2020, sekolah dalam kegiatan tatap muka diliburkan karna aturan dari pemerintah.

Pembelajaran berkaitan dengan adanya proses interaksi yang terjalin antara murid dan guru, dengan berkesinambungan serta bekerja sama dalam membentuk potensi para peserta didik dengan masing-masing kemampuan dan kepercayaan diri mereka masing-masing. Teori diungkapkan oleh Sudirman (2004:45) beliau mengemukakan bahwasannya tatkala pembelajaran sebagai adanya suatu perubahan dalam proses pembelajaran, sehingga dapat dimaknai bahwasannya proses dalam pembelajaran dimaknai sebagai proses suatu tingkah laku dengan keadaan sadar serta dapat mengubah pola aspek tingkah laku yang lebih baik. Peranan orang tua sangatlah penting dalam kelangsungan pembelajaran online yang saat ini sedang terlaksana dikarenakan, dampak yang sering terjadi ialah dalam lingkup penggunaan gadget sendiri. Oleh karena itu pantauan orang tua sangatlah diperlukan sebagai peran pengganti seorang guru saat pelaksanaan pembelajaran online. Teori dikemukakan oleh Arifin (2007:87) bahwasannya menurut teori Arifin orang tua di dalamnya berperan mendidik anak secara langsung saat berada dirumah serta menjadi pelindung dalam terutama pola pikir dan tingkah lakunya. Kedua peranan tersebut

sangatlah cocok dan perlu dilakukan dengan tegas saat masa-masa pembelajaran secara online pada saat ini. Tujuannya agar anak-anak memahami bahwasannya pembelajaran yang dilakukan secara online maupun secara luring tetap berjalan secara efektif dengan berkolaborasi atau bekerja sama dengan masing-masing orang tua.

Sejak Covid-19 datang, menjadikan interaksi antara seorang guru dan siswa sedikit mengalami masalah yaitu antara jarak, karna sekolah dilarang untuk bertatap muka dalam belajar, hal tersebut mempengaruhi keefektifan dalam pembelajaran yang biasanya bertatap muka dalam belajar, kini dimasa Pandemi Covid-19 belajar siswa dibatasi antara jarak dan sistem dalam belajar berubah menjadi Daring (Dalam Jaringan), hal tersebut berpengaruh untuk siswa dalam belajar yang sudah terbatas oleh jarak dan juga waktu belajar. Proses adanya pembelajaran dalam pendidikan yang dilakukan secara virtual atau secara online merupakan kebijakan yang mungkin masih baru digunakan dalam ranah pembelajaran yang ada di Indonesia pada saat ini. Dampak yang terjadi dalam pendidikan selama adanya masa Pandemi Covid-19 ini ialah, terselenggaranya pembelajaran seakan menjadi kendala bagi masing-masing individu para siswanya. Hal tersebut di dasari oleh adanya penggunaan media pembelajaran yang menjadi sangat terbatas, begitu juga dalam penggunaan akses internet yang kini menjadi lebih utama dalam menjalin hubungan interaksi antara guru dan siswa dalam pembelajaran secara virtual pada saat ini.

B. Pembelajaran pada Masa Covid-19

Pembelajaran yang telah terjadi dalam ranah lingkup pendidikan pada masa Pandemi Covid-19 saat ini termasuk dalam kategori yang kurang aktif dan pasif dikarenakan pada saat ini pembelajaran sudah dibatasi dengan jarak jauh yang sekarang disebut sebagai PJJ (Pembelajaran Jarak Jauh), hal inilah yang menjadikan pembelajaran kurang aktif, pembelajaran saat ini selalu tergantung pada sistem teknologi yang diandalkan, jika sinyal dan teknologi tidak memadai maka itu menjadi masalah untuk pembelajaran.

Menurut narasumber ibu Fitri yakni, guru dari sekolah SMP Pakuniran 2, ketika diwawancarai mengenai sekolah pada masa pandemi ini, bahwasannya menurut Ibu Fitri

yang merupakan seorang guru sekolah tersebut menjelaskan tentang pembelajaran yang dilakukan secara online di sekolah tersebut ini tidak begitu efektif. Menurut Ibu Fitri pada masa-masa Covid-19 saat ini, pembelajaran tidak selalu dilakukan secara online namun, terkadang pembelajaran diselingi dengan adanya pembelajaran secara luring (*blend*). Adanya Hal seperti ini dilakukan masing-masing kelas agar dapat melakukan pembelajaran secara luring satu minggu 1 kali dikarenakan, telah diketahui juga dalam kemendikbud pembelajaran secara tatap muka masih belum diperbolehkan atau masih dilarang untuk mengadakan tatap muka disekolah.

Menurut narasumber yakni salah satu peserta didik dari sekolah tersebut bernama Bunga Firdausi, menurutnya pembelajaran yang dilakukan pada saat ini kurang begitu efektif, serta, menurutnya juga tidak bertemu dengan teman-teman membuatnya dalam mengikuti pembelajar menjadi agak membosankan. Menurutnya ketika sekolah daring terkadang malas untuk sekolah dan kegiatan dalam belajarpun tidak berubah, hanya itu-itu saja.

Pada masa Pandemi Covid-19 siswa harus aktif dalam belajar Daring (dalam jaringan), adanya ketetapan keputusan rapat yang dilakukan oleh pemerintah menteri pendidikan dan kebudayaan telah mengharuskan pembelajaran dilakukan melalui virtual. Kebijakan dalam pendidikan yang terjadi dalam ranah pembelajaran melalui pelaksanaan daring, sebagai jalan satu-satunya dimana, adalah model pembelajaran yang dilakukan saat pandemi dengan mengedepankan adanya protokol kesehatan yang telah diberlakukan oleh pemerintah setempat. Diketahui bahwasannya tujuan dengan adanya pemberlakuan secara PSBB ini bertujuan untuk memutus rantai kematian yang disebabkan oleh adanya Covid-19 itu sendiri dikarenakan, keselamatan keluarga, peserta didik dan dalam lingkup kependidikan sangatlah dibutuhkan terutama sebagai upaya dalam perlindungan diri dan pola pikir serta tingkah laku dalam menjunjung tinggi adanya kemajuan secara individu maupun bernegara.

Dilema guru yang seringkali terjadi yakni dimana, seorang guru sendiri dapat merasakan kesulitan dalam mengetahui bagaimana proses kemajuan dalam pencapaian dalam suatu

pembelajaran yang dilakukan. Terkadang adanya beberapa siswa yang kurang bersemangat dalam menyelesaikan tugas-tugasnya, jika sekiranya ada yang mengerjakan tugas tersebut tetap, mungkin guru tidak terlalu menjamin pekerjaan tersebut dilakukan oleh anak sendiri apakah, hasil kerja dari orang lain atau orang tua. Pentingnya dalam pembelajaran secara online di sini yakni seorang guru dapat selalu bekerja sama dengan seluruh peserta didiknya agar dapat mencapai pembelajaran yang diinginkan.

C. Sistem Pembelajaran Online

Aktivitas pembelajaran yang dilakukan selama masa pandemi Covid-19 mempengaruhi bagaimana adanya sistem pembelajaran yang dilakukan oleh guru dan peserta didik. Proses dalam sistem pembelajaran saat ini dilakukan secara virtual yakni menggunakan akses internet sebagai media utama dalam berlangsungnya pembelajaran seperti, prnggunaan media zoom, google class room, telegram, e-learning, dan masih banyak lagi yang lainnya.

Sistem pembelajaran sendiri ialah menurut Devlin (dalam Tuti Andriani, 2015:128) mengemukakan bahwasannya kata sistem sendiri bisa kita ketahui dengan makna metode, rencana, aturan, keteraturan, kebiasaan, susunan rencana, jalan cara, kebijakan, dll. Sedangkan, menurut Roestiyah (dalam Tuti Andriani, 2015:129) sistem dapat didefinisikan sebagai adanya suatu desain atau susunan yang dilakukan secara sengaja. Yang dimana di dalamnya tersebut telah mencakup suatu komponen, yang berfungsi melalui cara demi mencapai tujuan tersebut.

Sistem pembelajaran yang dilakukan oleh SMP Pakuniran 2 yakni, beberapa aplikasi yang sering kita ketahui seperti, *whatsApp*, *goole class room*, *google drive*, dan *zoom*. Tanggapan ibu Fitri mengenai sistem pembelajaran saat ini yakni “kami dari pihak sekolah menggunakan usaha dari berbagai aplikasi di atas tersebut, serta kami mencari solusi dengan melakukan peningkatan IT tujuannya agar dalam pembelajaran tetap terlaksana” ucapnya beliau. Menurut beliau penggunaan media seperti *zoom* kurang begitu efektif maka dari itu, saat ini sekolah tersebut lebih familiar terhadap penggunaa “*google drive*”.

Tanggapan lain juga dikemukakan oleh salah satu peserta didik dari sekolah tersebut

dimana menurutnya penggunaan *google drive* pada saat ini termasuk aplikasi yang sangat efektif dilakukan karena, dalam pengumpulan tugas mereka langsung menggunakan *google drive* sebagai media pengumpulan tugas.

Namun, sistem secara tatap muka kini telah mulai dilakukan dari beberapa sekolah. Guru perlu memastikan dengan sangat jelas terhadap peserta didik agar selalu mengikuti pembelajaran. Adanya perihal tersebut, masing-masing sekolah kali ini telah memiliki kebijakan masing-masing dengan rapat bersama, setelah ditelusuri dan mendapatkan info dari berbagai sekolah ternyata sistem tersebut telah sama dilakukan dari berbagai sekolah. Oleh karena itu, dalam sistem sendiri di dalamnya memiliki tujuan tertentu di mana, dalam sistem itu sendiri memiliki 3 ciri utama yang sebagai berhasil atau tidaknya dalam terselenggaranya sistem tersebut, seperti memiliki tujuan tertentu, serta fungsi dan yang terakhir perlu mencapai komponen.

Sistem pembelajaran dalam pendidikan kali ini telah mengharuskan kita sebagai peserta didik serta para guru lainnya agar lebih produktif lagi dengan adanya perubahan pola pikir serta tingkah laku yang perlu diperhatikan. Mengharuskan adanya peluang kemajuan serta perkembangan dalam setiap waktu demi adanya progres.

D. Masalah dan Solusi Pembelajaran

Dalam pembelajaran online yang dilakukan pada saat ini telah memiliki banyak kendala serta adanya permasalahan yang perlu dihadapi oleh seorang guru maupun para siswa siswinya. Permasalahan yang sering terjadi yakni 1). Lokasi rumah yang jauh dari sekolah sehingga menyebabkan gangguan tidak terjangkaunya sinyal, 2). Media yang diterapkan oleh guru sering kali seperti video, pesan suara, yang rata membuat peserta didik merasakan kejenuhan dalam mengikuti pembelajaran, 3). Pembelajarannya sendiri tidak begitu dominan interaktif, 4). Selain pembelajaran dilakukan secara online maka pemberian tugas pun melalui secara online, maka tidak jarang para peserta didik mengalami kesulitan dalam memahami dan akhirnya memilih tidak mengerjakan.

Menurut data yang di dapatkan dari narasumber yakni ibu Fitri bahwasannya permasalahan yang sering dihadapi yakni sebagian para peserta didik setelah ditelusuri

mengungkapkan bahwa, mereka kebanyakan selalu berasumsi tidak memiliki HP, jaringan sinyal kurang maksimal, tidak memiliki data dan masih banyak yang tidak memiliki HP, dan sebagainya. Sedangkan permasalahan yang di dapatkan oleh peserta didik seperti, mereka yang awalnya selalu mengalami peningkatan dalam pembelajaran dan prestasi, mengungkapkan bahwasannya mengalami penurunan dari segi nilai yang dia dapatkan. Ungkapan tersebut langsung diungkapkan oleh peserta didik sendiri menurutnya sebelum terjadinya pandemi Covid-19 nilai tertinggi yang pernah ia dapatkan yakni 96 karena dalam masing-masing soal mendapatkan 4 point, sedangkan saat terjadinya masa pandemi ia mengalami penurunan nilai yakni seperti 74.

Permasalahan lain yang diungkapkan oleh murid tersebut dimana, mengenai media sendiri menurutnya penggunaan media yang dilakukan saat pembelajaran online tidak biasa dan tidak enak. Terlebih lagi menurutnya sistem dalam keterbukaan prestasi tidak diberitahukan oleh gurunya melainkan hanya sebatas penilaian saja yang mengalami keterbukaan. Terlebih lagi para peserta didik yang lain memang mengakui bahwasannya pembelajaran secara online kurang begitu mengena atau kurang efektif.

Terdapatnya beberapa penjelasan di atas yang telah dituturkan langsung oleh guru SMP Pakuniran II serta tanggapan langsung peserta didiknya, dapat di simpulkan secara garis besar bahwasannya permasalahan yang telah terjadi memang sangatlah familiar dan sering terjadi dari berbagai sekolah. Terungkapnya perihal permasalahan ini membuat para guru dari sekolah tersebut mencari solusi dengan diadakannya musyawarah atau rapat secara bersama, tujuannya agar segera mendapatkan solusi terbaik dalam mengatasi beberapa permasalahan yang mungkin bukan hanya satu peserta didik saja yang mengalami melainkan dapat melebihi.

Sebagai seorang guru tentunya menjadi panutan bagi para muridnya apalagi oleh masing-masing wali muridnya, maka untuk menjauhi permasalahan dan kendala seperti ini perlunya seorang guru mengirim pembelajaran 1 atau 2 hari sebelum di mulainya pembelajaran. Tujuannya untuk menghindari permasalahan dengan sinyal agar masing-masing dari mereka dapat

mempelajarinya terlebih dahulu apalagi, bagi mereka yang tidak memiliki HP. Permasalahan seperti inilah perlu adanya kerja sama antara guru dan murid.

Penjelasan di atas, telah membuktikan bahwa adanya pemberlakuan pembelajaran secara online membuat adanya beberapa masalah serta perlu terlaksananya solusi yang telah ditetapkan melalui musyawarah. Terlaksananya pembelajaran di dalamnya perlu adanya pendekatan dalam pembelajaran, strategi dalam pembelajaran, metode dalam pembelajaran, teknik, taktik, dan model dalam pembelajaran. Perlu adanya inovasi dalam setiap pembelajaran yang dilakukan dimana, kita ketahui terlebih dahulu mengenai makna inovasi dalam keterkaitan terhadap suatu pembelajaran.

Inovasi sendiri ialah, proses pembelajaran yang dirancang dan dikembangkan secara kreatif oleh seorang guru dengan menerapkan multi kearah yang lebih baik, tujuannya agar setiap pembelajaran yang dilakukan menjadi lebih efektif dan terstruktur. Teori pembelajaran inovatif lainnya di nyatakan oleh Roger, (2003), dimana inovasi sendiri digunakan dalam keadaan pembelajaran maupun lainnya tujuannya agar dapat mencapai tujuan tertentu dalam memecahkan masalah. Kesimpulan dari penjelasan inovasi dalam pembelajaran ini dimana, inovasi sendiri digunakan dalam pendidikan sebagai suatu ide atau gagasan/strategi/metode, untuk mencapai tujuan dalam pendidikan, serta dalam memecahkan masalah dalam pendidikan.

SMP Negeri Pakuniran II telah menjadi objek kami dalam melaksanakan penelitian dalam penulisan karya ilmiah ini. Membicarakan suatu inovasi dalam pembelajaran dapat diketahui dalam penjelasan di atas bahwasannya adanya perihal inovasi pembelajaran yang dilakukan tidak semerta-merta sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Namun, inovasi dalam pembelajaran tersebut adakalanya berhasil dilakukan oleh seorang guru yang bertugas. SMP Negeri Pakuniran II kemudian menggunakan satu inovasi dengan internet tujuannya, pembelajaran yang dilakukan dalam masa pandemi ini dimana, media yang sangat dibutuhkan yakni internet itu sendiri serta sebagai penunjang dalam terlaksananya pembelajaran. pembelajaran yang kini

sangatlah berbasis menggunakan internet tentunya memiliki perubahan seperti metode, strategi, dan teknik dalam pembelajaran. Berikutnya, dalam penggunaan website tentunya dapat membantu pekerjaan seorang guru maupun murid dalam mencari suatu informasi dan inovasi apa saja yang akan dibutuhkan nanti untuk kedepannya. Keuntungan menggunakan media internet sebagai penunjang dalam pembelajaran tentunya pertama, dapat memudahkan seorang guru dalam menyajikan pembelajaran walaupun secara online. Kedua, siswa dapat lebih mudah dalam mencari pembelajaran maupun tutorial yang bersangkutan dengan pembelajaran yang masih kurang dimengerti dan mencari bahan informasi lainnya.

Adanya penggunaan inovasi di atas dapat memudahkan orang tua dalam mengetahui bagaimana proses pembelajaran yang dilakukan atau yang diikuti oleh anak-anaknya. Perlunya kesesuaian dalam inovasi ini agar inovasi tersebut dapat dilakukan secara lebih efektif.

IV. KESIMPULAN

Dijelaskan bahwasannya, dalam pendidikan yang terjadi dalam ranah masa pandemi Covid-19 ini memberikan kita banyak pengetahuan mengenai pengaruh pembelajaran online serta, sistem pembelajaran online yang telah terjadi selama hampir 2 tahun ini. Sejak pembelajaran ditetapkan dilakukan secara online proses pembelajaran menjadi sangatlah berbeda mulai dari strategi, metode, serta peraturan yang tidak dapat menyamai saat pembelajaran secara tatap muka. Terlaksananya pembelajaran saat masa pandemi mengalami beberapa kendala serta pengaruh yang perlu diketahui.

Permasalahan dalam penelitian pembuatan artikel ini dimana di dalamnya berfokus terhadap bagaimana pengaruh akan pembelajaran online yang telah lama dilakukan serta, bagaimana dengan adanya mengenai pengaruh pembelajaran online terhadap masing-masing prestasi peserta didik. Metode deskriptif kualitatif menjadi metode yang digunakan dalam penelitian ini. Selain permasalahan yang terjadi terhadap perubahan prestasi peserta didik, media yang digunakan sering menjadikan alasan bagi mereka yang tidak ingin mengikuti pembelajaran tidak lupa

sarana media pembelajaran menjadi kurang efektif saat pembelajaran dilakukan.

Adanya keputusan atau solusi yang di diskusikan secara bermusyawarah antara masing-masing guru tujuannya, agar mendapatkan pemecahan masalah yang sering terjadi serta dapat menghambat adanya proses pembelajaran secara online. Penelitian ini berdasarkan adanya suatu permasalahan dalam pengaruh pembelajaran online terhadap prestasi siswa dan siswi SMP.

UCAPAN TERIMA KASIH

Rasa syukur, kami ucapkan terima kasih terhadap dosen dan tim yang telah bekerja sama demi terselenggaranya penelitian dalam penulisan karya ilmiah ini. Penelitian yang telah terlaksana mengenai "Pengaruh Pembelajaran Online Pada Masa Pandemi Covid 19 Terhadap Prestasi Belajar Siswa Kelas IX SMP" terlaksananya penelitian ini tidak akan berjalan tanpa adanya kerja sama tim serta dukungan dari pihak dosen pembimbing dalam terbentuknya penulisan karya ilmiah ini.

Tidak lupa pula, kami ucapkan terina kasih terhadap pihak sekolah serta narasumber yang telah meluangkan waktu dan kesempatannya dalam memberikan informasi, saran, dan ilmunya demi terlaksananya penelitian ini. Kami berharap, penelitian dalam penulisan karya ilmiah ini menjadi inspirasi bagi pembaca serta, dapat memberikan pembelajaran dan ilmu bagi kami

V. DAFTAR PUSTAKA

- Nitko, A. J., & Brookhart, S. M. (2011). *Educational assessment of student (6thed.)*. Boston: Pearson Education
- Dean, J. 2000. *Improving Children's Learn-ing: Effective Teaching in The Primary School*. London: Routledge
- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta
- Basuki, Sulisty. 2006. *Metode Penelitian*. Jakarta: Wedatama Widya Sastra.
- Tuti, Nurita, P. 2013. *Cara Membuat Media Pembelajaran Online Menggunakan Edmodo*. Vol 2. No 2. E-ISSN: 2407-1536. P-ISSN: 2089-2802
- Arif S. Sadiman dkk. 2003. *Media Pendidikan, Pengertian, Pengembangan dan*

Pemanfaatan. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Tuti, Andriani. 2015. *Sistem Pembelajaran Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi*. Vol 12. No 1. E-ISSN: 2407-1684.

Sardirman. 2004. *Interaksi dan Motifasi Belajar*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Arifin. 2007. *Hubungan Timbal Balik Pendidikan Agama Islam di Lingkungan Sekolah dan Keluarga*. Jakarta: Bulan Bintang.

Rogers, E. M. (2003). *Diffusion of innovation*. New York: The Free Press.



***Korespondensi**

Email¹ : siagiandesri6@gmail.com

Email² : rantopalempat@gmail.com

Email³ : riniardhasaputri@gmail.com



Inovbook Publications

Wisma Monex 9th Floor

Jl. Asia Afrika No 133-137 Bandung,
40112



Karya ini dilisensikan di bawah
Lisensi Internasional Creative
Commons Atribusi Nonkomersial
sharelike 4.0.

POLITIK IDENTITAS : STRATEGI NEGOSIASI MARGA DALAM PERNIKAHAN AMALGAMASI PADA ETNIS BATAK DAN MELAYU DI KOTA PANGKALPINANG

Desri Siagian^{1*}, Ranto^{2*}, Rini Archda Saputri^{3*}

^{1,2,3} Universitas Bangka Belitung | Gang IV No.1, Balun Ijuk,
Merawang, Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka Belitung 33172

Disetujui: 25 Juli 2021

Abstract

Identity politics is a political tool of a group such as ethnicity, tribe, culture, religion, or others for a particular purpose, such as to show a personal or group identity. Therefore, in every Amalgamation marriage between Batak and Malay ethnic groups, clan negotiation determines the identity since clan is the main identity of Batak ethnic group that exists from birth. This study aims to describe identity politics of clan negotiation in Amalgamation marriage between Batak and Malay ethnic groups in Pangkalpinang city and the factors that affect the clan negotiation in the marriage between Batak and Malay ethnic groups in Pangkalpinang city.

A theory proposed by Castells was used in this study. It includes 3 forms namely legitimizing identity, resistance identity, and project identity. The method used in this study was qualitative method with a qualitative descriptive approach. Further, this study used snowball sampling technique. The data collection techniques of this research were interview and documentation. In addition, the source of data in this study was obtained from the primary and secondary data.

Based on the result of the study, communication approach, clan inheritance, and Mangan Boru or Mangan Anak are the main patterns in identity politics of clan negotiation in Amalgamation marriage between Batak and Malay ethnic groups in Pangkalpinang city. Further, the factors that affect the clan negotiation in the marriage between Batak and Malay ethnic groups are love and power relation. In conclusion, the finding shows that Batak ethnic group has a dominant power in Amalgamation marriage.

Keywords: *Identity Politics, Clan Negotiation, and Amalgamation Marriage.*

Abstract

Politik identitas merupakan alat politik suatu kelompok seperti etnis, suku, budaya, agama atau lainnya. Dengan tujuan tertentu misalnya, sebagai alat untuk menunjukkan jati diri atau identitas dari suatu kelompok tersebut. Oleh karena itu setiap dalam pernikahan amalgamasi pada etnis Batak terhadap etnis Melayu, negosiasi marga menjadi penentuan dalam identitasnya dikarenakan marga adalah menjadi identitas utama seorang suku Batak dan jati diri yang dibawah sejak lahir. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan politik identitas negosiasi marga dalam pernikahan amalgamasi pada etnis Batak dan etnis Melayu di Kota Pangkalpinang serta faktor-faktor yang mempengaruhi negosiasi marga dalam pernikahan pada etnis Batak dan Melayu di Kota Pangkalpinang.

Penelitian ini menggunakan teori dari Castells yang dikaji dari 3 model yaitu legitimasi identitas, resistensi identitas, dan proyek identitas. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian ini menggunakan snowball sampling. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Sumber data yang digunakan dalam penelitian berasal dari data primer dan sekunder.

Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan dari lapangan bahwa pendekatan komunikasi, pengangkatan marga, dan mangae boru atau mangae anak adalah menjadi pola utama dalam politik identitas negosiasi marga dalam pernikahan amalgamasi pada etnis Batak dan Melayu di Pangkalpinang. Adapun faktor yang mempengaruhi negosiasi marga dalam pernikahan pada etnis Batak dan Melayu yaitu, faktor cinta dan faktor relasi kuasa. Oleh sebab itu berdasarkan hasil temuan dilapangan dapat disampaikan bahwa dalam pernikahan amalgamasi ini yang dominan memiliki relasi kekuasaan adalah Etnis Batak.

Kata Kunci: Politik identitas, Negosiasi marga dan Pernikahan Amalgamasi.

I. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang terdiri dari berbagai suku bangsa dengan adat istiadat yang berbeda-beda, suku-suku tersebut di antaranya Jawa, Batak, Sunda, Madura, Bugis, Nias, Betawi, Melayu, Dayak dan suku lainnya. Etnis Batak merupakan etnis yang memiliki populasi terbesar di Indonesia. Seiring dengan perkembangan zaman etnis yang mula-mula merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai nilai-nilai budaya yang positif yang terbentuk sebagai sebuah komunitas adat serta membentuk dewan adat yang berfungsi sebagai lembaga adat yang memfasilitasi masyarakat.

Menurut Miftahul Khyarah (2017:1-2) politik identitas memiliki dua macam pendekatan, yang pertama pendekatan primodialisme yakni sebuah ikatan yang terbentuk secara alami yang dilihat dari batasan-batasan dalam etnis seperti misalnya, ikatan keagamaan, hubungan kekerabatan, ras, bahasa, daerah, dan adat istiadat. Dalam politik

identitas membahas tentang pengenalan antara kesamaan dan perbedaan, maka dari situ melihat dari situasi Kota Pangkalpinang dengan keberagaman etnis, suku, dan budaya dimana akan mempengaruhi munculnya adanya pernikahan amalgamasi. Politik identitas secara teoritis menurut Lukmantoro dalam Jahana N (2018:36) adalah politik untuk mengedepankan kepentingan-kepentingan dari anggota-anggota suatu kelompok karena memiliki kesamaan identitas atau karakteristik, baik berbasiskan pada ras, etnisitas, jender maupun keagamaan.

Dalam konteks politik identitas pada pernikahan amalgamasi ini menjadi posisi yang kuat untuk memahami pola atau relasi kuasa dari kedua etnis tersebut. Adapun pola komunikasi yang dibangun oleh kedua etnis yang sudah melakukan pernikahan amalgamasi dalam bentuk usaha untuk menentang identitas yang ada pada diri mereka sendiri melalui pemberian marga dan akan lebih mudah ketika pola pendekatan komunikasi yang dibangun mengikutsertakan hubungan kekeluargaan agar bersifat aktif. Melihat dari pola pendekatan komunikasi yang terbentuk dalam keluarga, posisi identitas politik itu sendiri akan terbentuk untuk menyatuhkan kedua etnis yang sudah melakukan pernikahan dan setelah terbentuknya pola komunikasi yang baik antar kedua etnis tersebut selanjutnya akan dilakukan pengangkatan marga oleh etnis Batak terhadap etnis Melayu untuk memperkuat adat budaya Batak itu sendiri. Selain pola komunikasi dalam posisi politik identitas sikap toleransi dan keterbukaan terhadap perbedaan juga menjadi posisi yang kuat dalam membentuk pernikahan amalgamasi.

Penelitian ini disusun sebagai usaha untuk mengetahui bagaimana politik identitas negosiasi marga dalam pernikahan amalgamasi khususnya etnis Batak dan etnis Melayu yang sudah melakukan pernikahan. Mengingat bahwa pernikahan amalgamasi ini disebabkan oleh beberapa faktor-faktor terjadinya pernikahan beda etnis. Penelitian ini dilakukan di Kota Pangkalpinang. Rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut, bagaimana politik identitas negosiasi marga dalam pernikahan amalgamasi pada etnis Batak di Kota Pangkalpinang? dan apa faktor-faktor yang mempengaruhi negosiasi marga

dalam pernikahan pada etnis Batak dan Melayu di Kota Pangkalpinang? Adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut mendeskripsikan fenomena politik identitas negosiasi marga dalam pernikahan amalgamasi pada etnis Batak di Kota Pangkalpinang dan menganalisis apa faktor-faktor yang mempengaruhi negosiasi marga dalam pernikahan pada etnis Batak dan etnis Melayu di Kota Pangkalpinang.

Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini, peneliti mengkaji beberapa penelitian terdahulu, yaitu: Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Habibi (2017) yang berjudul "Analisis Politik Identitas di Indonesia". Penelitian ini membahas tentang politik identitas di Indonesia. Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Tony Fery Sanjaya Manurung (2010) yang berjudul "Marga Sebagai Kekuatan Politik". Penelitian ini membahas tentang marga merupakan unsur politik Batak dalam adat yang dimilikinya. Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Juwita Veronica (2017) yang berjudul "Negosiasi Identitas Pernikahan Tanpa Marga pada Pasangan Campuran Suku Batak". Penelitian ini membahas tentang negosiasi identitas yang dilakukan pada pasangan campuran yang melakukan pernikahan tanpa pemberian marga dan bagaimana pasangan Batak yang melakukan pernikahan memaknai pada pernikahan campuran. Dari ketiga penelitian terdahulu terdapat persamaannya dengan penelitian yang dilakukan peneliti yakni kesamaan objek, subjek, metode yang digunakan oleh peneliti. Sedangkan perbedaan dalam penelitian ini yakni pada penelitian pertama fokus pada analisis politik identitas di Indonesia. Pada penelitian yang kedua fokus pada cara pemberian marga yang dijadikan sebagai alat politik. Kemudian pada penelitian ketiga membahas bagaimana negosiasi identitas pernikahan tanpa marga pada pasangan campuran suku Batak. Perbedaan dalam penelitian ini peneliti akan mengkaji tentang fenomena politik identitas negosiasi marga dalam pernikahan amalgamasi pada etnis Batak di Kota Pangkalpinang dan faktor-faktor yang mempengaruhi negosiasi marga dalam pernikahan terhadap etnis Batak dan etnis Melayu di Kota Pangkalpinang.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dirancang menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif dinilai relevan untuk mengkaji politik identitas negosiasi marga dalam pernikahan amalgamasi pada suku Batak di Pangkalpinang. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Mei hingga Juni 2020 yang bertempat di Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Subyek penelitian ini adalah 6 orang pasangan etnis Batak dan etnis Melayu yang melakukan pernikahan, 1 orang tokoh adat Batak dan 1 orang tokoh adat Melayu yang menjadi informan kunci dalam penelitian ini dan juga 1 orang masyarakat Melayu dan 1 orang masyarakat Batak sebagai pelengkap dalam penelitian. Sumber data pada penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu primer dan sekunder. Data primer pada penelitian ini berasal dari wawancara dan data sekunder bersumber dari dokumentasi yang dibutuhkan seperti dokumen, buku, foto dan sebagainya.

Hasil penelitian ini dianalisis menggunakan tiga komponen pengolahan data yaitu: Pertama reduksi data merupakan memilah dan memilih data-data yang sudah dikumpulkan. Kedua display data merupakan data sistematis yang sudah diperoleh sedemikian rupa, data ini dapat berupa tabel, matrik, grafis dan lain-lain serta penarikan kesimpulan peneliti mampu menjawab rumusan masalah.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Fenomena Pernikahan Amalgamasi di Kota Pangkalpinang

Pernikahan	Etnis Batak	Etnis Melayu
1	Nadia Sirait (22)	Andrew (28)
2	Pandapotan Sigalingging (40)	Daliza (39)
3	Danny Silalahi (43)	Tere Hutagalung (42)
4	Firman Pardede (51)	Seiyati Gultom (43)
5	Apdol Gultom (57)	Candralela Samosir (48)
6	Yoki Simanjuntak (27)	Elvandari (37)

Dari keenam pasangan yang melakukan pernikahan berbeda etnis tersebut menjelaskan bahwa pernikahan antara etnis Batak dan Etnis Melayu memiliki relasi kekuasaan yang dominan pada etnis Batak sesuai yang peneliti

dapat dilapangan. Bentuk relasi kuasa ini ialah bahwa etnis Batak lebih mendominasi dalam fenomena pernikahan amalgamasi tersebut dan menjadikan identitas tersebut sebagai alat untuk sebuah kekuasaannya dan sering menjadikan sebuah indikator yang mempublikasikan terkait khusus pada simbol identitas yang dimilikinya sehingga orang Batak tersebut mampu menarik orang yang bukan etnis Batak terhadap kebudayaan adat yang dimiliki dan menjadikan marga sebagai kekuasaan dalam penentu kedudukannya dalam adatnya nanti. Dimana dalam kasus pernikahan yang peneliti lakukan antara etnis Batak dan Etnis Melayu tersebut jelas bahwa negosiasi marga dilakukan dalam pihak adat kesukuan orang Batak. Setiap kasus pernikahan yang peneliti teliti, bahwa orang Bataklah yang dominan menarik orang Melayu untuk masuk kedalam kesukuan adat Batak dikarenakan pada dasarnya istrilah yang akan mengikut suami. Dari beberapa kasus yang peneliti lakukan bahwa laki-laki orang Batak lebih Banyak melakukan pernikahan antara perempuan orang Melayu namun bukan tidak ada laki-laki orang Melayu melakukan pernikahan antara perempuan Batak hanya saja laki-laki Batak lebih dominan dalam kasus pernikahan tersebut, maka tidak heran jika relasi kekuasaan itu lebih didominasi pada etnis Batak.

B. Proses Negosiasi Marga dalam Pernikahan Amalgamasi pada Etnis Batak di Kota Pangkalpinang

1. Pendekatan Komunikasi

Setiap pernikahan berbeda suku dalam adat Batak sangat diperlukan komunikasi yang baik antar keluarga kedua etnis yang ingin melakukan pernikahan. Dengan adanya pendekatan komunikasi yang baik antar kedua suku yang berbeda tersebut mampu untuk menjalin sebuah keakraban dalam sistem *partuturon* (keluarga). Selain untuk membentuk sebuah kekeluargaan bahwa pendekatan komunikasi ini juga sudah menjadi dasar utama ketika antar kedua suku ingin melanjutkan hubungan yang sah baik secara agama maupun adat istiadatnya. Dengan adanya pendekatan komunikasi inilah sehingga proses dalam pernikahan beda etnis tersebut mudah untuk dilakukan khususnya dalam pengangkatan marga bagi yang bukan orang Batak akan lebih mudah.

2. Pengangkatan Marga

Marga merupakan identitas penting bagi orang Batak. Selain identitas juga merupakan penentu hubungan kekeluargaan bagi setiap orang Batak. Pada dasarnya aturan budaya Batak jelas melarang pernikahan yang buka orang Batak. Namun dengan perkembangan zaman, pernikahan berbeda etnis bukan lagi merupakan suatu hal yang jarang kita dengar. Dalam adat istiadat orang Batak pernikahan yang beda suku bukan menjadi larangan dalam penyatuan sebuah keluarga hanya saja ketika orang yang bukan orang Batak masuk dalam kesukuan Batak maka dilakukan sebuah pengangkatan marga karena inilah menjadi aturan penting dalam setiap kedudukan untuk penentu *partuturon* (hubungan persaudaraan) semakin erat dan tali persaudaraan.

3. Mangaen Boru atau Mangaen Anak

Mangaen boru atau mangaen anak ini menjadi hal yang sangat penting bukan hanya sekedar embel-embel agar seseorang dapat menikah dengan orang Batak, melainkan pentingnya melestarikan adat dalam adat istiadatnya kesukuan Batak. Mangaen boru atau mangaen anak merupakan prosesi dimana sekeluarga mendatangi *hula-hula* dan memberikan uang (*pasituak natonggi*) dan beras dengan tujuan agar orang yang bukan Batak (*etnis Melayu*) sah menjadi bagian dari keluarga Batak (pemberian marga) selesai dilakukan.

C. Faktor Terjadinya Negosiasi Marga dalam Pernikahan Pada Etnis Batak dan Melayu di Pangkalpinang

1. Faktor Relasi Kuasa

Bentuk relasi kuasa ini ialah bahwa etnis Batak lebih mendominasi dalam fenomena pernikahan amalgamasi tersebut dan menjadikan identitas tersebut sebagai alat untuk sebuah kekuasaannya dan sering menjadikan sebuah indikator yang mempublikasikan terkait khusus pada simbol identitas yang dimilikinya sehingga orang Batak tersebut mampu menarik orang yang bukan etnis Batak terhadap kebudayaan adat yang dimiliki dan dalam kerangka penentuan identitasnya maka pada umumnya istri yang bukan orang Batak namun sudah disahkan jadi orang Batak akan lebih mendukung identitas dari suaminya begitupun sebaliknya, tetapi dalam penelitian yang peneliti teliti bahwa

kaum perempuan lebih dominan melakukan pernikahan pada laki-laki orang Batak sehingga pola pikir yang dikatakan oleh kaum perempuan tersebut pada umumnya istrilah yang akan ikut suami.

2. Faktor cinta

Faktor ini merupakan salah satu yang sering mengakibatkan pernikahan amalgamasi terjadi dimana seseorang tersebut sudah mencintai pasangannya tersebut tanpa memandang sedikit dari segi perbedaannya. Seharusnya ketika mencintai ada baiknya kita memiliki pertimbangan baik yang jadi pondasi utama untuk mengenalkan atau mengajarkan kebudayaannya.

D. Legitimasi Identitas, Resistensi Identitas dan Proyek Identitas Etnis Batak dan Etnis Melayu

Penelitian ini menggunakan Teori Manuel Castells. Teori ini digunakan mengidentifikasi politik identitas pada pernikahan amalgamasi di Kota Pangkalpinang. Manuel Castells jelas mengidentifikasi dalam 3 model yaitu, legitimasi identitas, resistensi identitas, dan proyek identitas. Dalam ketiga model teori ini menjelaskan bahwa identitas mampu membentuk sebuah kekuasaan dalam mencapai posisi tertentu hal inilah kemudian dapat disimpulkan bahwa identitas dijadikan sebagai alat kuasa untuk memperoleh sebuah kedudukan dalam masyarakatnya. Melihat kondisi pernikahan antara etnis Batak dan Etnis Melayu yang sudah lumrah terjadi terjadi, etnis Batak sendiri menyebut adatnya mereka tidak dapat menerima pernikahan beda etnis tanpa diberikan marga dengan tujuan untuk bisa menjalankan adat istiadat yang sudah berlaku pada kepercayaan adat Batak. Pada kenyataannya seperti yang terjadi saat ini, dimana antara pernikahan etnis Batak dan etnis Melayu di Pangkalpinang bahwa fenomena yang terjadi antar kedua etnis yang berbeda lebih kepada kekuatan identitas yang dijadikan sebagai alat kekuasaan dalam mendapatkan tujuan tertentu dengan sisi lain menjadikan marga tersebut sebagai alat untuk memperoleh etnis yang baru dengan menciptakan identitas baru.

1	Legitimasi identitas	Identitas yang dibangun oleh institusi (pengusaha) yang dominan dalam kehidupan sosial. Institusi ini menunjukkan dominasinya dengan melekatkan sebuah identitas tertentu pada seseorang atau kelompok.
---	----------------------	---

2	Resistensi identitas	Identitas yang dilekatkan oleh aktor sosial tertentu dimana pemberian identitas tersebut dilakukan dalam kondisi tertekan karena adanya dominasi hingga membentuk identitas baru yang berbeda.
3	Proyek identitas	Bentuk identitas baru untuk bisa mencapai posisi tertentu dalam masyarakat.

Maka dari ketiga teori Manuel Castells tersebut legitimasi identitas merupakan teori yang lebih melekat dengan analisis penelitian ini dikarenakan dalam penelitian ini menjelaskan bahwa identitas (marga) yang dimiliki oleh etnis Batak tersebut menjadikan sebagai alat kekuasaan atau kedudukan yang mampu membentuk identitas baru sehingga mampu lebih mendominasi terhadap etnis Melayu tersebut dan dengan adanya upaya kekuatan identitas tersebut kemudian orang Batak mampu membentuk sebuah relasi kuasa untuk mendapatkan posisi yang kuat terhadap orang Melayu tersebut.

E. Strategi dalam Negosiasi Marga pada Pernikahan Amalgamasi

Pada sistem pernikahan dalam kebudayaan Batak, terdapat strategi untuk memberikan marga pada seseorang yang bukan Batak. Strategi merupakan mekanisme yang dapat membantu untuk memperlancar perkembangan pribadi anggota masyarakat, misalnya dalam membimbing anak menuju kedewasaan. Strategi ini juga sangat penting sebagai pembimbing pergaulan bersama dalam masyarakat etnis Batak nantinya.

Strategi ini dikenal dengan istilah mangain marga. Proses ini dalam kebudayaan Batak dilakukan dengan strategi mengangkat orang yang bukan keturunan Batak asli yang dalam penelitian ini berasal dari suku Melayu. Ketika seseorang suku lain tersebut sudah diberikan marga atau sudah diangkat jadi orang Batak maka ia akan dianggap sah sebagai keturunan Batak dan berhak untuk menyandang marga Batak.

Strategi ini juga sudah menjadi kebiasaan turun temurun (dari nenek moyang) yang masih dijalankan dalam masyarakat yang masih mana penilaian atau anggapan bahwa strategi yang telah ada merupakan hal yang baik dan benar. Selain strategi ini biasanya etnis Batak juga memiliki strategi komunikasi, dimana adanya komunikasi di dalam mangai marga akan mempermudah seseorang yang akan melakukan pengangkatan marga. Selain

itu, strategi komunikasi yang dilakukan antara kedua etnis yang berbeda ini juga akan lebih cepat dalam penerimaan etnis baru pada lingkungan masyarakat Batak nantinya.

IV. KESIMPULAN

Pernikahan amagama merupakan suatu pernikahan campuran antara dua orang etnis yang berbeda dan menjadi wadah dari Bhineka Tunggal Ika bagi masyarakat Pangkalpinang. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi negosiasi marga dalam pernikahan antara etnis Batak dan etnis Melayu adalah sebagai berikut: Pertama, dari faktor relasi kuasa. Relasi kuasa dalam konteks politik identitas yang dimaksud dalam penelitian ini adalah cara pendekatan komunikasi dalam kajian identitas yang ada pada diri mereka tersebut. Pola pendekatan komunikasi tersebut biasanya di dominan pada etnis Batak terhadap etnis Melayu. Kedua, dari faktor cinta. Pada dasarnya manusia diciptakan untuk saling melengkapi satu sama lain dan bertujuan untuk memiliki sebuah keturunan, oleh sebab itu tidak lain terjadi ketika seseorang saling mencintai dan tidak memandang asal usul etnis yang dicitainya. Dalam kebudayaan adat istiadat orang Batak, marga merupakan suatu identitas umum yang dibawah sejak lahir dan menjadi penentu hubungan kekerabatan antara orang lain. adapun pola kinerja dari politik identitas terhadap negosiasi marga pada pernikahan amalgamasi dalam etnis Batak di Kota Pangkalpinang yang bisa dilihat dari 3 proses yaitu: Pertama, pendekatan komunikasi yang menjadi dasar penguatan dalam proses pernikahan berbeda etnis dalam adat kebudayaan Batak. melalui pola komunikasi awal yang dibangun dengan tujuan untuk menarik sebuah simpati maka terciptalah sebuah negosiasi yang universal ketika menjalani setiap prosedur yang akan dijalankan. Kedua, pengangkatan marga yang merupakan suatu bentuk identitas yang dilakukan oleh etnis Batak terhadap yang bukan orang Batak ketika melakukan pernikahan. Dalam pengangkatan marga ini yang menjadi keharusan bagi adat istiadat orang Batak dan menjadi suatu pola yang baik dalam sebuah pernikahan amagama pada orang yang buka suku Batak. dengan tujuan agar terhindari dari permasalahan atau penolakan pengadatan bagi etnis Batak. Ketiga, mangae boru atau mangae anak yang

merupakan bagian dari setiap sistem adat istiadat etnis Batak terkait dalam pernikahan beda etnis, dimana dengan melakukan hal tersebut maka orang yang melakukan pernikahan itu akan lebih dianggap lebih sah terkait pada kekerabatannya nanti (*partuturon*).

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih ini disampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam terselesainya penelitian ini, terutama kepada orangtua saya yang terus mendukung saya baik dalam hal moril maupun materil, juga para pembimbing yang telah banyak memberikan masukan dan arahan terhadap penelitian ini serta tidak lupa juga terima kasih kepada para narasumber yang telah banyak meluangkan waktu dan memberikan informasi terkait penelitian yang dilakukan.

V. DAFTAR PUSTAKA

- Castells, M. (2010). *The Power Of Identity: The Information Age, Economy, Society and Cultural*. Vol II. Blackwell Publishing: Auastralia.
- Habibi Muhammad. 2017. *Analisis politik identitas di indonesia*. Universitas Mulawarman, Samarinda. Jurnal Ilmu Sosial dan Politik.
- Khiyarah Miftahul. 2017. *Genealogi dan Politik Identitas*. Skripsi: Universitas Islam Negeri Alaidin Makasar.
- Nurdiani. 2014. *Teknik Snowball Sampling dalam Penelitian Lapangan*. Jurnal Binus Universitas Palmerah Jakarta.
- Veronica juwita. 2017. *Negosiasi Identitas dalam Pernikahan Tanpa Marga pada Pasangan Campuran Suku Batak*. Skripsi: Universitas Diponegoro.
- Agustina Fero Br Situmorang. 2017. *Proses Pemberian Marga Kepada Non Batak Pada Masyarakat Adat Batak Toba*. Diakses dari <https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=Proses+Pemberian+Marga+Kepada+Non+Batak+Pada+Masyarakat+Adat+Batak+Toba>.
- Muhamad Habibi. 2017. *Analisis Politik Identitas di Indonesia*. Diakses dari https://www.researchgate.net/publication/315338050_Analisis_Politik_Identitas_di_Indonesia_Identity_Politics_in_Indonesia.




INDEKS AFILIASI

Universitas Bangka Belitung Bangka Belitung, Indonesia	1
Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Jakarta, Indonesia	9
Universitas Bangka Belitung Bangka Belitung, Indonesia	23
Universitas Bangka Belitung Bangka Belitung, Indonesia	30
Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara Jepara, Indonesia	36
Universitas Bangka Belitung Bangka Belitung, Indonesia	45
Universitas Bangka Belitung Bangka Belitung, Indonesia	55
Universitas Bangka Belitung Bangka Belitung, Indonesia	62
Universitas Islam Zainul Hasan Probolinggo, Indonesia	72
Universitas Bangka Belitung Bangka Belitung, Indonesia	80



Inovbook Publications

 <https://www.inovbook.com>

 contact@inovbook.com